



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan menjalankan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur dan dapat diukur. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Sesuai amanat Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran predikat nilai capaian kinerjanya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai peringkat sebagai berikut :



No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d < 85	Berhasil
3.	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4.	0 s/d < 55	Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021 maupun RKPD Tahun 2018. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi Pemerintah.

Untuk lebih jelasnya pengukuran realisasi kinerja dan pencapaian kinerja Tahun 2018 ditiap misi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun penilaian tingkat pencapaian kinerja dan pengukuran realisasi kinerja setiap sasaran. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. PERBANDINGAN TARGET TAHUN 2018 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018



Tabel : 3.1
Pencapaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN					
Tujuan 1.1. : Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Dan Perluasan Akses Pendidikan Serta Layanan Kesehatan Masyarakat					
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			65,23%	belum dirilis	BPS
1.1.1	Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,26 tahun	belum dirilis	BPS
		Rata-rata Lama Sekolah	6,69 tahun	belum dirilis	BPS
		Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	80,06%	86,04%	107,47%
		Persentase jumlah sekolah terakreditasi :			
		Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	90,25%	83,95%	93,02%
		Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	81,30%	79,25%	97,48%
1.1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Utamanya Pelajar	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	20.500	37.930	185%
		IKM layanan perpustakaan	77,22	76,25	99%
1.1.3	Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,32	70,71	100,55%
		Persentase Penduduk yang dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	63%	67%	106,35%
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%	100%	100%
1.1.4	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi	Rasio KB Aktif	65,07%	68,27%	104,92%
		Persentase Angka pertumbuhan penduduk	56%	0,56%	155,40%
Tujuan 1.2. : Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Sebagai Bentuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan					
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka			3,08%	2,08%	148,08%
1.2.1	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	Persentase partisipasi angkatan kerja	74,11%	74,25%	100,19%
		Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	0,26%	0,35%	74,29%
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	38,86%	37,15%	95,60%
		Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.085	7.358	180,12%
Persentase Angka Kemiskinan			17,45%	20,16%	86,56%
1.2.2	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS (jiwa)	100.606	243.077	41,39%
		Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	4,20%	26,44%	629,52%
1.2.3	Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	0,022%	0,0079%	278,48%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	57,38%	100%	174,28%
MISI 2 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN					
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan Sebagai Bentuk Upaya Menurunkan Disparitas Ketersediaan Infrastruktur Antar Wilayah					
Indeks GINI (GINI Ratio)			0,25%	belum dirilis	BPS
2.1.1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik:			
		<i>Daratan:</i>			
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,76%	80,21%	111,78%
		Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	87,56%	54%	105,75%
		Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	6.568	6.533	99,47%
		Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi	74,62%	75%	100,27%
		<i>Kepulauan:</i>			
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	51,09%	97,73%	111,61%
		Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	82,86%	86%	103,92%
		Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	353	353	100%
		Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	60,09%	53,79%	89,52%
2.1.2	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0764%	0%	120,55%
		Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	83,75%	96,06%	114,70%
2.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/Perumahan Secara Memadai	Indeks Kota Layak Huni :			
		Persentase rumah tinggal bersantasi	90%	81,28%	90,31%
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	50,7%	81,3%	160,32%
		Persentase rumah layak huni	23%	23%	100%
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	5%	3%	60%
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota,Kalianget dan Batuan)	68%	71%	104,41%
		Persentase tersedianya luasan RTH publik	32%	25%	78,13%
Tujuan 2.2 : Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan SDA Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			72,81%	71,41%	98,08%
2.2.1	Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA Dan Lingkungan	Indeks kualitas air sungai	66,67	63,33	94,99%
		Indeks kualitas udara	76,06	87,27	114,74%
		Indeks Tutupan Lahan	74,98	73,91	98,57%
		Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)	572	729	127,45%
2.2.2	Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup	Rasio elektrifikasi	58,47%	58,40%	99,88%
		Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	2,05%	2,15%	100%
MISI 3 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI					



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Kegiatan Ekonomi, Kualitas Kelembagaan UMKM Koperasi Dan Pengembangan Wisata Daerah Serta Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal/Investasi Daerah, Industri Perdagangan					
Persentase Pertumbuhan ekonomi			6,52%	belum dirilis	BPS
PDRB per kapita			27.293.48 (Milyar Rp)	belum dirilis	BPS
3.1.1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM	Persentase Koperasi sehat (KSP/USP)	2,96%	7,49%	253,04%
		Persentase pertumbuhan UMKM	18%	5%	25%
3.1.2	Meningkatnya Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15%	1,87%	12,47%
		Persentase jumlah kunjungan wisatawan	9%	46%	511,11%
3.1.3	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi penanaman modal:			
		Nilai Investasi PMDN	Rp 435.280.453.964	Rp 1.334.169.631.253	306,51%
		Nilai Investasi PMA	Rp 5.020.060.120	Rp -	0
		Jumlah investor	5642	2577	45,68%
3.1.3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar	Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	6,28%	belum dirilis	
		Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	12,92%	belum dirilis	
Tujuan 3.2 : Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah					
Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)			82%		
3.2.1	Meningkatnya Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)	Jumlah produksi Tanaman pangan			
		Padi (ton)	227.637,87	199.352	87,57%
		Jagung (ton)	432.013,58	403.483	93,40%
		Kedelai (ton)	7.553,42	22.877	302,87%
		Ubi Kayu (ton)	105.670,40	25.576	24,20%
		Produktivitas tanaman pangan			
		Padi (ton/ha)	6,81	5,70	83,70%
		Jagung (ton/ha)	2,98	2,90	97,32%
		Kedelai (ton/ha)	1,63	1,40	85,89%
		Ubi Kayu (ton/ha)	15,01	15,00	99,93%
		Peningkatan Jumlah Populasi dan Produksi hasil Ternak :			
		Populasi Peternakan (ekor)			
		sapi potong	363.824	367.382	100,98%
		kerbau	5.119	5.071	99,06%
		kuda	2.183	2.167	99,27%
		kambing	150.924	153.378	101,63%
		domba	38.993	39.650	101,68%
		ayam buras	782.582	787.853	100,67%
		ayam petelur	324.522	326.760	100,69%
		ayam pedaging	116.581	145.485	124,79%
		itik	56.448	57.244	101,41%
		mentok	12.382	12.529	101,19%
		Peningkatan Produksi Peternakan (kg)			
Daging	4.474.256	4.629.704	103,47%		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Telur	2.761.838	3.298.745	119,44%
		Jumlah produksi hasil perkebunan (ton)			
		Peningkatan Produksi Perkebunan :			
		kelapa	42.643	43.968,38	103,11%
		tembakau	9.245	8.171,10	88,39%
		cabe jamu	9.866	10.198,29	103,37%
		jambu mete	4.975	5.247,78	105,48%
		siwalan	776	749,33	96,53%
3.2.2	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan :			
		Jumlah hasil perikanan tangkap (ton)	48.100	47.927	99,64%
		Jumlah hasil perikanan budidaya (ton)	647.294,00	661.771,52	102,24%
		Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)	41,09	belum dirilis	BPS
3.2.3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase kualitas gizi pangan daerah	80%	71%	88,34%
		Persentase daerah rawan gizi	12%	57%	479,08%
MISI 4 : MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL					
Tujuan 4.1. : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan					
Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah			45%	72,69%	161,53%
4.1.1	Meningkatnya Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	26%	30%	115,38%
4.1.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	65%	78%	120%
4.1.3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	Jumlah desa sejahtera	81 desa	-	-
		Persentase desa yang tertib administrasi	100%	60%	60%
Tujuan 4.2. : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) terhadap Layanan Publik Daerah			80,25	95,91	119,51%
4.2.1	Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah (orang)	3.287	75.000	2281,72%
4.2.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki E-KTP	91%	82%	90,63%
Tujuan 4.3. : Mewujudkan Kultur Dan Tata Pemerintahan Yang Tertib Dan Akuntabel					
Nilai Opini BPK			WTP	WTP	100%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.3.1	Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	85%	91%	107,06%
		Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	91%	97%	106,59%
		Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	0,20%	0,15%	133,33%
		Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur	peringkat 31	belum dirilis	
		Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur	70,00	67,48	96,40%
4.3.2	Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	Jumlah Risalah rapat/sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan (kali)	181	272	150,28%
		Jumlah naskah produk hukum Daerah	23	19	82,60%
4.3.3	Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel	Persentase pertumbuhan PAD	15%	10,14%	67,60%
		Persentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat	34,87%	34,81%	99,83%
		Persentase Belanja modal terhadap total belanja	19,12%	16,48%	86,19%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	80%	76,50%	95,63%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	87%	77,50%	89,08%
MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA STAKEHOLDER DALAM PROSES PEMBANGUNAN					
Tujuan 5.1. : Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat					
% Jumlah Konflik			1%	0%	101%
5.1.1	Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	93%	100%	107,53%
		Jumlah demo bersifat sosial	100%	100%	100%
5.1.2	Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)	Angka Kriminalitas	14,28%	0,2057%	144,05%
		Persentase Penegakan Perda	94,56%	92%	97,73%
		Persentase Pelanggaran K3	5,44%	8%	155,70%
		Persentase penanganan daerah rawan bencana	78,75%	100%	126,98%
		Jumlah Korban Bencana (org)	50	1.303.000	0,0038%
		Jumlah korban Bencana yang tertangani (org)	50	1.303.000	2606000%
MISI 6 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT					
Tujuan 6.1. : Meningkatkan Penguatan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Pemberdayaan Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga Persentase Apresiasi Seni dan Budaya Sumenep					
			10%	17%	173,90%
6.1.1	Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep	Persentase kesenian lokal yang dikembangkan	10%	17%	170%
6.1.2	Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan	Persentase pemuda yang dibina sehingga berprestasi	10%	0%	0%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep	Persentase prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	20%	29%	145%

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel : 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN						
Tujuan 1.1. : Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Dan Perluasan Akses Pendidikan Serta Layanan Kesehatan Masyarakat						
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			65,23%	64,28%	belum dirilis	
1.1.1.	Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,26 tahun	13,03 Th	belum dirilis	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,69 Th	5,42 Th	belum dirilis	
		Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	80,06%	93,98%	86,04%	
		Persentase jumlah sekolah terakreditasi :				
		Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	90,25%	70,10%	83,95%	
		Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	81,30%	72,20%	79,25%	
1.1.2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Utamanya Pelajar	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	20.500	19.500	37.930	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		IKM layanan perpustakaan	77,22	74,64	76,25	
1.1.3.	Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,32%	70,28 th	70,71	DINAS KESEHATAN
		Persentase Penduduk yang dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	63%	63%	67%	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%	73%	100%	
1.1.4.	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi	Rasio KB Aktif	65,07%	67,57%	68,27%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Angka pertumbuhan penduduk	56%	0,48%	0,56%	
Tujuan 1.2. : Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Sebagai Bentuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan						
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka			3,08%	2,11%	2,08%	
1.2.1.	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	Persentase partisipasi angkatan kerja	74,11%	59,04%	74,25%	DINAS TENAGA KERJA
		Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	0,26%	0,71%	0,35%	
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	38,86%	54,19%	37,15%	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.085 peserta	5.267 usaha	7.358	
Persentase Angka Kemiskinan			17,45%	19,62%	20,16%	
1.2.2.	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	100.606 Jiwa	177.613	243.077	DINAS SOSIAL
		Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	4,20%	24,77%	26,44%	
1.2.3.	Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	0,022%	0,0106%	0,0079%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	57,38%	100%	100%	
MISI 2 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN						
Tujuan 2.1. : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan Sebagai Bentuk Upaya Menurunkan Disparitas Ketersediaan Infrastruktur Antar Wilayah						
Indeks GINI (GINI Ratio)			0,25%	0,24%	belum dirilis	
2.1.1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik:				
		<u>Daratan:</u>				
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,76%	77,38%	80,21%	DINAS PU. BINA MARGA
		Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	87,56%	98,67%	54%	
		Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	6.568 ha	6.525	6.533	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	74,62%	72,98%	75%	
		<u>Kepulauan:</u>				
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	51,09%	53,23%	97,73%	DINAS PU. BINA MARGA
		Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	82,86%	90,91%	86%	
		Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	353 ha	353	353	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
	Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	60,09%	49,020%	53,79%		
2.1.2.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0764%	0,1051%	0%	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	83,75%	88,29%	96,06%	
2.1.3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/Perumahan Secara Memadai	Indeks Kota Layak Huni :				
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	90%	81%	81,28%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	50,7%	76,3%	81,3%	
		Persentase rumah layak huni	23%	4%	23%	
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	5%	9%	3%	
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)	68%	67%	71%	
		Persentase tersedianya luasan RTH publik	32%	16%	25%	
Tujuan 2.2. : Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan SDA Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan						



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			72,81%	75,12%	71,41%	
2.2.1.	Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA Dan Lingkungan	Indeks kualitas air sungai	66,67	63,33	63,33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks kualitas udara	76,06	88,84	87,27	
		Indeks Tutupan Lahan	74,98	73,67	73,91	
		Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)	572	623	729	
2.2.2.	Meningkatnya Kualitas SDA Dan Lingkungan Hidup	Rasio elektrifikasi	58,47%	55,49%	58,40%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	2,05%	2,05%	2,15%	BAGIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA
MISI 3 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI						
Tujuan 3.1. : Meningkatkan Kegiatan Ekonomi, Kualitas Kelembagaan UMKM Koperasi Dan Pengembangan Wisata Daerah Serta Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal/Investasi Daerah, Industri Perdagangan						
Persentase Pertumbuhan ekonomi			6,52%	5,11%	belum dirilis	
PDRB per kapita			27.293.48 (Milyar Rp)	28,28 (juta Rp.)	belum dirilis	
3.1.1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM	Persentase Koperasi sehat (KSP/USP)	2,96%	5,72%	7,49%	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase pertumbuhan UMKM	18%	5%	5%	
3.1.2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15%	19%	1,87%	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAH RAGA
		Persentase jumlah kunjungan wisatawan	9%	17%	46%	
3.1.3.	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi penanaman modal:				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Nilai Investasi PMDN	Rp 435.280.453.984	Rp.1.792.222.900.671	Rp 1.334.169.631.253	
		Nilai Investasi PMA	Rp 5.020.060.120	-	-	
		Jumlah investor	5.642 Investor	3550 Investor	2.577	
3.1.3.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar	Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	6,28%	6,48%	belum dirilis	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	12,92%	14,03%	belum dirilis	
Tujuan 3.2. : Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah						
Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)			82%	Belum dirilis		
3.2.1.	Meningkatnya Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)	Jumlah produksi Tanaman pangan				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Padi (ton)	227.637,87 ton	277.740,07 (ton)	199.352	
		Jagung (ton)	432.013,58 ton	413.053,62 (ton)	403.483	
		Kedelai (ton)	7.553,42 ton	6.290,49 (ton)	22.877	
		Ubi Kayu (ton)	105.670,40 ton	52.283,14 (ton)	25.576	
		Produktivitas tanaman pangan :				



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA		PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Padi (ton/ha)	6,81 ton/ha	6,7 (ton/ha)	5,70		
		Jagung (ton/ha)	2,98 ton/ha	2,9 (ton/ha)	2,90		
		Kedelai (ton/ha)	1,63 ton/ha	1,61(ton/ha)	1,40		
		Ubi Kayu (ton/ha)	15,01 ton/ha	10,04 (ton/ha)	15,00		
		Peningkatan Jumlah Populasi dan Produksi hasil Ternak :				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	
		Populasi Peternakan (ekor)					
		sapi potong	363.824 ekor	361.127 ekor	367.382		
		kerbau	5.119 ekor	5.071 ekor	5.071		
		kuda	2.183 ekor	2.167 ekor	2.167		
		kambing	150.924 ekor	151.714 ekor	153.378		
		domba	38.993 ekor	39.128 ekor	39.650		
		ayam buras	782.582 ekor	781.000 ekor	787.853		
		ayam petelur	324.522 ekor	324.180 ekor	326.760		
		ayam pedaging	116.581 ekor	144.715 ekor	145.485		
		itik	56.448 ekor	56.835 ekor	57.244		
		mentok	12.382 ekor	12.406 ekor	12.529		
		Peningkatan Produksi Peternakan :					
		Daging	4.474.256 kg	4.636.214 kg	4.629.704		
		Telur	2.761.838 kg	3.287.185 kg	3.298.745		
		Jumlah produksi hasil perkebunan (ton)					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Peningkatan Produksi Perkebunan :					
		kelapa	42.642,76 ton	43.968,38 ton	43.968,38		
		tembakau	9.244,58 ton	8.171,1 ton	8.171,10		
		cabe jamu	9.865,92 ton	10.198,29 ton	10.198,29		
		jambu mete	4.974,94 ton	5.247,78 ton	5.247,78		
		siwalan	776,27 ton	749,33 ton	749,33		
3.2.2.	Meningkatnya Ekonomi Pemanfaatan Sumber Daya Laut Berkelanjutan	Manfaat Melalui Sumber Yang	Produksi Perikanan :			DINAS PERIKANAN	
			Jumlah hasil perikanan tangkap (ton)	48.100 ton	47.605,44 ton		47.927
			Jumlah hasil perikanan budidaya (ton)	647.294 ton	532.630,31 ton		661.771,52
			Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan	41,09 kg/kap/th	49,20 kg/kap/th		belum dirilis
3.2.3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Persentase kualitas gizi pangan daerah	80%	69%	71%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
			Persentase daerah rawan gizi	12%	57,19%	57%	
MISI 4 : MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL							
Tujuan 4.1. : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan							
Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah			45%		72,69%		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.1.	Meningkatnya Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	26%	30%	30%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	65%	77%	78%	
4.1.3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	Jumlah desa sejahtera	81 desa	-	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase desa yang tertib administrasi	100%	60%	60%	
Tujuan 4.2. : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) terhadap Layanan Publik Daerah			80,25	95,91	119,51%	
4.2.1.	Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	3.287 orang	21.000 orang	75.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.2.2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki E-KTP	91%	78%	82%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tujuan 4.3. : Mewujudkan Kultur Dan Tata Pemerintahan Yang Tertib Dan Akuntabel						
Nilai Opini BPK			WTP	WTP	WTP	
4.3.1.	Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	85%	96%	91%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	91%	96%	97%	
		Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	0,20%	0,26%	0,15%	
		Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur	peringkat 31	Peringkat 20	belum dirilis	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA
		Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur	Nilai 70,00	60,12	67,48	BAGIAN ORGANISASI SETDA
4.3.2.	Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	Jumlah Risalah rapat/sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan	181 kali	50 kali	272	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		Jumlah naskah produk hukum Daerah	23 naskah	14 naskah	19	
4.3.3.	Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel	Persentase pertumbuhan PAD	15%	9,24%	10,14%	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat	34,87%	34,81%	34,81%	
		Persentase Belanja modal terhadap total belanja	19,12%	16,47%	16,48%	
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	80%	93%	76,50%	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	87%	71%	77,50%	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA STAKEHOLDER DALAM PROSES PEMBANGUNAN						
Tujuan 5.1. : Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat						
% Jumlah Konflik			1%		0%	
5.1.1.	Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	93%	92%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		Jumlah demo bersifat sosial	100%	33 demo	100%	
5.1.2.	Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)	Angka Kriminalitas	14,28%	10,41%	0,2057%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Penegakan Perda	94,56%	99,23%	92%	
		Persentase Pelanggaran K3	5,44%	1,28%	8%	
		Persentase penanganan daerah rawan bencana	78,75%	100%	100%	BADAN PENANGGUNG LANGGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Korban Bencana (org)	50 orang	50 orang	1.303.000	
		Jumlah korban Bencana yang tertangani (org)	50 orang	50 orang	1.303.000	
MISI 6 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT						
Tujuan 6.1. : Meningkatkan Penguatan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Pemberdayaan Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga						
Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep			10%		17,39%	
6.1.1.	Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep	Persentase kesenian lokal yang dikembangkan	10%	12%	17%	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA
6.1.2.	Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep	Persentase pemuda yang dibina sehingga berprestasi	10%	20%	0%	
		Persentase prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	20%	27%	29%	

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tabel : 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN	PENANGGUNG JAWAB/SUMBER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN						
Tujuan 1.1. : Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Dan Perluasan Akses Pendidikan Serta Layanan Kesehatan Masyarakat						
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			67,8%	belum dirilis		BPS
1.1.1.	Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,75%	belum dirilis		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,13 th	belum dirilis		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN	PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	80,78%	86,04%	106,51%	
		Persentase jumlah sekolah terakreditasi :				
		Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	97,20%	83,95%	86,37%	
		Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	93,40%	79,25%	84,85%	
		Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	94,20%	-	-	
1.1.2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Utamanya Pelajar	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	21.500	37.930	176,42%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		IKM layanan perpustakaan	80,16	76,25	95,12%	
1.1.3.	Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,50	70,71	100,30%	DINAS KESEHATAN
		Persentase Penduduk yang dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	65%	67%	103,08%	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%	100%	100,00%	
1.1.4.	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi	Rasio KB Aktif	67,07%	68,27%	101,79%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Angka pertumbuhan penduduk	0,56%	0,56%	100,00%	
Tujuan 1.2. : Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Sebagai Bentuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan						
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka			1,9%	2,08%		
1.2.1.	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	Persentase partisipasi angkatan kerja	74,24%	74,25%	100,01%	DINAS TENAGA KERJA
		Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	0,20%	0,35%	57,14%	
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	39,66%	37,15%	93,67%	
		Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.405	7.358	167,04%	
Persentase Angka Kemiskinan			19,34%	20,16%	95,93%	BPS
1.2.2.	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	100.606	243.077	41%	DINAS SOSIAL
		Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	4,40%	26,44%	600,91%	
1.2.3.	Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	0,028%	0,0079%	354%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	60,81%	100%	164,45%	
MISI 2 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN						
Tujuan 2.1. : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan Sebagai Bentuk Upaya Menurunkan Disparitas Ketersediaan Infrastruktur Antar Wilayah						
Indeks GINI (GINI Ratio)			26,34%	belum dirilis		BPS
2.1.1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik:				



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN	PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	<u>Daratan:</u>				
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	73,74%	80,21%	108,77%	DINAS PU. BINA MARGA
		Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	89,66%	54%	109,00%	
		Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	6.638	6.533	98,42%	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	77,70%	75%	96,29%	
		<u>Kepulauan:</u>				
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	55,61%	97,73%	97,16%	DINAS PU. BINA MARGA
		Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	84,21%	86%	102,26%	
		Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	353	353	100%	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	60,15%	53,79%	89,43%	
2.1.2.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0744%	0%	123,79%	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	86,15%	96,06%	111,50%	
2.1.3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	Indeks Kota Layak Huni :				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	81,28%	81,28%	
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	57,70%	81,3%	140,87%	
		Persentase rumah layak huni	25%	23%	92,00%	
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	-	3%	-	
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)	70%	71%	101,43%	
		Persentase tersedianya luasan RTH publik	42%	25%	59,52%	
Tujuan 2.2. : Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan SDA Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan						
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				71,41%		
2.2.1.	Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA Dan Lingkungan	Indeks kualitas air sungai	70,00	63,33	74,60%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks kualitas udara	79,17	87,27	110%	
		Indeks Tutupan Lahan	75,58	73,91	98%	
		Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)	672,00	729	108,48%	
2.2.2.	Meningkatnya Kualitas SDA Dan Lingkungan Hidup	Rasio elektrifikasi	62,47%	58,40%	93,48%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	2,07%	2,15%	98,94%	BAGIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA
MISI 3 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI						
Tujuan 3.1. : Meningkatkan Kegiatan Ekonomi, Kualitas Kelembagaan UMKM Koperasi Dan Pengembangan Wisata Daerah Serta Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal/Investasi Daerah, Industri Perdagangan						



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN	PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pertumbuhan ekonomi				belum dirilis		
PDRB per kapita				belum dirilis		
3.1.1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM	Persentase Koperasi sehat (KSP/USP)	3%	7,49%	249,67%	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase pertumbuhan UMKM	20%	5%	22,50%	
3.1.2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15%	1,87%	12,47%	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Persentase jumlah kunjungan wisatawan	11%	46%	418,18%	
3.1.3.	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi penanaman modal:				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Nilai Investasi PMDN	Rp 465.381.741.065	Rp 1.334.169.631.253	286,68%	
		Nilai Investasi PMA	Rp 5.030.150.602	-	-	
		Jumlah investor	6.827	2.577	37,75%	
3.1.3.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar	Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	6,41%	belum dirilis		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	13,84%	belum dirilis		
Tujuan 3.2. : Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah						
Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)				0%		
3.2.1.	Meningkatnya Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)	Jumlah produksi Tanaman pangan				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Padi (ton)	237.525,12	199.352	83,93%	
		Jagung (ton)	450.684,29	403.483	89,53%	
		Kedelai (ton)	7.891,95	22.877	289,88%	
		Ubi Kayu (ton)	107.029,60	25.576	23,90%	
		Produktivitas tanaman pangan				
		Padi (ton/ha)	6,88	5,70	82,85%	
		Jagung (ton/ha)	3,01	2,90	96,35%	
		Kedelai (ton/ha)	1,65	1,40	84,85%	
		Ubi Kayu (ton/ha)	15,16	15,00	98,94%	
		Peningkatan Jumlah Populasi dan Produksi hasil Ternak :				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		Populasi Peternakan				
		sapi potong	371.137	367.382	98,99%	
		kerbau	5.170	5.071	98,09%	
		kuda	2.205	2.167	98,28%	
		kambing	152.437	153.378	100,62%	
		domba	39.384	39.650	100,68%	
		ayam buras	786.500	787.853	100,17%	
		ayam petelur	327.776	326.760	99,69%	
		ayam pedaging	117.750	145.485	123,55%	
		itik	56.730	57.244	100,91%	
		mentok	12.444	12.529	100,68%	
Peningkatan Produksi Peternakan						
Daging	4.564.188,76	4.629.704	101,44%			
Telur	2.817.351,20	3.298.745	117,09%			



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN	PENANGGUNG JAWAB/SUMBER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah produksi hasil perkebunan (ton)				
		Peningkatan Produksi Perkebunan :				
		kelapa	42.663,92	43.968,38	103,06%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		tembakau	9.242,28	8.171,10	88,41%	
		cabe jamu	9.868,15	10.198,29	103,35%	
		jambu mete	4.822,31	5.247,78	108,82%	
		siwalan	776,37	749,33	96,52%	
3.2.2.	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan :				
		Jumlah hasil perikanan tangkap (ton)	49.000	47.927	97,81%	
		Jumlah hasil perikanan budidaya (ton)	666.675	661.771,52	99,26%	
		Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)	41,92	belum dirilis		
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase kualitas gizi pangan daerah	84%	71%	84,13%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		Persentase daerah rawan gizi	9%	57%	15,65%	
MISI 4 : MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL						
Tujuan 4.1. : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan						
Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah				72,69%		
4.1.1.	Meningkatnya Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	35%	30%	86%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Program Kegiatan Pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	75%	78%	104%	
4.1.3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	Jumlah desa sejahtera	135 desa	-	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase desa yang tertib administrasi	100%	60%	60,00%	
Tujuan 4.2. : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) terhadap Layanan Publik Daerah			96	95,91	99,91%	
4.2.1.	Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	3.500	75.000	2142,86%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.2.2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki E-KTP	97%	82%	85,02%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tujuan 4.3. : Mewujudkan Kultur Dan Tata Pemerintahan Yang Tertib Dan Akuntabel						
Nilai Opini BPK				WTP		
4.3.1.	Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	90%	91%	101,11%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	94%	97%	103%	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN	PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	0,20%	0,15%	133%	
		Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur	peringkag 27	belum dirilis		BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA
		Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur	79,00	67,48	85%	BAGIAN ORGANISASI SETDA
4.3.2.	Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	Jumlah Risalah rapat/sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan (kali)	379	272	72%	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		Jumlah naskah produk hukum Daerah (kali)	20	19	55%	
4.3.3.	Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel	Persentase pertumbuhan PAD	15%	10,14%	68%	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat	34,99%	34,81%	99%	
		Persentase Belanja modal terhadap total belanja	22,02%	16,48%	75%	
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	90%	76,50%	85%	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	95%	77,50%	82%	
MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA STAKEHOLDER DALAM PROSES PEMBANGUNAN						
Tujuan 5.1. : Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat						
% Jumlah Konflik				0%		
5.1.1.	Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	95%	100%	105%	BADAN KESATUAN BANGSA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		Jumlah demo bersifat sosial (demo)	36	100%	100%	
5.1.2.	Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)	Angka Kriminalitas	12,02%	0,2057%	58%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Penegakan Perda	99,34%	92%	93%	
		Persentase Pelanggaran K3	0,66%	8%	8%	
		Persentase penanganan daerah rawan bencana	70,75%	100%	141%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Korban Bencana (orang)	50	1303000	0,004%	
		Jumlah korban Bencana yang tertangani (orang)	50	1303000	2606000%	
MISI 6 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT						
Tujuan 6.1. : Meningkatkan Penguatan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Pemberdayaan Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga						
Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep				17%		
6.1.1.	Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep	Persentase kesenian lokal yang dikembangkan	12%	17%	142%	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
6.1.2.	Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep	Persentase pemuda yang dibina sehingga berprestasi	10%	0%	0%	
		Persentase prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	25%	29%	116%	



4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

MISI I

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

TUJUAN 1.1.

MENINGKATKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN SERTA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah ini digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, target rata-rata lama sekolah tahun 2017 sebesar 5,42 tahun dan terealisasi 5,22 dengan capaian kinerja 96.30%, sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 6,69 tahun dan untuk realisasinya sampai saat ini berdasarkan keterangan BPS Sumenep belum dirilis sehingga capaian kinerja tahun 2018 belum bisa diukur.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2017 ditargetkan sebesar 13,03 tahun terealisasi sebesar 12,74 dengan capaian kinerja sebesar 97,77%, sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 13,26 tahun dan untuk realisasinya sampai saat ini berdasarkan keterangan BPS Sumenep juga belum dirilis sehingga capaian kinerja tahun 2018 belum dapat diukur.

3. Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun

Target/garapan warga belajar buta huruf tahun 2018 sebanyak 80.06%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 86.04%, capaian kinerja tahun 2018 sebesar 107.47% atau diinterpretasi **Sangat Berhasil**, hal ini didukung oleh ketersediaan sarana belajar di masyarakat oleh pemerintah cukup tinggi dan juga keterlibatan guru-guru SD serta tokoh masyarakat sebagai tutor sangat efektif dan mendukung, didalam penyelenggaraan



KBM pada kelompok belajar masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi tutor sebagai katalisator, motivator dan pembimbing warga belajar. Dukungan pemerintah cukup tinggi juga dalam hal dukungan keuangan untuk pembelajaran KF (keaksaraan Fungsional) Dan dari partisipasi masyarakat terlihat dari antusiasnya untuk mengikuti proses belajar mengajar baik KF (keaksaraan Fungsional) maupun Kesetaraan, adanya semangat dan kesadaran dari warga belajar untuk mengikuti program ini secara keseluruhan dan berkesinambungan cukup tinggi. Disamping itu juga adanya kerja sama dengan Organisasi PKK Pemerintah Kabupaten, serta Darma Wanita dan juga dengan Persit Kartika candra kirana, Bayangkari, Nasyatul Aisyiah, Muslimat NU, Aisyiah, PGRI dan PKBM disetiap kecamatan yang dikelola oleh dinas pendidikan dan yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan di kab. Sumenep, cukup baik dan lancar.

4. Persentase jumlah sekolah terakreditasi

a. Prosentase lembaga SD/MI Terakreditasi Minimal B

Tahun 2018 SD yang berakreditasi Minimal B dari target 90.25%, realisasinya mencapai 83.95% yang mana capaiannya 93.02% atau diinterpretasi **Sangat Berhasil**, Dari semua sekolah SD/MI, yang mana untuk tahun 2017 dengan terealisasi sebesar 53.59% dari target 80.25% dengan capaian 53.59%, hal tersebut sangat signifikan peningkatannya di tunjang dengan kegiatan Sekolah rujukan mutu dan fasilitasi Akreditasi sekolah, Demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter di tingkat SD.

b. Persentase Lembaga SMP/MTs Terakreditasi Minimal B

Tahun 2018 SMP yang berakreditasi Minimal B dari target 81.30%, realisasinya mencapai 79.25% yang mana capaiannya 97.48% atau diinterpretasi **Sangat Berhasil**, Dari semua sekolah SD/MI, yang mana untuk tahun 2017 dengan terealisasi sebesar 33.34% dari target 76.80% dengan capaian jauh tidak sesuai dengan target yang di tetapkan 43.41%, untuk tahun 2018 hal tersebut sangat signifikan peningkatannya ditunjang dengan kegiatan Sekolah rujukan mutu dan fasilitasi Akreditasi sekolah, Demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter di tingkat SMP.



c. Persentase Lembaga SMA/SMK/MA Terakreditasi Minimal B

Bahwa dampak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sejak tahun 2016 Lembaga SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumenep sudah beralih kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi

Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

1. Jumlah kunjungan perpustakaan

Capaian indikator Jumlah Kunjungan perpustakaan ditargetkan 20.500 orang pertahun dengan jumlah realisasi 37.930 orang sehingga capaian yang diperoleh 185,02%. jumlah kunjungan ke perpustakaan terhitung naik dari tahun ketahun menggambarkan keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sumenep dalam meningkatnya minat baca masyarakat dan pelajar, dengan terpenuhinya target jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

2. IKM layanan perpustakaan

Capaian Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan pada tahun 2018 ditargetkan 77,22 dan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan tahun 2018 adalah 76,25 (Baik). Dengan demikian dapat dikatakan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep dengan semua pihak lembaga sekolah dan Desa di kabupaten Sumenep tersebut sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Selain menghasilkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan, juga mendapatkan hasil seperti Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Nilai harapan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan, Nilai gap/kesenjangan antara kenyataan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Keberhasilan pencapaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep berkategori baik karena didukung oleh upaya-upaya peningkatan pelayanan perpustakaan antara lain:



- Peningkatan performance petugas layanan perpustakaan dengan mengikutkan Diklat ataupun Workshop sehingga petugas dapat melayani dan berkomunikasi dengan baik dengan pemustaka
- Pengembangan koleksi perpustakaan baik cetak maupun berbasis informasi Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, memiliki mutu yang baik sebagai bahan bacaan, bervariasi subyeknya dan mengembangkan bahan bacaan dalam bentuk digital.
- Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan

Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan Status/Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep

1. Angka Harapan Hidup

Angka perkiraan usia harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 71,11 tahun dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2018 Angka Harapan Hidup untuk Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 sebesar 70,71 tahun telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 70,32 tahun dengan prosentase capaian sebesar 100,55 %. Hal-hal yang mempengaruhi panjangnya usia harapan hidup masyarakat sumenep adalah pola makan yang benar, penyakit degeneratif atau penyakit turunan, lingkungan tempat tinggal yang sehat, pengelolaan tingkat stres.

- #### 2. Persentase Penduduk yang Dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Prosentase Jumlah penduduk yang diindungi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Tahun 2018 untuk Kabupaten Sumenep sebesar 67 % lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 63%. Dengan capaian kinerja sebesar 106,35%. Kenaikan tersebut dipengaruhi tingginya pengetahuan masyarakat Sumenep tentang pentingnya peran JKN terhadap perlindungan kesehatan, kenaikan pendapatan keluarga, dan akses pada pelayanan kesehatan yang terjangkau.

3. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Jumlah puskesmas yang terakreditasi untuk Tahun 2018 sebanyak 30 Puskesmas dari 30 Puskesmas di Kabupaten Sumenep. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di Puskesmas agar lebih baik sehingga derajat kesehatan masyarakat kabupaten Sumenep akan meningkat.



Prosentase Jumlah puskesmas yang terakreditasi untuk Tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian indikator sebesar 100%.

Sasaran 1.1.4 : Meningkatkan Akseptor Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

1. Rasio Keluarga Berencana Aktif

Dari target kinerja untuk Rasio KB Aktif sebesar 65,07% pada tahun 2018 tercapai 68,27%, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 67,57%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja pada akhir RPJMD sebesar 67,07% maka pada tahun 2018 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 1,20%. Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada indikator kinerja Cakupan Peserta KB Aktif tersebut antara lain :

- a. Mulai berkurang dan berubahnya cara pandang masyarakat yang menganggap banyak anak banyak rejeki
- b. Kepercayaan dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dimana salah satunya adalah tidak melarang Program KB
- c. Peningkatan pola pikir masyarakat tentang kesehatan dan pendidikan anak lebih utama
- d. Fasilitas program KB di lapangan yang telah cukup memadai
- e. Sosialisasi PLKB dan PKB melalui penyuluhan dengan cara pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan kunjungan dari rumah ke rumah
- f. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program Tribina (BKB, BKR, dan BKL)

2. Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk

Untuk angka pertumbuhan penduduk, dari target RPJMD sebesar 0,56 pada tahun 2018 menunjukkan hasil capaian sebesar 0,56. Beberapa hal yang dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan memaksimalkan peran serta masyarakat melalui Kampung KB. Selain itu, peran dari tenaga PPKBD dan Sub PPKBD di Kabupaten Sumenep sangat membantu tercapainya indikator kinerja tersebut.



TUJUAN 1.2. : MENINGKATKAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEBAGAI BENTUK UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN

Sasaran 1.2.1 : Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha

1. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2018 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,19%. Hal ini diperoleh dari realisasi sebesar 74,25% dari jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas sebanyak 640.718 orang dibagi target 74,11% dari jumlah penduduk usia Kerja 15 tahun keatas sebanyak 862.973 orang kali 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2018 mengalami sedikit penurunan secara hal ini dikarenakan :

- Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja
 - Penyebab Kegagalan dari kegiatan tersebut adalah Kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sumenep serta Website dan server dari Kementerian Tenaga Kerja yang sering bermasalah
 - Solusi dari kegagalan tersebut adalah Pembenahan dan perbaikan website dan server dari Kemenaker sehingga penerbitan kartu AK-1 dapat dilakukan secara online, serta Lebih sering mengadakan job canvassing/Job Fair ke perusahaan untuk menggali informasi lowongan kerja

➤ Penyusunan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2018

Penyebab Kegagalan dari kegiatan tersebut adalah Masih adanya perusahaan yang membayar Upah tidak sesuai UMK serta Pengusaha kurang mematuhi terhadap peraturan yang ada Solusi dari kegagalan tersebut adalah Peningkatan sosialisasi Pelaksanaan UMK dan sanksi bagi pelanggarnya

2. Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2018 menghasilkan capaian kinerja sebesar 74,29%. Hal ini diperoleh dari realisasi 0,35% atau 2 kasus



dibagi dengan target sebesar 0,26% kali 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2017, maka mengalami penurunan capaian kinerja dalam artian tingkat keberhasilannya cenderung meningkat dalam menekan angka sengketa antara pengusaha dan pekerja hal ini disebabkan:

- Optimalisasi Kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
Seringnya Melaksanakan study komparasi ke luar daerah untuk menambah wawasan LKS Tripartit
- Pembinaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
Meningkatkan bimbingan dan monitoring pembentukan LKS Bipartit di perusahaan -perusahaan
- Pembinaan Deteksi Dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan
Peningkatan Pembinaan tentang penyebab terjadinya PHK
- Optimalisasi penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja

3. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2018 menghasilkan capaian kinerja sebesar 95,60%. Hal ini diperoleh dari target sebesar 38,86% atau 1335 pencari kerja mendaftar dibagi dengan realisasi sebesar 37,15% atau 496 orang pencari kerja ditempatkan kali 100%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2017, maka mengalami Kenaikan dikarenakan seringnya melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama untuk memberikan motivasi agar para transmigran tidak mengundurkan diri pada kegiatan Pengerahan dan Pemberangkatan Calon Transmigrasi.

4. Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.

Capaian kinerja indikator ini sebesar 180,12% sangat berhasil, dengan formula dari target yang ditetapkan sebesar 4.085 peserta dengan realisasi Peserta yang memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7.358 pada tahun 2018 semakin meningkat didukung dengan dilakukannya sosialisasi



peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan dan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, supaya Pekerja dan Pengusaha dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang sehat dan harmonis, Terciptanya peningkatan produktifitas kerja perusahaan sehingga keberlanjutan perusahaan dapat terjamin, serta terlindungnya dan terjaminnya harkat dan martabat tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja

Sasaran 1.2.2 : Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator ini menggambarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berusaha diturunkan secara kuantitas. Pada tahun 2018 target kinerja untuk indikator jumlah PMKS sebanyak 100.606 orang dengan realisasi berdasarkan hasil pendataan jumlah PMKS pada tahun 2018 sebanyak 243.077 orang sehingga prosentase capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 41,39%.

Tidak tercapainya target tahun 2018 disebabkan selain dengan bertambahnya PMKS baru yang sebelumnya belum terdata, juga disebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin berdasarkan rilis data oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018.

2. Persentase PMKS Yang Ditangani (pemberdayaan PMKS)

Indikator ini menggambarkan prosentase PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 – 2021, target kinerja tahun 2018 untuk indikator prosentase PMKS yang ditangani sebesar 4,20%. Dengan jumlah PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 243.077 orang dan jumlah PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial tahun 2018 sebanyak 64.261 orang yang dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin sebanyak 47 orang



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin sebanyak 30 orang
- Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 64.106 orang (sampai dengan tahap IV tahun 2018)
- Pemberdayaan Keluarga Miskin sebanyak 30 orang
- Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 15 orang
- Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat sebanyak 10 orang
- Rehabilitasi dan Penyantunan eks penyandang penyakit kronis (kusta) sebanyak 23 orang

sehingga prosentase realisasi sebesar 26,44% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 629,52%.

Keberhasilan mencapai target tahun 2018 disebabkan perubahan metode pemberian bantuan sosial yang lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan sosial yang diharapkan mempercepat proses pengentasan PMKS dan terbantu dari penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Solusi atas permasalahan di atas adalah mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mensinergikan program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di beberapa OPD.

Sasaran 1.2.3 : Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender

1. Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak

Pada tahun 2018 target persentase pengaduan kasus KDRT dan Anak sebesar 0,022% dari jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, dan realisasinya sebesar 0,0079% dengan capaian kinerja sebesar 278,48%.

2. Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan

Pada tahun 2018, dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemukan sebanyak 26 kasus, dan jumlah kasus tertangani sebanyak 26 kasus, dengan capaian kinerja 174,28%. Dari tahun ke



tahun, penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan semakin optimal, dengan memaksimalkan satuan tugas P2TP2A di Desa dan Kecamatan.

MISI II

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

TUJUAN 2.1.

MENINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN TRANSPORTASI DI DARATAN DAN WILAYAH KEPULAUAN SEBAGAI BENTUK UPAYA MENURUNKAN DISPARITAS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR ANTAR WILAYAH

Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Irigasi

1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik :

a. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Untuk indikator pertama yaitu Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 71,76% sedangkan realisasinya adalah 80,21% dan Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan memiliki target 51,09% sedangkan realisasinya 54,03% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja yang baik karena realisasinya melebihi dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini Berhasil.

Untuk angka realisasi Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan sehingga memperoleh angka sebesar 80,21% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik diwilayah daratan 902,808 km di bagi dengan jumlah keseluruhan jalan di wilayah daratan sepanjang 1.125.539 km.

Sedangkan angka realisasi Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan sehingga memperoleh angka sebesar 54,03% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik diwilayah kepulauan 138,635 km di bagi dengan jumlah keseluruhan jalan di wilayah kepulauan sepanjang 416,821 km.



Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 maka realisasi 2018 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan terealisasi 77,38% dan untuk Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan terealisasi 53,23%.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik wilayah daratan dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 73,74% dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 111,78%. Untuk wilayah kepulauan dengan target pada akhir masa RPJMD 55,61% dengan capaian kinerja 105,75%.

Indikator ini dapat berhasil dikarenakan adanya dukungan dari Kegiatan Pemeliharaan Jalan yang didanai oleh DAK untuk wilayah daratan dan kepulauan walaupun beberapa kegiatan dilaksanakan pada jalan-jalan desa yang tidak tercantum pada ruas jalan kabupaten sehingga tidak dapat dicatat sebagai penambahan jalan dengan kondisi baik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan antara lain :

- 1) Jumlah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
- 2) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
- 3) Belum maksimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan terutama dana untuk bagian perencanaan dan pengawasan suatu kegiatan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan didukung pula dengan masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.

Solusi untuk penanggulangan kendala-kendala terkait upaya mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui perubahan jumlah pegawai & diklat, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);



- 2) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir;
- 3) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- 4) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Kemudian pada kegiatan Pembangunan Jalan/Pemeliharaan Berkala Jalan baik yang terdapat diwilayah Daratan maupun di Wilayah Kepulauan, untuk wilayah kepulauan terkait hambatan yaitu penyediaan alat ampar yang harus disediakan oleh pelaksana di masing-masing pulau yaitu di Pulau Sepudi tepatnya di Kec. Gayam dan Kec. Nonggunong, Pulau Raas, dan di Pulau Kangean tepatnya di Kec. Arjasa dan Kec. Kangayan. Solusi terkait dengan kendala alat ampar dipulau-pulau tersebut adalah para pelaksana berkoordinasi dan bersepakat untuk mengatur jadwal kerja dimasing-masing pulau dan menjamin tersedianya aspal dingin (CPHMA) sesuai jadwal kerja sehingga dengan demikian semua paket pekerjaan dengan konstruksi CPHMA (Aspal Dingin) di Wilayah Kepulauan dapat terselesaikan pada waktunya.

b. Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)

Untuk indikator kedua yaitu Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 87,56% sedangkan realisasinya 97,73% dan untuk Wilayah Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Kepulauan targetnya adalah 82,86% dan realisasinya 86,11% hal ini juga menunjukkan sebuah hasil kinerja yang baik karena realisasinya melebihi dari target yang telah ditentukan dan indikator ini termasuk Berhasil.

Untuk angka realisasi Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan sehingga memperoleh angka sebesar 97,73% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah jembatan



dalam kondisi baik diwilayah daratan 215 buah di bagi dengan jumlah keseluruhan jumlah jembatan di wilayah daratan sebanyak 220 buah. Sedangkan untuk angka realisasi Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan sehingga memperoleh angka sebesar 86,11% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah jembatan dalam kondisi baik diwilayah kepulauan 31 buah dibagi dengan jumlah keseluruhan jumlah jembatan di wilayah kepulauan sebanyak 36 buah.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 maka realisasi 2018 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan terealisasi 98,67% dan untuk Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan terealisasi 90,91%.

Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi baik wilayah daratan dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 89,66% Dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 111,61%. Untuk wilayah kepulauan dengan target pada akhir masa RPJMD 84,21% dengan capaian kinerja 103,92%.

Indikator ini sangat berhasil dikarenakan pada dasarnya jembatan-jembatan yang ada baik didaratan maupun kepulauan sudah ter atasi dengan baik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan antara lain :

- 1) Jumlah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
- 2) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
- 3) Belum maksimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan terutama dana untuk bagian perencanaan dan pengawasan suatu kegiatan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan didukung pula dengan masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.



Solusi untuk penanggulangan kendala-kendala terkait upaya mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui perubahan jumlah pegawai & diklat, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);
- 2) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir;
- 3) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- 4) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

c. Daerah Irigasi yang dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis

Peningkatan rasio kecukupan irigasi akan berbanding lurus dengan luas irigasi kabupaten yang dapat diairi dengan irigasi teknis. Dengan peningkatan rasio menjadi 74,82 (Daratan) dan 53,79% (Kepulauan) membuat Luas daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis pada tahun 2018 juga naik dari 6.525 Ha menjadi 6.533 Ha (daratan) dan untuk kepulauan tetap terjaga seluas 353 Ha.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator panjang saluran irigasi dalam kondisi baik ini adalah sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana Irigasi
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
- Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan Infrastruktur Pengairan
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kecil /Pedesaan
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi dan Pintu Air
- Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah dan Rumah Pompa

d. Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi



Rasio Kecukupan irigasi di Daratan pada Tahun 2018 mencapai 74,82% dari target 74,62% sehingga pencapaian kinerja sebesar 100,27%. Adapun realisasi pembangunan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 di daratan yaitu :

- Saluran Primer : 202,60 m
- Saluran Sekunder : 464,32 m
- Saluran Tersier : 6961,81 m

Adapun untuk Rasio Kecukupan irigasi di Kepulauan pada Tahun 2018 mencapai 53,79% dari target 60,09% sehingga pencapaian kinerja sebesar 89,52%. Adapun realisasi pembangunan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 di Kepulauan yaitu :

- Saluran Primer : - m
- Saluran Sekunder : - m
- Saluran Tersier : 610,10 m

Adapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator panjang saluran irigasi dalam kondisi baik ini adalah sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana Irigasi
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
- Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan Infrastruktur Pengairan
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kecil /Pedesaan
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi dan Pintu Air
- Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah dan Rumah Pompa

Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi

1. Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Persentase korban kecelakaan lalu lintas merupakan perbandingan antara jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi terhadap jumlah kendaraan bermotor. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2018 adalah 181 kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat adalah 196.456 unit sehingga didapat realisasi sebesar 0,0921%. Sedangkan target pada



tahun 2018 sebesar 0,0764% sehingga tingkat capaiannya sebesar 82,95%.

Persentase korban kecelakaan lalu lintas dapat diturunkan dari tahun 2017 namun masih belum dapat diturunkan dari tahun 2016. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 0,1051% dan tahun 2016 sebesar 0,0784%.

Di samping itu, persentase korban kecelakaan lalu lintas masih mencapai 0,808% dari target akhir periode Renstra, dimana target akhir periode Renstra (Tahun 2020) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep sebesar 0,0744%.

Alternatif solusi untuk menurunkan tingkat kecelakaan perlu adanya kegiatan kampanye tertib lalu lintas bagi masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan akan pentingnya keselamatan berlalu lintas serta perbaikan fasilitas keselamatan (rambu, apil, marka, dll).

2. Persentase Kecukupan Angkutan Umum Yang Layak

Persentase kecukupan angkutan umum yang layak merupakan perbandingan antara jumlah angkutan umum yang lulus uji kelayakan terhadap jumlah angkutan umum yang wajib uji kelayakan. Dimana jumlah angkutan umum yang lulus uji kelayakan adalah 6682 unit dan jumlah angkutan umum wajib uji kelayakan adalah 6956 unit sehingga didapat realisasi 96,06%. Sedangkan target pada tahun 2018 sebesar 83,75% sehingga tingkat capaiannya sebesar 114,70%.

Indikator persentase kecukupan angkutan umum yang layak sudah dapat ditingkatkan dari tahun 2016 dan 2017. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 88,29% dan tahun 2016 sebesar 88,86%. Persentase kecukupan angkutan umum yang layak sudah mencapai 1,115% dari target akhir periode Renstra, dimana target akhir periode Renstra (tahun 2020) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep sebesar 86,15%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah tinggi akan pentingnya uji kelaikan terhadap keselamatan berkendara.

Sasaran 2.1.3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman/
Perumahan Secara Memadai

Indeks Kota Layak Huni :



1. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 100% mengalami tingkat kemajuan sebesar 18,72%. Capaian ini didukung melalui kegiatan Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.

2. Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih

Rumah tangga pengguna air bersih jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 100% mengalami tingkat kemajuan sebesar 18,72%. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.

3. Persentase rumah layak huni

Persentase rumah layak huni jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 26% mengalami tingkat kemajuan sebesar 3%. Dengan dukungan kegiatan : Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni.

4. Persentase Lingkungan pemukiman kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 0% mengalami tingkat kemajuan sebesar 95%. Dengan didukung Kegiatan antara lain : 1) Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan (Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU), 2) Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS).

5. Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kota, Kalianget dan Batuan)

Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kota, Kalianget dan Batuan) pada tahun 2018 ditarget sebesar 68% dan terealisasi sebesar 71% dengan capaian 104%. Tercapainya indikator ini didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat terhadap kesehatan.

6. Persentase tersedianya Luasan RTH Publik

Persentase tersedianya luasan RTH publik jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 42% mengalami tingkat kemajuan



sebesar 10,07%. Hal tersebut disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumenep khususnya di Kawasan Perkotaan, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

TUJUAN 2.2.: MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan

1. Indeks Kualitas Air Sungai

Indeks Kualitas Air tahun 2018 adalah 52,22, nilai ini masih di bawah dari target yang ditetapkan yaitu 66,67, sehingga pencapaian kinerja sebesar 78,33%. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 3 sungai (Patrean, Sarokah dan Marengan), masing-masing 2 titik lokasi (hulu dan hilir) dan frekuensi pemantaun dilakukan sebanyak 3 kali periode. Total sampel yang diujikan sebanyak 18 sampel, selanjutnya hasil uji laboratorium tersebut dianalisis untuk mengetahui status mutu air sungai dengan hasil sebagai berikut :

- Status mutu air memenuhi sebanyak 4 sampel
- Status mutu air tercemar ringan sebanyak 12 sampel
- Status mutu air tercemar sedang sebanyak 2 sampel

Dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa parameter BOD, Fecal Coli dan Total Coliform masih tinggi. Hal ini disebabkan dari aktivitas masyarakat membuang air limbah domestik. secara langsung ke badan air/sungai tanpa melalui proses pengolahan. Selain itu terdapat aktivitas pertanian dan peternakan juga terindikasi berkontribusi terhadap tingginya beberapa parameter tersebut.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara Tahun 2018 adalah 87,27 melebihi dari target kinerja yang ditetapkan 76,06 dengan capaian pencapaian kinerja sebesar 114,74%. Pengujian kualitas udara dilakukan dengan metode Passive Sampler pada 4 titik lokasi pengukuran yaitu lokasi permukiman (Perum Bumi Sumekar Asri), lokasi transportasi (Jalan Trunojoyo), lokasi



perkantoran (Kantor Bupati Sumenep) dan lokasi industri (PT. Tanjung Odi). Dari hasil pengukuran parameter kualitas udara dihasilkan nilai kualitas yang berada di bawah baku mutu, sehingga kualitas udara masih tergolong baik. Pencapaian target pada tahun 2018 disebabkan oleh masih banyaknya penanaman pohon-pohon peneduh sebagai penyerap polutan udara/emisi baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.

3. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan Tahun 2018 adalah 73,91 masih kurang dari target kinerja yang ditetapkan 74,98 dengan capaian kinerja sebesar 98,57%. Pencapaian target pada tahun 2018 dilakukan dengan melakukan penambahan luas areal tutupan lahan dengan penanaman pohon yang berfungsi sebagai tutupan vegetasi yaitu pohon keras di sepadan sungai, pinggir/bahu/turus jalan dan areal lahan kritis dengan luasan 539,5 Ha. Tidak tercapainya target ini disebabkan masih kurangnya penambahan luas area tutupan vegetasi yang dalam hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. Perlu adanya kerjasama dengan stakeholder terkait dalam menginventarisasi data dan penanaman sebagai penambahan tutupan vegetasi.

4. Jumlah Industri/Perusahaan/ Badan Usaha Yang Melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)

Jumlah Industri/Perusahaan/ Badan Usaha Yang Melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) sampai dengan tahun 2018 terealisasi sebanyak 729 badan usaha/kegiatan dari target sebanyak 572 usaha/kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 127%. Pencapaian kinerja ini dilakukan dengan ketepatan dan kecepatan pelayanan penilaian dokumen lingkungan.

Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup

1. Rasio Elektrifikasi

Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kelistrikan ini untuk mencapai indikator diperoleh rata-rata pencapaian sebesar 99,88%, pencapaian ini didasarkan pada target lokasi yang dijadikan sasaran kegiatan untuk mendapatkan listrik diantaranya pembangunan Jaringan Listrik, Desa Billapora Barat Kecamatan



Ganding, Desa Kangayan Kecamatan Kangayan, Desa Sonok Kecamatan Nonggunong, Desa Bekiyong Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Lombang Kecamatan Giligenting, Desa Banbaru Kecamatan Giligenting, Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting dan Desa Jate Kecamatan Giligenting, sehingga diperoleh hasil tingkat capaian sasaran adalah baik, bertambahnya desa yang mendapatkan listrik didukung kegiatan antara lain Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan.

2. Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan

Meningkatnya Pembinaan dan Penguatan Informasi dan Data Base Energi Baru Terbarukan Kebutuhan energi yang selalu berkembang, sedangkan ketersediaan energi yang terbatas harus disikapi dengan pengembangan sumber daya energi alternatif. Pemanfaatan energi baru terbarukan mendukung penghematan energi dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Kabupaten Sumenep sebagai sentra pengembangan sapi dan populasinya sangat banyak berpotensi untuk pemanfaatan produksi ilimbahnya. Limbah atau kotoran sapi dapat diolah menjadi biogas dan substitusi LPG untuk masyarakat perdesaan dan kepulauan. Masyarakat harus diberdayakan melalui pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkan kotoran sapi dan pembangunan biogas. Kegiatan tersebut adalah melaksanakan pendataan serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang tingkat capaian kehadirannya 100% sehingga kegiatan tersebut Berhasil.

MISI III

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI

TUJUAN 3.1

MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI, KUALITAS KELEMBAGAAN UMKM KOPERASI DAN PENGEMBANGAN WISATA DAERAH SERTA MENINGKATKAN KINERJA PENANAMAN MODAL/INVESTASI DAERAH, INDUSTRI PERDAGANGAN

Sasaran 3.1.1 : Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM

1. Persentase Koperasi Sehat



Indikator ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten dalam membina, mengembangkan dan meningkatkan Koperasi. Persentase Koperasi sehat pada tahun 2018 sebanyak 95 atau 7,49% dari jumlah Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam(KSP/USP) yang aktif di kabupaten Sumenep sebanyak 1.268 sedangkan target Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang sehat mencapai 2,96%. Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) sehat meningkat dikarenakan adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan Koperasi dalam mengelola Koperasi khususnya KSP/USP. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan RAT dan RAPB bagi Koperasi, Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengawasan bagi Koperasi Wanita, Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, Pemberdayaan Usaha Koperasi.

2. Persentase Pertumbuhan UMKM

Indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2018 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan target 18% dan teralisasi 4,5%, menurunnya target pada tahun 2018 dikarenakan kesalahan Rencana target RPJMD yang terlalu tinggi. Kegiatan yang di laksanakan Pelatihan Singkat (short course) Melalui Klinik Koperasi Dan UKM, Mencetak Wirausaha Muda, Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat, Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Kegiatan – kegiatan tersebut sangat berdampak baik pada pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep.

Sasaran 3.1.2 : Meningkatkan Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata

1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Indikator prosentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD realisasinya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 19% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1,87% dengan capaian kinerja sebesar 12,47% diperoleh dari realisasi sektor pariwisata



sebesar Rp. 3.461.067.119,- dibagi realisasi pendapatan Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 185.072.699.153,-.

2. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan

Indikator prosentase jumlah kunjungan wisatawan mengalami keberhasilan dimana ditargetkan terjadi penambahan prosentase jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9% dari target, terealisasi sebesar 46%. Hal ini disebabkan penambahan dari perkiraan jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata baru semula ada 22 lokasi menjadi 25 lokasi ditambah adanya even even Tahun Kunjungan Wisata Kab. Sumenep Tahun 2018.

Sasaran 3.1.3 : Meningkatkan Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)

1. Jumlah Nilai PMDN Tahun Berkenaan

Pencapaian kinerja “Jumlah nilai investasi PMDN” mencapai 306,51%, hal ini dikategorikan Sangat Berhasil karena melebihi target pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

Pencapaian kinerja ini disebabkan karena :

- 1) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik,
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat akan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan semakin tinggi,
- 3) Tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Kabupaten Sumenep semakin tinggi,
- 4) Adanya komitmen yang tinggi pada pemangku kebijakan untuk menerapkan kepastian hukum yang akuntabel,
- 5) Kesadaran masyarakat guna membangun daerahnya semakin tinggi dengan aktif memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Jumlah Nilai Investasi Asing (PMA)

Pencapaian kinerja “nilai investasi PMA” mencapai 0,00%, dengan interpretasi Kurang Berhasil karena terbentur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, pada



Bagian Kedua “Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Pusat”, Pasal 6 ayat (1) huruf (b) angka (5) yang menyatakan “Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain, sehingga kewenangan pemberian izin dan fasilitas penanaman modal merupakan kewenangan BKPM RI bukan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Indikator kinerja ini akan dihapus pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 yang akan berlaku efektif pada tahun 2019.

3. Jumlah Investor

Pencapaian kinerja “Jumlah investor” sebesar 45,68% atau sebanyak 2.577 investor dari target 5.642 investor. Pencapaian kinerja ini dikategorikan Kurang Berhasil, kurang dari target yang telah ditentukan, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang lebih konkrit lagi, yaitu

- 1) Mengembangkan software perizinan yang telah ada.
- 2) Penambahan waktu pelaksanaan penyuluhan dan pengendalian.
- 3) Lebih maksimal dalam mengumpulkan data potensi investasi secara analisa akademik.

Sasaran 3.1.4 : Meningkatkan Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar

1. Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep dibidang industri pengolahan dari tahun 2013-2017 cenderung naik, sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan keterangan BPS Kabupaten Sumenep belum dirilis. Adapun PDRB di Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
PDRB Industri Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No.	Uraian	(Milyar Rupiah)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018



No.	Uraian	(Milyar Rupiah)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Industri Pengolahan	1.061,8	1.200,4	1.337,8	1.471,3	1.619,8	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sumenep, 2018

Perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2017 relatif meningkat jumlahnya, yaitu sebesar 1.061,8 Milyar Rupiah pada Tahun 2013 dan mencapai sebanyak 1.619,8 Milyar Rupiah pada Tahun 2017 naik sebesar 10,09% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai sebanyak 1.471,3 Milyar Rupiah.

2. Persentase Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep dibidang perdagangan dari tahun 2013-2017 cenderung naik, sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan keterangan BPS Kabupaten Sumenep belum dirilis. Adapun PDRB di Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
PDRB Perdagangan Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

No.	Uraian	(Milyar Rupiah)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perdagangan Besar dan Eceran	2.296,0	2.516,1	2.821,7	3.177,5	3.508,0	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sumenep, 2018

Perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2017 relatif meningkat jumlahnya, yaitu sebesar 2.296,0 Milyar Rupiah pada Tahun 2013 dan mencapai sebanyak 3.508,0 Milyar Rupiah pada Tahun 2017 naik sebesar 10,40% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai sebanyak 3.177,5 Milyar Rupiah.

TUJUAN 3.2.

MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI, KUALITAS KELEMBAGAAN UMKM KOPERASI DAN PENGEMBANGAN WISATA DAERAH SERTA MENINGKATKAN KINERJA PENANAMAN MODAL/INVESTASI DAERAH,



INDUSTRI PERDAGANGAN

Sasaran 3.2.1 : Meningkatkan Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)

1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan :

Berdasar tabel diatas dapat digambarkan capaian kinerja untuk produksi padi ditargetkan sebesar 227.638ton dan dicapai 199.352,17 ton (87,57%), Jagung ditargetkan sebesar 432.014 ton dicapai 403.482,50ton (93,40%), Untuk tahun ini , produksi Kedelai mencapai angka yang cukup fantastis, ini luar biasa melampaui target yang ditetapkan sebesar 7.553ton dicapai 22.876,89ton (302,87%) dan Ubi kayu ditargetkan sebesar 105.670ton dicapai sebesar 25.575,53ton (24,20%).

2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan :

Berdasar tabel diatas dapat digambarkan capaian kinerja untuk produksi Kelapa ditargetkan sebesar 42.643 ton dan dicapai 43.968,38 ton (103,11%), Tembakau ditargetkan sebesar 9.245 ton dicapai 8.171,10ton (88,39%), Cabe Jamu ditargetkan sebesar 9.866 ton dicapai 10.198,29 ton (103,37%) , Jambu Mete ditargetkan sebesar 4.975 ton dicapai 5.247,78 ton (105,48%) dan Siwalan ditargetkan sebesar 776 ton dicapai sebesar 749,33 ton (96,53%).

3. Persentase Jumlah Produksi Hasil Ternak :

a. Sapi Potong

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak sapi potong di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 363.824 ekor sapi potong dengan realisasi sebesar 367.382 ekor sapi potong dengan capaian realisasi kinerja 100,98%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya banyak faktor salah satunya karena Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berhasil dalam menjaga kestabilan populasi ternak sapi potong atau dapat meningkatkan populasi sapi potong. Hal ini merupakan suatu keberhasilan kinerja.



b. Kerbau

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak kerbau di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 5.119 ekor kerbau dengan realisasi sebesar 5.071 ekor kerbau dengan capaian realisasi kinerja 99,06%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan tidak tercapai. Faktor tidak tercapainya target realisasi populasi ternak kerbau karena tingkat kelahiran yang rendah dan adanya penjualan ke luar daerah.

c. Kuda

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak kuda di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 2.183 ekor kuda dengan realisasi sebesar 2.167 ekor kuda dengan capaian realisasi kinerja 99,27%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan tidak tercapai. Faktor tidak tercapainya target realisasi populasi ternak Kuda karena tingkat kelahiran yang rendah dan adanya penjualan ke luar daerah.

d. Kambing

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak kambing di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 150.924 ekor kambing dengan realisasi sebesar 153.378 ekor kambing dengan capaian realisasi kinerja 101,63%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya banyak faktor salah satunya karena Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mampu memberikan penyuluhan, pendampingan kepada peternak kambing sehingga dapat meningkatkan populasi kambing.

e. Domba

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak domba di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 38.993 ekor domba dengan realisasi sebesar 39.650 ekor domba dengan capaian realisasi kinerja 101,68%. Hal ini merupakan



peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mampu mendukung peternak untuk terus berkarya, berprestasi dalam mengkreasikan ternaknya, karena domba merupakan salah satu ternak yang ikut kontes ternak sehingga populasi domba dapat terus ditingkatkan.

f. Ayam Buras

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak ayam buras di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 782.582 ekor ayam buras dengan realisasi sebesar 787.853 ekor ayam buras dengan capaian realisasi kinerja 100,67%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ayam buras dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena peternak juga dapat melawan wabah penyakit hewan menular dengan melakukan pengobatan dan pencegahan, pakan ternak yang terjaga ketersediaannya dan semua ini tidak lain merupakan peran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep.

g. Ayam Petelur

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ayam ras petelur di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 324.522 ekor ayam ras petelur dengan realisasi sebesar 326.760 ekor ayam ras petelur dengan capaian realisasi kinerja 100,69%. Capaian ini merupakan peningkatan populasi ayam ras petelur dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena peternak juga dapat melawan wabah penyakit hewan menular dengan melakukan pengobatan dan pencegahan, pakan ternak yang terjaga ketersediaannya dan semua ini tidak lain merupakan peran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep sehingga mencapai keberhasilan.

h. Ayam Pedaging

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ayam pedaging di Kabupaten Sumenep dari target



sebesar 116.581 ekor ayam pedaging dengan realisasi sebesar 145.485 ekor ayam pedaging dengan capaian realisasi kinerja 124,79%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan populasi ayam ras pedaging dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena peternak juga dapat melawan wabah penyakit hewan menular dengan melakukan pengobatan dan pencegahan, pakan ternak yang terjaga ketersediaannya dan peternak dapat menjaga kestabilan pendapatannya Hal ini merupakan peran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep sehingga mencapai keberhasilan.

i. Itik

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi itik di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 56.448 ekor itik dengan realisasi sebesar 57.244 ekor itik dengan capaian realisasi kinerja 101,41%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan populasi itik dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya dari berbagai faktor yang saling terkait antara leading sektor dan keterkaitan ini saling bekerjasama antara satu dan lainnya sehingga akan menumbuhkan suatu keberhasilan.

j. Mentok

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi mentok di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 12.382 ekor mentok dengan realisasi sebesar 12.529 ekor Mentok dengan capaian realisasi kinerja 101,19%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan populasi mentok dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya dari berbagai faktor yang saling terkait antara leading sector dan keterkaitan ini saling bekerjasama antara satu dan lainnya sehingga akan menumbuhkan suatu keberhasilan.

4. Peningkatan Produksi Peternakan :

a. Daging

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan produksi ternak yaitu daging di Kabupaten



Sumenep dari target sebesar 4.474.256 kg produksi daging dengan realisasi sebesar 4.629.704 kg produksi daging dengan capaian realisasi kinerja 103,47%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan produksi bahan asal ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena adanya suatu usaha yang baik dan kerjasama yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan peternak dari bantuan modal usaha, penyuluhan, pembinaan usaha peternakan dan pengobatan ternak. Dan hal ini merupakan suatu keberhasilan.

b. Telur

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan produksi ternak yaitu telur di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 2.761.838 kg produksi telur dengan realisasi sebesar 3.298.745 kg produksi telur dengan capaian realisasi kinerja 119,44%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan produksi bahan asal ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena adanya suatu usaha yang baik dan kerjasama yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan peternak dari bantuan modal usaha, penyuluhan, pembinaan usaha peternakan dan pengobatan ternak. Dan hal ini merupakan suatu keberhasilan.

5. Jumlah produksi hasil perkebunan (ton) :

Sasaran 3.2.2 : Meningkatkan Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan

1. Produksi Perikanan :

a. Hasil Perikanan Tangkap

Program kegiatan pendukung untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain yaitu Fasilitasi Teknis dan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat Pesisir, Peningkatan Prasarana Penangkapan Ikan, Pelatihan Pengoperasionalan dan Pengadaan Alat bantu Penangkapan Ikan, Pengadaan Sarana



Penangkapan Rajungan, Pengadaan Paket Jaring Milenium, Pengadaan Paket Penangkapan Ikan Kakap, Pengadaan Paket Penangkapan Gurita, Penebaran Ikan di Perairan Umum, Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan, yang pada umumnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumenep dan dana DAK.

b. Hasil Perikanan Budidaya

Capaian kinerja tidak mencapai target optimal dimana produksi perikanan budidaya terdiri dari budidaya ikan dan budidaya non-ikan/rumput laut. Dari kedua komoditi tersebut, yang dominan adalah rumput laut dari target 2018 sebesar 647.294 ton terealisasi sebesar 661.771,52 ton (102,24%). Keberhasilan ini tercapai berkat semakin intensifnya penyuluhan dan pendampingan serta didukung dengan penyaluran sarana dan prasarana budidaya perikanan yang memadai.

2. Persentase Jumlah Pertumbuhan Tingkat Konsumsi Ikan

Jumlah konsumsi ikan perkapita pada saat dokumen ini disusun belum ada data Konsumsi Ikan yang di terbitkan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur. Adapun rumus perhitungan yang dipakai di dalam menghitung jumlah konsumsi ikan perkapita per tahun adalah sebagai berikut.

$$\text{Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)} = A + B + C$$

Keterangan :

- A = Hasil Sensus Nasional untuk Kabupaten Sumenep (36,57 Kg);
- B = Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga (15% dari A);
- C = Konsumsi Ikan yang Tidak Tercatat (17% dari A + B).

$$\begin{aligned} \text{Jadi, Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)} &= 36,57 + 5,48 + 7,15 \\ &= 49,20 \text{ Kg/Kap/Tahun} \end{aligned}$$

Sasaran 3.2.3 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

1. Persentase Kualitas Gizi Pangan Daerah

Perkembangan kualitas gizi pangan daerah di Kabupaten Sumenep yang dapat dilihat dari nilai target Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan



sebesar 80% dengan realisasi 70,67% hasil perhitungan PPH ketersediaan. Hal ini berarti tidak mencapai target kualitas gizi pangan daerah di Kabupaten Sumenep yang disebabkan ketetapan Angka Kecukupan Gizi (AKG) menurut Widiakarya Pangan Nasional dan Gizi (WNPG) ke-X Tahun 2012 yang sebelumnya 2.200 kkal/kapita/hari menjadi 2.400 kkal/kapita/hari.

2. Persentase Daerah Rawan Gizi

Kualitas daerah rawan gizi di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 12% terealisasi 57,49% dengan capaian 20,87%. Penyebab rendahnya tercapaian target kualitas daerah rawan gizi karena adanya perubahan indikator FSVA, berdasarkan analisa FSVA di Sumenep terdapat 191 desa yang sangat rawan dari total 334 desa.

MISI IV

MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

TUJUAN 4.1.

MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sasaran 4.1.1 : Meningkatkan Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat

1. Persentase Usulan Desa dan Kecamatan Yang Terakomodir di Dokumen Perencanaan.

Indikator ini menunjukkan keberhasilan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 mencapai 30% dari target 2018 sebesar 26% atau mencapai 115,38%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa dari keseluruhan usulan desa sampai dengan kecamatan yang diusulkan melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) sebanyak 30% usulan yang diakomodir di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.

Pada indikator ini Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan persentase usulan musrenbang yang dihasilkan di dalam musrenbang desa sampai dengan kecamatan untuk diakomodir ke dalam dokumen perencanaan



terutamanya pada dokumen RKPD tahun 2018, ini menandakan bahwa Pemerintah daerah semakin konsisten dalam proses perencanaan pembangunan dengan memperhatikan asas partisipatif didalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai pedoman didalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran 4.1.2 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan

1. Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelaraskan antara dokumen perencanaan sampai dengan dokumen perencanaan penganggaran yaitu mulai dari Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD sampai dengan dokumen perencanaan penganggaran dalam hal ini dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun capaian target indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan mencapai 78 % dari target sebesar 65 % pada tahun 2018 atau mencapai 120 %.

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep didalam meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan baik itu dokumen perencanaan sampai pada dokumen penganggaran, mulai dari dokumen RPJMD sampai dengan dokumen APBD. Keberhasilan ini tak lepas dari semakin optimalnya peran BAPPEDA Kabupaten Sumenep didalam melakukan verifikasi maupun koordinasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Sasaran 4.1.3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

1. Jumlah Desa Sejahtera

Untuk mewujudkan desa sejahtera, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 6 tentang Desa atau sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat desa-lah yang lebih tau apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.



Program-program desa harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat rencana kegiatan dan penggunaan atau RKP Desa.

Pelaksanaan Desa Sejahtera di Kabupaten Sumenep meliputi 4 aspek utama diantaranya :

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan)
- (2) Pemenuhan / pembangunan sarana dan prasarana
- (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Tahun 2018 indikator Desa Sejahtera pada 81 Desa belum terlaksana sejalan dengan perubahan RPJM Kabupaten Sumenep sehingga konsep tersebut belum bisa terlaksana, Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 yaitu 81 Desa, Capaian Kinerjanya tidak dapat terukur.

2. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi

Indikator kinerja sasaran Desa yang tertib Administrasi difokuskan kepada desa yang menyampaikan Laporan (RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LPD). Pada tahun 2018 dari desa yang ada di kabupaten Sumenep (330 Desa) hanya 60% desa yang melakukan Administrasi secara tertib dan Akuntabel. Tidak tercapainya capaian kinerja tersebut dikarenakan desa (Aparatur Desa) masih memiliki keterbatasan SDM.

Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2018 maka capaian kinerjanya adalah 60% atau dengan predikat sedang.

TUJUAN 4.2.

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sasaran 4.2.1 : Meningkatkan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

1. Jumlah Pengunjung Terhadap Website Instansi Pemerintah Daerah



Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan Jumlah Pengunjung Website daerah guna meningkatkan informasi pelayanan publik dari tahun 2017 mencapai 21.000 orang pengunjung sedangkan pada tahun 2018 jumlah pengunjung website daerah mencapai 75.000 orang dari target 3.287 orang atau capaiannya sebesar 2281,75% ada peningkatan sangat tajam dari tahun yang lalu dengan nilai (sangat berhasil).

Sasaran 4.2.2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan

1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas/Telah Menikah Memiliki E-KTP

Pada tahun 2018 Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP sebesar 82,470% dari target 91% sehingga pencapaian kinerja sebesar 90,63%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

TUJUAN 4.3 MEWUJUDKAN KULTUR DAN TATA PEMERINTAHAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL

Sasaran 4.3.1 : Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih dan Akuntabel

1. Persentase Penempatan ASN Yang Sesuai Dengan Kompetensi

Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi pada tahun 2018 target 85% dan terialisasi 91% atau capaian kinerjanya 107,06% atau pada katagori (Sangat Baik) yang terdiri dari Jumlah Pejabat Struktural yang sesuai persyaratan Kepangkatan ditetapkan target 886 Orang dan terialisasi 805 Orang atau capaian kinerjanya 91% atau pada kategori (BAIK).



2. Persentase Jumlah Aparatur Sesuai Dengan Kebutuhan Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep

Persentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2018 target 91% dan teralisasi 97% atau capaian kinerjanya 106,59% atau pada katagori (Sangat Baik) yang terdiri dari Jumlah Jabatan Terisi sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ditetapkan 910 Orang dan teralisasi 886 Orang atau capaian kinerjanya 97% atau pada kategori (BAIK).

Tercapainya indikator tersebut sangat tergantung pada jumlah jabatan yang ada di Lingkungan Kabupaten Sumenep dengan rincian :

Tahun	Jabatan	Target	Keterangan
2015	1.505	86%	Jabatan terisi 1.301
2016	1.483	87%	Jabatan terisi 1.182
2017	1.260	89%	Jabatan terisi 1.078
2018	910	91%	Jabatan terisi 886

Pada tahun 2015 sebanyak 1.505 jabatan dan Pada Tahun 2016 Jumlah Jabatan yang ada 1.483 Pada tahun 2017 jumlah jabatan yang ada 1.260 Pada Tahun 2018 Jumlah Jabatan yang ada sebanyak 910 jabatan perubahan tersbut berdampak positif bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

BKPSDM sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengelola manajemen kepegawaian senantiasa berupaya untuk dapat memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan, termasuk menyediakan alat ukur yang memiliki kredibilitas tinggi serta diakui oleh para pemangku kepentingan terkait. Alat ukur ini disebut Indeks Profesionalitas ASN yang menggabungkan setidaknya delapan instrumen dasar pengukuran manajemen kepegawaian. Harapan dari hasil pengukuran akan menjadi dasar bagi para pengambil keputusan guna menyusun rencana perubahan dan intervensi di bidang kepegawaian. Harapannya hal itu akan menaikkan nilai indeks profesionalitas ASN sehingga menjadi lebih baik.



Indeks profesionalitas aparatur merupakan fungsi dari kesesuaian antara kompetensi jabatan dan jabatan yang disyaratkan ditambah dengan kinerja pejabat yang bersangkutan ditambah dengan kompensasi dikurangi pelanggaran disiplin. Indeks profesionalitas ini merupakan sebuah upaya pendekatan dalam mengukur tingkat profesionalitas yang merupakan indikator outcome pengelolaan ASN.

3. Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN

Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin PNS pada tahun 2018 target 0,20% dan teralisasi 0,15% atau capaian kinerjanya 133% atau pada katagori (Sangat Berhasil) yang terdiri dari 14 Kasus Pelanggaran disiplin PNS dengan rincian sebagai berikut :

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	JML	KETERANGAN
Hukuman Disiplin Ringan	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	5	Tidak melaksanakan tugas dinas tanpa keterangan (5 Kasus)
Hukuman Disiplin Berat	9	Tindak Pidana Narkoba (1 Kasus) Tindak Pidana Umum (3 Kasus) Perselingkuhan/Kawin sirri (2 Kasus) Tidak melaksanakan tugas dinas tanpa keterangan (3 Kasus)

4. Nilai Rangking LPPD se-Jawa Timur

Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), belum dapat dihitung karena masih menunggu hasil rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

5. Nilai Rangking SAKIP se-Jawa Timur

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2018 memperoleh nilai 67,48 predikat “B” dengan capaian indikator sasaran sebesar 96,40% dari target nilai 70. Peningkatan capaian target ini disebabkan karena melakukan upaya penguatan akuntabilitas kinerja karena ada upaya serius dan nyata menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja.

Sasaran 4.3.2 : Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif

1. Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD Yang Dihasilkan



Jumlah Risalah Rapat Paripurna yang dihasilkan pada tahun 2018 sebanyak 272 kali dengan capaian 150,28% dari target 181 kali. Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna serta Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi I, II, III dan IV, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi, Panitia Khusus dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) sebanyak 360 kali.

2. Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah

Jumlah Naskah Produk Hukum pada tahun 2018 sebanyak 11 naskah dengan capaian 47,83% dari target 23%. Naskah Produk Hukum terdiri dari Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sumenep, Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelestarian Seni dan Budaya, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017, PAK APBD TA. 2018, APBD TA. 2019.

Faktor yang juga menunjang keberhasilan kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif antara lain :

1. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran serta tersedianya anggaran yang cukup memadai;
2. Adanya struktur organisasi Sekretariat DPRD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan kebutuhan DPRD, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada DPRD;
3. Tersedianya kebutuhan literatur yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang ada sebagai landasan dalam pelaksanaan standarisasi pelayanan kepada DPRD;
4. Terjalinnnya hubungan komunikasi yang harmonis antara Sekeratriat DPRD dengan DPRD;
5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tersusun dengan baik pada masing-masing bagian.



Sasaran 4.3.3 : Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel

1. Persentase Pertumbuhan PAD

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 sebesar 10,14% dari pendapatan daerah dengan target sebesar 15%. Adapun capaiannya sebesar 67,60%. Penunjang PAD adalah dari sektor pariwisata dengan adanya visit Sumenep, pajak, pengeloan kekayaan daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.

2. Persentase luas Aset Tanah Pemda yang Bersertifikat

Persentase luas Aset Tanah Pemda yang Bersertifikat pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 34,87% dan realisasinya sebesar 34,81%, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 99,83%. Capaian kinerja ini sangat tinggi karena didukung dengan anggaran yang ada serta kecekatan aparatur dalam upaya sertifikasi aset pemerintah daerah.

3. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja pada tahun 2018 sebesar 16,48% yaitu sebesar Rp. 349.996.582.783,81 dari total belanja daerah sebesar Rp. 2.124.262.596.250,24 sebelum sikronisasi.

4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK dan APIP

Berkaitan indikator kinerja Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

- Walaupun Penyelesaian tindak lanjut secara bertahap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan masih dipersepsikan oleh OPD belum merupakan suatu kewajiban. Ditambah kurangnya komitmen pimpinan OPD sehingga Penyelesaian tindak lanjut mengalami keterlambatan.
- Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah mampu memberikan kontribusi dalam pemenuhan tindak lanjut atas temuan BPK dan APIP, sehingga akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.



MISI V

MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA STAKEHOLDER DALAM PROSES PEMBANGUNAN

TUJUAN 5.1.

MENINGKATKAN KUALITAS NILAI-NILAI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara

1. Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial Dan Keagamaan

Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan target kinerja tahun 2018 sebesar 93% teralisasi sebesar 100%. Hal ini mengalami keberhasilan tidak ada konflik sosial dan kagamaan ditahun ini, keberhasilan ini dikarena melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat di kecamatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;
- b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik;
- c. Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
- d. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta
- e. Peningkatan kerjasama intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.

2. Jumlah Demo Bersifat Sosial



Jumlah demo bersifat sosial tahun 2018 sebanyak 38 demo dan ditargetkan tertangani sebesar 100% teralisasi jumlah demo yang ditangani berjumlah 38 demo, maka capaian kinerja tahun 2018 berhasil ditangani sebesar 100%. Keberhasilan ini karena tata cara menyampaikan pendapat atau demonstrasi di muka umum adalah:

- a. Wajib memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa atau demonstrasi secara tertulis kepada Polri dengan memuat format, maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lamanya berdemo, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, alat peraga yang digunakan, dan jumlah peserta.
- b. Penyampaian diberikan yang bersangkutan baik pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- c. Selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan di mulai telah diterima oleh Polri setempat

Sasaran 5.1.2 : Meningkatkan Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)

1. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas tahun 2018 terealisasi sebesar 20,57% atau 75 kasus dari target 14,28% sehingga pencapaian kinerja sebesar 69,42% Keberhasilan tersebut karena didukung oleh Instansi terkait dan peningkatan koordinasi secara terpadu dengan TNI/POLRI serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran dengan melakukan antipasi optimalisasi kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) yang melibatkan Instansi terkait yaitu TNI/POLRI dan Dinas Perhubungan.

2. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Perda tahun 2018 terealisasi sebesar 94,56% atau 514 kasus pelanggaran perda yang terselesaikan atas 475 kasus dari target 94,56% sehingga pencapaian kinerja sebesar 97,73%. keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan Bupati melalui Perda dan peningkatan kegiatan dalam menegakkan Peraturan Daerah serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran – pelanggaran Peraturan Daerah yang



dilakukan oleh masyarakat serta didukung oleh potensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang setiap tahun selalu ditingkatkan.

3. Persentase Pelanggaran K3

Persentase Pelanggaran K3 tahun 2018 terealisasi sebesar 8,47 atau 407 kasus dari target 5,44% sehingga pencapaian kinerja sebesar 64,23%. Keberhasilan tersebut karena adanya koordinasi secara terpadu dengan Instansi Terkait dan juga setiap waktu selalu melakukan operasi dan patroli insidentil. Masalah tersebut kami antisipasi dengan optimalisasi kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) dan Pengembangan Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Keputusan Bupati serta Kegiatan Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP (Patroli Insidentil)

4. Jumlah Korban Bencana Yang Tertangani

Korban bencana pada tahun 2018 sebanyak 1.303.000 jiwa dan mengalami realisasi penanganan sebesar 100%. Keberhasilan ini diraih berkat tersedianya tenaga yang tanggap dan handal dalam kebencanaan, kerja sama yang baik dengan pihak lain dan masyarakat, serta tersedianya kebutuhan peralatan, logistik maupun barang bantuan bagi korban bencana.

MISI VI

MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

TUJUAN 6.1.

MENINGKATKAN KUALITAS NILAI-NILAI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sasaran 6.1.1 : Menguatnya/Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep

1. Persentase Jumlah Kesenian Lokal Yang Dikembangkan



Indikator prosentase kesenian lokal yang dikembangkan tahun 2018 sebesar 10%, dimana diharapkan ada kenaikan prosentase apresiasi sebesar 10% dari realisasi tahun sebelumnya, dan telah teralisasi sebesar 17%. Apresiasi seni budaya ini meliputi penampilan seni budaya, pembinaan kesenian lokal, penghargaan terhadap pelaku seni dan pelestarian agenda sejarah, Pada tahun 2018 dilaksanakan 36 kali penampilan seni, 10 kali pembinaan kesenian lokal, 3 kali pelestarian agenda sejarah, 2 kali pelestarian cagar budaya serta 3 kali prosesi dan pawai budaya. Total 54 kali apresiasi seni budaya. Tahun 2017 apresiasi seni budaya sebanyak 46 kali. Jadi terjadi penambahan prosentase apresiasi seni budaya dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 17%.

Sasaran 6.1.2 : Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep

1. Persentase Jumlah Pemuda Yang Dibina Sehingga Berprestasi

Indikator prosentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi tahun 2018 tidak terealisasi disebabkan usulan peserta Pemuda Pelopor tahun 2018 untuk 5 (lima) katagori tidak lolos di tingkat Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2018 Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep berhasil membawa penghargaan nasional di bidang Kepemudaan yaitu menjadi Juara Katagori Utama Kabupaten Layak Pemuda dan berhak membawa hadiah berupa uang pembinaan

2. Persentase Jumlah Prestasi Atlet Cabang Olah Raga Berprestasi

Indikator prosentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi tahun 2018 tidak terealisasi disebabkan usulan peserta Pemuda Pelopor tahun 2018 untuk 5 (lima) katagori tidak lolos di tingkat Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2018 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep berhasil membawa penghargaan nasional di bidang Kepemudaan yaitu menjadi Juara Katagori Utama Kabupaten Layak Pemuda dan berhak membawa hadiah berupa uang pembinaan.



5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam mengukur analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan evaluasi dalam bentuk tabel sebagai berikut :

COST PER OUTCOME :

Tabel 3.6
Alokasi Cost Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN	OPD
MISI 1					
1.1	Meningkatnya pendidikan sekolah yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	Indeks Pendidikan	108.233.157.517	15,70%	Dinas Pendidikan
1.2	Meningkatnya minat baca masyarakat utamanya pelajar	Jumlah kunjungan perpustakaan	832.280.000	0,12%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		IKM layanan perpustakaan	97.671.445	0,01%	
1.3	Meningkatnya status/ derajat kesehatan masyarakat bagi masyarakat Sumenep	Angka Harapan Hidup (%)	4.284.410.221	0,62%	Dinas Kesehatan
		Prosentase Penduduk yang dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	132.133.874.638	19,16%	
		Prosentase Puskesmas Terakreditasi	50.726.849.591	7,36%	
1.4	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi	Rasio KB aktif	8.470.140.000	1,23%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	250.000.000	0,04%	
1.5	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Persentase partisipasi angkatan kerja (%)	821.400.000	0,12%	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yg masuk ke pengadilan hubungan industrial	202.667.500	0,03%	
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	76.338.807	0,01%	
		Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	25.000.000	0,004%	
1.6	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang ditangani	8.890.884.500	1,29%	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	814.687.000	0,12%	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN	OPD
1.7	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender	Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	956.048.750	0,14%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	1.452.839.300	0,21%	
MISI 2					
2.1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan, dan irigasi	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik			Dinas PU. Bina Marga
		- Jalan	98.525.310.971	14,29%	
		- Jembatan	3.235.479.500	0,47%	
		- Irigasi	13.015.463.700	1,85%	
2.2	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	39.303.596.770	5,70%	Dinas Perhubungan
		Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	73.368.843.379	10,64%	
2.3	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman/ perumahan secara memadai	Indeks kota layak huni :			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	13.036.527.666	1,89%	
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	9.008.706.815	1,31%	
		Persentase rumah layak huni	2.122.504.000	0,31%	
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	215.430.000	0,03%	
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)	558.400.000	0,08%	
		Persentase tersedianya luasan RTH publik	7.475.142.370	1,08%	
2.4	Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak di dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan	Indeks kualitas air sungai		0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas udara		0,00%	
		Indeks Tutupan Lahan		0,00%	
		Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)			



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN	OPD
2.5	Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup	Rasio elektrifikasi	10.035.658.100	1,46%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan		0,00%	Bagian Energi dan Sumber Daya Alam Setda
MISI 3					
3.1	Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi sehat	919.448.870	0,13%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase pertumbuhan UMKM	6.765.936.500	0,98%	
3.2	Meningkatnya kunjungan wisata, yang didukung peningkatan jumlah sarana dan prasarana wisata	Persentase jumlah kunjungan wisatawan	1.119.841.000	0,16%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
3.3	Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi penanaman modal	433.403.950	0,06%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah investor	364.800.000	0,05%	
3.4	Meningkatnya kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/ revitalisasi pasar	Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	5.832.952.827	0,85%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	29.067.258.700	4,22%	
3.5	Meningkatnya nilai tambah, hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan)	Jumlah produksi tanaman pangan	4.769.523.919	0,69%	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktivitas tanaman pangan		0,00%	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Peningkatan Jumlah Populasi dan Produksi hasil Ternak	5.824.979.000	0,84%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.6	Meningkatnya manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan	Jumlah hasil perikanan tangkap	1.294.149.500	0,19%	Dinas Perikanan
		Jumlah hasil perikanan budidaya	873.034.500	0,13%	
		Persentase Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan	395.000.000	0,06%	
3.7	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase kualitas gizi pangan daerah dan daerah rawan gizi	948.504.501	0,14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
MISI 4					



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN	OPD	
4.1	Meningkatnya Perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	466.858.000	0,07%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.2	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	284.582.000	0,04%		
4.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang tertib administrasi	1.193.221.500	0,17%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.4	Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah		0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4.5	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan dan kualitas layanan kependudukan	Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki E-KTP	5.097.362.500	0,74%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4.6	Terwujudnya disiplin tata kelola pemerintahan yang baik dan tersedianya aparatur yang memadai , kompeten, bersih dan akuntabel	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	735.434.500	0,11%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	491.117.300	0,07%		
		Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	5.300.822.200	0,77%		
		Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur	147.481.900	0,02%		Sekretariat Daerah
		Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur	148.504.500	0,02%		
4.7	Meningkatnya pelayanan fungsi legislatif	Jumlah Risalah rapat/sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan	5.215.897.700	0,76%	Sekretariat DPRD	
		Jumlah naskah produk hukum Daerah	6.061.621.400	0,88%		
4.8	Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan auditabel	Persentase pertumbuhan PAD	4.157.671.135	0,60%	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	75.510.850	0,01%	Inspektorat	
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	75.000.000	0,01%		
MISI 5						



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN	OPD
5.1	Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan		0,00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Jumlah demo besifat sosial		0,00%	
5.2	Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat (terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif)	Angka Kriminalitas	225.675.000	0,03%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan Perda	627.060.000	0,09%	
		Persentase Pelanggaran K3	203.000.000	0,03%	
		Jumlah korban Bencana yang tertangani	12.090.000.000	1,75%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 6					
6.1	Menguatnya/ terpeliharanya seni dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep	Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan	6.271.595.900	0,91%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga
6.2	Meningkatnya kualitas peranan pemuda dan prestasi olahraga di Kabupaten Sumenep	Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi	300.000.000	0,04%	
		Persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	6.586.195.750	0,96%	



Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	
	MISI I								
	Tujuan I.1								
1	Sasaran 1 .1.1								
	Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan								
	DINAS PENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	93,00%	91,50%	98,40%	108.233.157.517,00	97.444.949.263,00	90,03%	8,37%
2	Sasaran 1.1.2								
	Meningkatnya minat baca masyarakat serta pembinaan dan Pengembangan sarana literasi								
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Jumlah kunjungan perpustakaan	20.500	37.930	185%	832.280.000	830.724.700	99,81%	85,21%
		IKM Layanan perpustakaan	77,22	76,25	99%	97.671.445	95.014.123	97,28%	1,46%
3	Sasaran 1.1.3								
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat								
	DINAS KESEHATAN	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,32 Tahun	70,71 Tahun	100,55%	4.284.410.221	3.632.922.950	84,79%	15,76%
		Prosentase Penduduk yang dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	63%	67%	106,35%	132.133.874.638	62.710.007.541	47,46%	58,89%
		Prosentase Puskesmas Terakreditasi	100%	100%	100%	50.726.849.591	40.588.420.943	80,01%	19,99%
4	Sasaran 1.1.4								
	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi								
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Ratio KB Aktif	65,07%	68,27%	104,92%	8.470.140.000	7.322.475.250	86,45%	18,47%
		Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,56%	0,56%	100%	250.000.000	243.599.463	97,44%	2,56%
	Tujuan I.2								
5	Sasaran I.2.1								
	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha								
	DINAS TENAGA KERJA	Persentase partisipasi angkatan kerja	74%	74,25%	100,19%	821.400.000	709.410.890	86,37%	13,82%



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	
		Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	0,26%	0,35%	74,29%	202.667.500	165.028.500	81,43%	-7,14%
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	38,86%	37,15%	95,60%	76.338.807	68.125.400	89,24%	6,36%
		Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.085	7.358	180,12%	25.000.000	25.000.000	100%	80,12%
6	Sasaran I.2.2								
	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)								
	DINAS SOSIAL	Jumlah PMKS (jiwa)	100.606	243.077	41,39%	8.890.884.500	8.127.097.668	91,41%	-50,02%
		Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	4,20%	26,44%	629,52%	814.687.000	727.969.450	89,36%	540,17%
7	Sasaran I.2.3								
	Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender								
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	0,022%	0,0079%	278,48%	956.048.750	810.417.263	84,77%	193,71%
		Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	57,38%	100%	174,28%	1.452.839.300,00	1.353.981.370,00	93,20%	81,08%
	MISI II								
	Tujuan II.1								
8	Sasaran II.1.1								
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi								
	DINAS PU. BINA MARGA	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik:							
		Jalan	61%	67%	108,76%	98.525.310.971	89.304.565.284	91%	18,12%
		Persentase panjang jalan daratan dalam kondisi baik	72%	80,21%	111,78%				
		Persentase panjang jalan kepulauan dalam kondisi baik (%)	88%	97,73%	111,61%				
		Jembatan	67%	70%	104,48%	3.235.479.500	2.893.696.500	89%	15,04%
		Persentase jumlah Jembatan daratan dalam kondisi baik (%)	51%	54%	105,75%				
		Persentase jumlah Jembatan kepulauan dalam kondisi baik (%)	83%	86%	103,92%				
	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR	Daerah irigasi daratan yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	6568	6533	99,47%	-	-	-	99,47%



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	
		Daerah irigasikepulauan yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	353	353	100%	-	-	-	100%
		Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi(%)	67%	64%	95%	13.015.463.700	12.838.611.272	98,64%	-3,75%
		-Daratan	74,62%	75%	100,27%				
		-Kepulauan	60,09%	53,79%	89,52%				
9	Sasaran II.1.2								
	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi								
	DINAS PERHUBUNGAN	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0764%	0%	120,55%	39.303.596.770	34.914.084.729	88,83%	31,72%
		Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	83,75%	96,06%	114,70%	73.368.843.379	29.847.871.437	40,68%	74,02%
10	Sasaran II.1.3								
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai								
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Indeks Kota Layak Huni :							
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	90%	81,28%	90,31%	13.036.527.666	12.792.488.300	98,13%	-7,82%
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	50,7%	81,3%	160,32%	9.008.706.815	6.535.568.250	72,55%	87,77%
		Persentase rumah layak huni	23%	23%	100%	2.122.504.000	1.985.378.550	93,54%	6,46%
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	5%	3%	60%	215.430.000	211.478.600	98,17%	68,50%
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota,Kalianget dan Batuan)	68%	71%	104,41%	558.400.000	102.109.400	18,29%	86,13%
		Persentase tersedianya luasan RTH publik	32%	25%	78,13%	7.475.142.370	6.308.747.775	84,40%	-6,27%
	Tujuan II.2								
11	Sasaran II.2.1								
	Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA Dan Lingkungan								
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air sungai	66,67	63,33	94,99%	1.486.197.000	1.279.359.405	86,08%	8,91%
		Indeks kualitas udara	76,06	87,27	114,74%	1.165.000.000	1.112.068.300	95,46%	19,28%
		Indeks Tutupan Lahan	74,98	73,91	98,57%	1.198.087.500	1.127.948.596	94,15%	4,43%
		Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)	572	729	127,45%	157.000.000	150.043.500	95,57%	31,88%
12	Sasaran II.2.2								
	Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup								



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rasio elektrifikasi	58,47%	58,40%	99,88%	10.035.658.100	8.664.750.900	86,34%	13,54%
	BAGIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA	Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	2,05%	2,15%	100%	50.000.000	49.637.000	99,27%	0,73%
	MISI III								
	Tujuan III.1								
13	Sasaran III.1.1								
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM								
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Koperasi sehat (KSP/USP)	2,96%	7,49%	253,04%	576.726.000	546.613.500	94,78%	158,26%
		Persentase pertumbuhan UMKM	18%	5%	25,00%	6.235.000.000	4.664.303.450	74,81%	-49,81%
14	Sasaran III.1.2								
	Meningkatnya Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata								
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Persentase kontribusi sset pariwisata terhadap PAD	15%	1,87%	12,47%	8.047.940.900	6.019.929.792	74,80%	-62,33%
		Persentase jumlah kunjungan wisatawan	9%	46%	511,11%	1.119.841.000	1.023.897.475	91,43%	419,68%
15	Sasaran III.1.3								
	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)								
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jumlah nilai investasi penanaman modal:							
		Nilai Investasi PMDN	Rp. 435.280.453.964	Rp. 1.334.169.631.253	306,51%	433.403.950	429.552.800	99,11%	207,40%
		Jumlah investor	5642	2577	45,68%	364.800.000	355.360.000	97,41%	-51,74%
16	Sasaran III.1.4								
	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar								
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Persentase kontribusi ssety terhadap PDRB	6,28%	belum dirilis	belum dirilis	5.832.952.827	5.253.151.411,50	90,06%	
		Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	12,92%	belum dirilis	belum dirilis	29.067.258.700	25.139.756.659,98	86,49%	
	Tujuan III.2								
17	Sasaran III.2.1								
	Meningkatnya Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)								
	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah produksi dan produktifitas Tanaman pangan	96.613	81.414	84,27%	4.769.523.919	4.631.168.119	97,10%	-12,83%



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	
		Jumlah produksi Tanaman pangan	772.875	651.287	84,27%				
		Padi (ton)	227.638	199.352	87,57%				
		Jagung (ton)	432.014	403.483	93,40%				
		Kedelai (ton)	7.553	22.877	302,87%				
		Ubi Kayu (ton)	105.670	25.576	24,20%				
		Produktivitas tanaman pangan	26	25	94,59%				
		Padi (ton/ha)	6,81	5,70	83,70%				
		Jagung (ton/ha)	2,98	2,90	97,32%				
		Kedelai (ton/ha)	1,63	1,40	85,89%				
		Ubi Kayu (ton/ha)	15,01	15,00	99,93%				
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Peningkatan Jumlah Populasi dan Produksi hasil Ternak :							
		Populasi Peternakan (ekor)	1.853.558	1.897.519	102,37%	5.824.979.000	248.262.000	4,26%	98,11%
		sapi potong	363.824	367.382	100,98%				
		kerbau	5.119	5.071	99,06%				
		kuda	2.183	2.167	99,27%				
		kambing	150.924	153.378	101,63%				
		domba	38.993	39.650	101,68%				
		ayam buras	782.582	787.853	100,67%				
		ayam petelur	324.522	326.760	100,69%				
		ayam pedaging	116.581	145.485	124,79%				
		itik	56.448	57.244	101,41%				
		mentok	12.382	12.529	101,19%				
		Peningkatan Produksi Peternakan (kg)	7.236.094	7.928.449	110%	1.636.300.000	275.756.921	16,85%	92,72%
		Daging	4.474.256	4.629.704	103,47%				
		Telur	2.761.838	3.298.745	119,44%				
	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Jumlah produksi hasil perkebunan (ton)							
		Peningkatan Produksi Perkebunan :	13.501	13.517	100,12%	5.100.000.000	5.003.201.888	98,10%	2,02%
		kelapa	42.643	43.968,38	103,11%				
		tembakau	9.245	8.171,10	88,39%				
		cabe jamu	9.866	10.198,29	103,37%				
		jambu mete	4.975	5.247,78	105,48%				
		siwalan	776	749,33	96,53%				
17	Sasaran III.2.2								



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	
	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan								
	DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan :							
		Jumlah hasil perikanan tangkap (ton)	48.100	47.927	99,64%	1.294.149.500	1.284.243.000	99,23%	0,41%
		Jumlah hasil perikanan budidaya (ton)	647.294,00	661.771,52	102,24%	873.034.500,00	866.331.951,00	99,23%	3,00%
		Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)	41,09	belum dirilis		395.000.000	383.696.790	97,14%	
18	Sasaran III.2.3								
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah								
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Persentase kualitas gizi pangan daerah	80%	71%	88,34%	463.604.500	484.900.000	105%	-16%
		Persentase daerah rawan gizi	12%	57%	479,08%	448.094.530	438.675.350	98%	-77%
	MISI IV								
	Tujuan IV.1								
19	Sasaran IV.1.1								
	Meningkatnya Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat								
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	26%	30%	115,38%	466.858.000	431.831.975	92,50%	22,89%
20	Sasaran IV.1.2								
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan								
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	65%	78%	120%	284.582.000	240.461.000	84,50%	35,50%
21	Sasaran IV.1.3								
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik								
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Jumlah desa sejahtera	81 desa	-	-				
		Persentase desa yang tertib administrasi	100%	60%	60%	1.193.221.500	959.052.950	80,38%	-20,38%
	Tujuan IV.2								
22	Sasaran IV.2.1								
	Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa								
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah (orang)	3.287	75.000	2281,72%	-	-	-	2281,72%



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	
23	Sasaran IV.2.2								
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki E-KTP	91%	82%	90,63%	5.097.362.500	4.617.251.170	90,58%	0,05%
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Tujuan IV.3								
24	Sasaran IV.3.1								
	Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel								
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	85%	91%	107,06%	735.434.500	268.949.145	36,57%	70,49%
		Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	91%	97%	106,59%	491.117.300	350.294.262	71,33%	35,27%
		Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	0,20%	0,15%	133,33%	5.300.822.200	3.340.887.230	63,03%	70,31%
	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur	peringkat 31	belum dirilis		147.481.900	142.503.500	96,62%	
	BAGIAN ORGANISASI SETDA	Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur	70,00	67,48	96,40%	148.504.500	126.574.300	85,23%	11,17%
25	Sasaran IV.3.2								
	Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif								
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Jumlah Risalah rapat/sset Paripurna DPRD yang dihasilkan (kali)	181	272	150,28%	5.215.897.700	4.117.146.266	78,93%	71,34%
		Jumlah naskah produk sset Daerah	23	19	82,60%	6.061.621.400	4.393.129.566	72,47%	10,13%
26	Sasaran IV.3.3								
	Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel								
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Persentase pertumbuhan PAD	15,00%	10,14%	67,60%	4.157.671.135	3.727.875.191	89,66%	-22,06%
		Persentase luas sset tanah Pemda yang bersertifikat	34,87%	34,81%	99,83%	-	-	-	99,83%
		Persentase Belanja modal terhadap total belanja	19,12%	16,48%	86,19%	-	-	-	86,19%
	INSPEKTORAT	Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK dan APIP	83,50%	77,00%	92,23%	153.510.850	150.482.000	98,03%	-5,81%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	80,00%	76,50%	95,63%	78.510.850	77.482.000	98,69%	-3,06%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	87,00%	77,50%	89,08%	75.000.000	73.000.000	97,33%	-8,25%
	MISI V								



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN	
	Tujuan V.1								
27	Sasaran V.1.1								
	Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara								
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	93%	100%	107,53%	-	-	-	107,53%
		Jumlah demo bersifat sosial	100%	100%	100%	-	-	-	100%
28	Sasaran V.1.2								
	Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)								
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Angka Kriminalitas	0,1428	0,2057	144,05%	225.675.000	133.875.000	59,32%	84,73%
		Persentase Penegakan Perda	95%	92%	97,73%	627.060.000	594.583.845	94,82%	2,91%
		Persentase Pelanggaran K3	5%	8%	155,70%	203.000.000	160.755.255	79,19%	76,51%
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Persentase penanganan daerah rawan bencana	78,75%	100%	126,98%	148.170.000	144.942.750	97,82%	29,16%
		Jumlah Korban Bencana (org)	50	1303000	0,0038%	148.170.000	144.942.750	97,82%	-97,82%
		Jumlah korban Bencana yang tertangani (org)	50	1303000	2606000%	12.090.000.000	10.652.234.080	88,11%	2605911,89%
	MISI VI								
	Tujuan VI.1								
29	Sasaran VI.1.1								
	Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep								
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Persentase kesenian lokal yang dikembangkan	10%	17%	170,00%	6.271.595.900	5.733.751.577	91,42%	78,58%
30	Sasaran VI.1.2								
	Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep								
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Persentase pemuda yang dibina sehingga berprestasi	10%	0%	0,00%	300.000.000	295.900.000	98,63%	-98,63%
		Persentase prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	20%	29%	145,00%	6.586.195.750	6.128.390.327	93,05%	51,95%



6. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :



Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Program dan Kegiatan pendukung adalah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Operasional Ujian Sekolah SD/MI, Biaya Operasional US dan UN SMP, Rakor PPDB, Workshop Proktor dan Teknisi UNBK, Pusat Pembinaan Seni Budaya, dan Operasional Tim BOS, yang paling dominan untuk mensukseskan keberhasilan Angka Harapan Lama Sekolah adalah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Operasional Ujian Sekolah SD/MI, dan Biaya Operasional US dan UN SMP, Kesimpulannya semakin besar akses pelayanan dan mutu pendidikan di laksanakan akan semakin besar pula keberhasilan capaiannya, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih banyak yang akan di terima oleh masyarakat

b. Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Program dan kegiatan yang mendukung adalah Lomba Olimpiade mata pelajaran dan olimpiade MIPA (OSN - MIPA) SD dan sederajat, Lomba Cerdas Cermat SD dalam rangka Wajar Pendidikan Dasar Sembilan



Tahun, Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Seleksi dan Pembinaan PRA OSN, Seleksi dan Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat, Pemilihan dan Pengiriman Siswa Berprestasi, Kawah Kepemimpinan Pelajar, Motivasi Prestasi Siswa Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP, Gala Siswa Indonesia SMP, Pekan Olahraga Sains dan Seni (PORSENI) Pelajar, Yang mana capaiannya di atas rata-rata target yang di tetapkan, kesimpulannya semakin besar ketersediaan lembaga pendidikan akan semakin besar pula angka rata-rata lama sekolah, dan ditunjang adanya pendidikan gratis, serta bantuan Program Indonesia Pintar

c. Angka Melek Huruf > 15 Tahun s.d 55 tahun

Program dan kegiatan yang mendukung adalah Penyelenggaraan paket A setara SD, Penyelenggaraan paket B setara SMP, Penyelenggaraan paket C setara SMA, Hari Aksara Internasional (HAI), Pemberantasan Buta Aksara. Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang paling dominan dalam keberhasilan Angka melek huruf >15 tahun s.d 55 adalah kegiatan Penyetaraan dan Pemberantasan Buta Aksara, kesimpulannya semakin besar kegiatan kegiatan pemberantasan buta aksara yang dicapai akan semakin bnyak penduduk yang mampu dan bisa baca tuli dan meleh huruf yang di dukung oleh minat warga akan pentingnya tau baca tulis dan Pendidikan

d. Persentase Jumlah Sekolah Terakreditasi Minimal B :

Program dan kegiatan yang mendukung adalah Penyelenggaraan DAK PAUD, Workshop Pendampingan kelembagaan dalam rangka penyiapan akreditasi PAUD dan Dikmas, Pendataan Sarana dan rasarana SD, SD Rujukan Mutu dan Akreditasi Sekolah, Pelaksanaan Wajib Diniyah SD, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Lalu, SMP Rujukan Mutu dan Akreditasi Sekolah, Revitalisasi Sarana dan Prasarana SMP, Revitalisasi Sarana dan Prasarana SKB dan yang paling dominan untuk persentase lembaga berakreditasi dan berijin adalah Kegiatan Rujukan Mutu dan Akreditasi dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah, sehingga daya saing antar lembaga penyelenggara pendidikan berjalan kompetitif



dan kualitas Pendidikan semakin maju



Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Minat Baca Masyarakat Utamanya Pelajar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, kegiatannya adalah :
 - Terlaksananya dan terwujudnya Pemahaman sebagai Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa / Ponpes.
 - Peningkatan Minat Baca Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Perpustakaan Desa.
 - Tersedianya bahan pustaka berupa Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - Terlaksananya perpustakaan desa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat desa.
 - Peningkatan pelayanan Perpustakaan Keliling dengan Tersedianya bahan pustaka berupa Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - Terselenggaranya Kegiatan Lomba Minat Baca.
 - Peningkatan pelayanan perpustakaan dengan meningkatnya Buku / data yang tertata rapi.
 - Terlaksananya Perpustakaan Keliling dan Meningkatnya pemanfaatan koleksi perpustakaan.
 - Terselenggaranya pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Pondok Pesantren, Sekolah dan Desa dalam Pemahaman Pengelola Perpustakaan.
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :



- Terlaksananya koordinasi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah pada 50 Pencipta Arsip;
 - Terlaksananya Supervisi Pengelolaan Arsip Dinamis dengan 36 unit kerja/SKPD; dan 24 Kecamatan di Kabupaten Sumenep
- c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
- Terlaksananya sosialisasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - Terlaksananya pembinaan kersipan desa pada pengelola Kearsipan Desa ;
 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM kearsipan dengan mengikutsertakan petugas pengelola arsip dalam pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan;
 - Terlaksananya koordinasi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah pada pencipta arsip;

MISI 1

TUJUAN 1.

SASARAN 3.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

Bidang Kesehatan Masyarakat :

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak melalui kegiatan yaitu :
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Palaporan.
 - b. Orientasi Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
 - c. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - d. Penguatan Forum Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penakib)



Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Pertemuan Pengembangan P4K
 - b. Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP)
 - c. Kegiatan Orientasi Kelas Ibu Nifas (KIN)
 - d. Pembentukan Forum Penakib
 - e. Workshop Replikasi Emas and Hospital Tour
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Promosi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
 - b. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Upaya Kesehatan Masyarakat melalui promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Usia Lanjut
 - e. Pengembangan Taman Posyandu

Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan cerdas cermat lansia
 - b. Pembinaan KP ASI
 - c. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat
 - d. Revitalisasi Jumantik
 - e. Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak
 - f. Pembinaan Desa Siaga
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- a. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
 - b. Penanggulangan Anemia Gizi dan Kekurangan Vitamin A
 - c. Peningkatan dan Perbaikan gizi

Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Akselerasi BGM dan Stunting
 - b. Pertemuan penanggulangan Vit. A pada siswa melalui kantin sehat di sekolah
 - c. Pertemuan penanggulangan anemia remaja dengan Kafe Remaja
 - d. Implementasi aplikasi nutriclin dalam konseling gizi di pojok gizi
 - e. Pembentukan tim gerakan masyarakat peduli balita gizi buruk (GEMPITAKU)
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat



- a. Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Limbah dan Pembinaan POKMAIR
- b. Penyehatan TTU , TPM , Pemukiman dan Pengawasan Pestisida
- c. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
- d. Peningkatan Kesehatan Lingkungan
- e. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitative
- f. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
- g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Pemeriksaan sampel sarana air bersih
- b. Pembinaan TPM di Puskesmas
- c. Pengukuran Kualitas Lingkungan Puskesmas
- d. Pendataan sanitasi di Puskesmas

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- a. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- b. Peningkatan Imunisasi bagi bayi (Imunisasi Dasar)
- c. Pelayanan Imunisasi bagi Balita dan Anak Sekolah (Bulan Imunisasi Anak Sekolah / BIAS)
- d. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- e. Ori Difteri
- f. Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
- g. Peningkatan Pelayanan, Penanggulangan Wabah dan bencana

Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Pembentukan public private mix (PPM)
- b. Workshop SIHA dalam program HIV/AIDS & IMS
- c. Monev LQAS Laboratorium TB
- d. Validasi data / evaluasi PWS di Kabupaten
- e. Supervisi supportive program imunisasi



- f. Deteksi dini dan penatalaksanaan kasus hepatitis
 - g. Workshop E-Sismal dan manajemen program pasca eliminasi malaria
 - h. Monitoring dan evaluasi program P2 ISPA & Diare
 - i. Pembentukan tim penanggulangan Fokus DBD
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- a. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
 - b. Peningkatan Pelayanan gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut dan NAPZA
Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :
 - a. Pertemuan standarisasi program pengendalian kanker serviks dan kanker payudara
 - b. Pertemuan Fasilitator Family Gathering dan pembinaan kader jiwa
 - c. Pembagian buku panduan layanan integrasi ISR/deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA & kanker payudara
 - d. Pembagian leaflet ODGJ
 - e. Pertemuan rakontek & monev program pengendalian penyakit tidak menular
 - f. Pertemuan rakontek pelayanan kesehatan indra dan gilut

Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Peningkatan Pelayanan Pada Sarana Kesehatan Dasar
 - d. Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
 - e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Sarana / Prasarana Kesehatan
 - f. Pembinaan dan Pengawasan Program Jaminan Kesehatan Nasional
 - g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pondok Pesantren
 - h. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - i. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK
 - j. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Persalinan



- k. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK UKM Essensial
- l. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK UKM Essensial (STBM)
- m. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Haji
- b. Pembentukan tim gerak cepat (TGC) penanggulangan KLB/wabah penyakit, keracunan makanan
- c. Kegiatan tranfusi darah
- d. Kegiatan penatalaksanaan kegawatdaruratan
- e. Pembentukan tim URC
- f. Pendataan Keluarga sehat
- g. Pembinaan dan pemantauan Batra
- h. Pembentukan Rumah Tunggu Klahiran (RTK)
- i. Pemicuan desa STBM
- j. Pengukuran kebugaran jasmani di Puskesmas

2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- a. Evaluasi Kinerja Puskesmas
- b. Akreditasi Puskesmas
- c. Pembentukan Puskesmas BLUD
- d. Pengembangan Manajemen Puskesmas
- e. Evaluasi Kinerja Perawat Ponkesdes dan Bidan PTT
- f. Akreditasi Puskesmas Melalui DAK Non Fisik
- g. Pos Kesehatan dalam rangka Visit Sumenep

Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Pendampingan Akreditasi Puskesmas
- b. Workshop PTP
- c. Workshop manual mutu
- d. Workshop audit internal
- e. Workshop keselamatan pasien

3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas



- a. Jasa Medik Puskesmas
 - b. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya
- Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :
- a. Pembayaran Jasa pelayanan Kesehatan
 - b. Rehabilitasi Puskesmas Rubaru, Puskesmas Guluk-guluk, Puskesmas Pasongsongan dan Gedung Farmasi Kesehatan
4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/umah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- a. Pembangunan Rumah Sakit
- Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :
- a. Pembangunan Rumah Sakit Arjasa
5. Program Upaya Kesehatan Puskesmas
- a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pandian
 - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pamolokan
 - c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batuan
 - d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Lenteng
 - e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Moncek
 - f. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Ganding
 - g. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Guluk-guluk
 - h. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Saronggi
 - i. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Bluto
 - j. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pragaan



- k. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Manding
- l. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batu Putih
- m. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Rubaru
- n. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Dasuk
- o. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Ambunten
- p. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pasongsongan
- q. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Gapura
- r. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batang-Batang
- s. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Legung
- t. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Dungkek
- u. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kalianget
- v. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Talango
- w. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Giligenting
- x. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Gayam
- y. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Nonggunong
- z. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Raas



- aa. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Arjasa
- bb. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kangayan
- cc. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Sapeken
- dd. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Masalembu

Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Pengadaan Obat dan BHP
 - b. Belanja operasional pelayanan kesehatan puskesmas
 - c. Penyuluhan dan Sosialisasi kesehatan luar gedung
 - d. Penyuluhan dan Sosialisasi kesehatan dalam gedung
 - e. Pengadaan Alat-alat kedokteran Umum
6. Pembinaan Lingkungan Sosial
- a. Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
 - b. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :

- a. Pertemuan penanganan linen puskesmas bagi sanitarian
- b. Pertemuan promotif dan preventif penyehat lingkungan
- c. Belajar kursus singkat dan pelatihan
- d. Pembayaran premi integrasi kepersertaan Jamkesda menjadi JKN-BPJS Kesehatan
- e. Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih
- f. Pemeliharaan sarana pengolahan air limbah

Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan



- b. Peningkatan, Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - c. Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjangnya
 - d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian
 - e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan Melalui DAK
 - f. Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Melalui DAK Non Fisik
- Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :
- a. Pertemuan pengelolaan persediaan dan bahan medis habis pakai
 - b. Pertemuan Bindalwas alkes dan PKRT
 - c. Pengadaan alat-alat kedokteran umum
 - d. Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
 - e. Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
 - f. Pengadaan Vaccine refrigerator
2. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- a. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
 - b. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya
 - c. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan
- Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :
- a. Pelatihan cara belajar insan aktif (CIBIA) untuk petugas, kader posyandu dan kader PKK tentang OMKABA
3. Program Perencanaan, Pengadaan. Pendayagunaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
- a. Peningkatan Manajemen Rekam Medis dan Informasi Puskesmas (RMIK)
 - b. Penilaian Kompetensi SDM
 - c. Analisa Kebutuhan SDM
 - d. Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga administrasi pada Fasilitas Kesehatan Yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Faktor yang menunjang keberhasilan program yaitu :
- a. Pelatihan / Bimtek tenaga kesehatan
 - b. Lomba Nakes teladan



c. Pemutakhiran data SDM Kesehatan

MISI 1

TUJUAN 1.

SASARAN 4.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana

Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pengadaan Sarana KB (DAK)
- b. Pengadaan Gedung UPT KB (DAK)
- c. Administrasi dari gudang kabupaten de faskes/ klinik KB teregester (DAK)
- d. Biaya operasional balai penyuluhan KB (DAK)
- e. Peningkatan kinerja PPKBD
- f. Fasilitasi dan sosialisasi program KKBPK
- g. Pergerakan pelayanan akseptor KB Aktif dan Baru

2. Program Keluarga Sejahtera

- a. Peringatan hari keluarga nasional (Harganas)
- b. Fasilitasi pusat pelayanan keluarga sejahtera
- c. Pengembangan program generasi berencana

MISI 1

TUJUAN 2.

SASARAN 1.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :



1) Sasaran Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Kerja dengan indikator kinerja Prosentase Penempatan kerja yang ditempatkan teralisasi capaian kinerja sebesar 99,81% (sangat berhasil), hal ini didukung dengan 2 program sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Kegiatan terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja informasi lowongan pekerjaan dalam daerah maupun diluar pencari kerja yang mendaftarkan 1335 orang sedangkan yang berhasil ditempatkan sebanyak 496 orang.
- Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Sumenep untuk Melakukan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada beberapa Pasar Tradisional.
- Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)

b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Terlaksananya Pembinaan Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek, bertujuan Supaya Pengusaha dapat melaksanakan Syarat-Syarat Kerja dengan baik dengan melakukan pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta memberikan Pembinaan tentang Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), Terciptanya peningkatan produktifitas kerja perusahaan sehingga keberlanjutan perusahaan dapat terjamin, dan Terlindungnya dan terjaminnya harkat dan martabat tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja
- Kegiatan Terlaksananya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang prosedur Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Tatacara/Prosedur menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Legal yang sesuai dengan ketentuan peratuaran Perundang undangan yang berlaku
- Kegiatan Optimalisasi Kinerja dan Fungsi Serikat Pekerja dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Out Sourcing) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi



Serikat Pekerja yang merupakan penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

- Pembinaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
 - Deteksi Dini dalam rangka meminilisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja
 - Pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja melakukan identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan sehingga dapat diketahui alasan dan faktor penyebab terjadinya perselisihan
 - Optimalisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja
 - Penyelesaian melalui Bipartit adalah Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Sasaran Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Prosentase Pelatihan dan Produktivitas terealisasi capaian kinerja sebesar 76,53% (Berhasil), hal ini didukung dengan 5 kegiatan sebagai berikut:
- a. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*
- Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Menjahit diarahkan kepada masyarakat pencari kerja yang memiliki bakat, minat dan kemampuan tetapi tidak mempunyai keterampilan di bidang Menjahit yang berkualitas di Kabupaten Sumenep
 - Pelatihan Tata Boga diarahkan untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja serta bimbingan usaha terhadap angkatan kerja, agar mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik untuk diri sendiri maupun orang lain



- Pelatihan Keterampilan Las Listrik
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi demi tercapainya usaha mandiri yang berkualitas. Disamping tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan / keterampilan kerja usaha program pembinaan tersebut diharapkan dapat menimalisir masalah ketenagakerjaan, meningkatkan aksesibilitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah untuk Pembangunan Tenaga Kerja Kreatif

b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan peralatan rias pengantin, pelatihan keterampilan las listrik, bantuan peralatan keterampilan menjahit, Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan kerja Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Meubelair/Ukir Kayu, Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Tambal Ban, Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan pembinaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT), Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan yang kesemuanya kegiatan ini di dukung dari Anggaran yang berasal dari Dana khusus yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

3) Sasaran Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja dengan indikator Kinerja Prosentase hubungan Industrial dan syarat-syarat kerja terealisasi capaian kinerja sebesar 67,37% (cukup berhasil), hal ini didukung dengan 6 Kegiatan sebagai berikut:

a. Prosentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2018 sebesar Rp.1.645.146,48-



dibandingkan dengan UMK Tahun 2017 sebesar Rp. 1.513.335,- bertujuan terwujudnya sistem pengupahan yang baik serta pemahaman kepada Pengusaha untuk memberikan pengupahan kepada Karyawannya.

- Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi Jumlah bantuan transport terhadap TKI Ilegal yang dideportasi dengan target sebanyak 267 orang.
- Optimalisasi kinerja dan fungsi serikat pekerja dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (OutSourcing) kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi Serikat Pekerja yang merupakan penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
- Terlaksananya Pembinaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, bertujuan untuk Terwujudnya Ketenangan Kerja, Disiplin Kerja dan Ketenangan Usaha, Terbinanya Hubungan Industrial yang harmonis beserta perangkat – perangkat kerja yang ada serta membina ketenangan dalam berusaha & Bekerja, Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Lembaga Kerja Sama Bipartit yang ada di Perusahaan, serta Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pembentukan Koperasi Karyawan di masing-masing perusahaan.
- Terlaksananya Pembinaan Deteksi Dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja, Untuk mengurangi pertentangan/perselisihan antara Pengusaha atau Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja karena tidak adanya penyesuaian pendapat mengenai hubungan kerja di Perusahaan, Mengadakan pembinaan ke Perusahaan mengenai hak dan kewajiban Pengusaha serta Pekerja, Menjalin Hubungan Industrial yang harmonis melalui musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dan Pekerja, Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di Perusahaan



sehingga dapat diberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berselisih

- Terlaksananya Optimalisasi penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, bertujuan Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai pancasila, Mengutamakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tidak berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

MISI 1

TUJUAN 2.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan :
 - Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM)
 - Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin
 - Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



- Rehabilitasi Sosial Perumahan Kumuh
- Pembinaan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia
- Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan / Veteran / Jandanya
- Pendistribusian Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu
- Bedah Rumah Untuk Lanjut Usia
- Asistensi Sosial lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
- Operasionalisasi Rumah Perlindungan Sosial

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
- Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat
- Rehabilitasi dan Penyantunan eks penyandang penyakit kronis (kusta)

MISI 1

TUJUAN 2.

SASARAN 3.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
- b. Evaluasi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)
- c. Pengembangan Kabupaten Layak Anak



- d. Pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih dan sayang dalam keluarga
- e. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
- f. Peningkatan manajemen operasional dharma wanita
- g. Pemberdayaan dan penguatan lembaga organisasi wanita
- h. Pembangunan ruang publik terpadu ramah anak

MISI 2

TUJUAN 1.

SASARAN 1.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan, dan irigasi oleh Dinas PU. Bina Marga dan Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Indikator ini dapat berhasil dikarenakan didukung oleh :
 - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan didukung kegiatan:
 - Pembangunan Jalan dengan output jumlah jalan yang ditingkatkan, dimana kegiatan yang sifatnya strategis dilaksanakan di 11 (sebelas) lokasi di wilayah kepulauan yaitu 3 lokasi di Kecamatan Arjasa, 2 lokasi di Kecamatan Kangayan, 1 lokasi di Kecamatan Sapekan, 1 lokasi di Kecamatan Nonggunong dan 4 lokasi di Kecamatan Gayam.
 - Peningkatan jalan DAK dengan output jumlah jalan poros kabupaten yang di tingkatkan dimana kegiatan yang sifatnya strategis dilaksanakan di 8 lokasi di wilayah daratan yaitu 3 lokasi di Kecamatan Batu Putih, 2 lokasi di Kecamatan Ganding, 1 lokasi di Kecamatan Saronggi, satu lokasi di Kecamatan Rubaru, 1 lokasi



- di Kecamatan Pasongsongan. Untuk wilayah kepulauan 1 lokasi yaitu di Kecamatan Talango.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan output jumlah jalan dan jembatan strategis yang direncanakan untuk sepuluh paket kegiatan.
 - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:
 - pertama adalah Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dengan output jumlah jalan yang terpelihara sebagaimana terdapat di 7 (tujuh) paket strategis di wilayah kepulauan.
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dengan output jumlah jalan yang terpeliharadan untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga kepulauan (27 Kecamatan di Kabupaten Sumenep daratan dan kepulauan).
 - Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Survey Kelayakan Penanganan Jalan dan Jembatan dengan output survey kelayakan rencana penanganan jalan/jembatan. Untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga kepulauan (27 Kecamatan di Kabupaten Sumenep daratan dan kepulauan).
2. Indikator Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Indikator ini sangat berhasil dikarenakan didukung oleh :
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yaitu kegiatan Pembangunan Jembatan dengan output jumlah jembatan yang dibangun /diperbaiki dan untuk wilayah daratan kegiatan ini dilaksanakan di 9 lokasi. Sedangkan di wilayah kepulauan terdapat 6 lokasi.
 - Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yaitu kegiatan Pemeliharaan Jembatan dengan output jumlah jembatan yang terpelihara dan untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga



kepulauan (27 Kecamatan di Kabupaten Sumenep daratan dan kepulauan).

3. Indikator Proporsi daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis didukung oleh :

➤ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ini untuk mencapai indikator kinerja Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dan indikator Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik didukung dengan kegiatan :

1. Sarana dan Prasarana Irigasi (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkan rehab saluran irigasi sebanyak 36 lokasi dan pergantian mesin di 4 rumah pompa yang mana telah terealisasi sesuai dengan targaet yaitu 36 lokasi rehab saluran irigasi dan 4 rumah pompa atau 100%)
2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkan pemeliharaan 8 rumah pompa yang mana telah terealisasi sesuai dengan targaet yaitu 8 rumah atau 100%)
3. Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan Infrastruktur Pengairan (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkan pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebanyak 8 HIPPA yang mana telah terealisasi sesuai dengan targaet yaitu 8 HIPPA atau 100%)
4. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kecil /Pedesaan (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkan 10 Lokasi pemeliharaan jaringan irigasi kecil dan 10 Lokasi rehabilitasi jaringan irigasi kecil yang mana telah terealisasi sesuai dengan targaet yaitu 20 lokasi atau 100%)
5. Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkan 25 Lokasi normalisasi dan dam, 44 lokasi irigasi, 5 lokasi normalisasi saluran parit gendong dan 7 lokasi rehabilitasi saluran irigasi yang mana telah terealisasi sesuai dengan targaet yaitu 81 lokasi atau 100%)
6. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi dan Pintu Air (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkan peliharaan pintu air di



- 10 DI (Daerah Irigasi) yang mana telah terealisasi sesuai dengan target yaitu 10 DI (Daerah Irigasi) atau 100%)
7. Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah dan Rumah Pompa (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkaneliharaan 6 Rumah Pompa yang mana telah terealisasi sesuai dengan target yaitu 6 Rumah Pompa atau 100%)
- Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya untuk mencapai indikator kinerja Tingkat penyediaan air baku dan irigasi pada sawah tadah hujan didukung dengan kegiatan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Air (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkaneliharaan 2 lokasi sumber air dan 6 lokasi konservasi sumber air yang mana telah terealisasi sesuai dengan target yaitu 8 lokasi atau 100%)
 - Program Pengendalian Banjir untuk mencapai indikator kinerja Luas Wilayah Kebanjiran didukung dengan kegiatan :
 1. Pemeliharaan Sungai/Saluran Pembuang (pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkaneliharaan 12 lokasi saluran pembuang dan 4 lokasi rehabilitasi saluran pembuang yang mana telah terealisasi sesuai dengan target yaitu 14 lokasi atau 100%)
 2. Pembangunan, Perkuatan dan Rehabilitasi Tebing dan Tanggul Sungai/Saluran Pembuang (Pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkan perkuatan tebing sungai di 30 lokasi saluran pembuang dan 4 lokasi normalisasi saluran pembuang yang mana telah terealisasi sesuai dengan target yaitu 34 lokasi atau 100%)
 - Program Pengendalian abrasi pantai dan Program Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk mencapai indikator kinerja Perlindungan terhadap Abrasi Pantai didukung dengan kegiatan Pembangunan/Perbaikan Penahan Gelombang (pada tahun 2018 untuk kegiatan ini ditargetkan pembangunan tangkis laut di 50 lokasi yang mana telah terealisasi sesuai dengan target yaitu 50 lokasi atau 100%).



MISI 2

TUJUAN 1.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Transportasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan umum mempunyai target 65% dan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.637.550,- dengan realisasi kinerja 61,25% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 349.627.100,-. Sasaran ini didukung oleh program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- a) Dari 4 (empat) kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terealisasi 100%.
- b) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis tidak terealisasi. Hal ini disebabkan belum ada izin dari Kementerian Perhubungan tentang pemanfaatan Bandara khusus Pagerungan.

2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Dari 2 (dua) kegiatan semua terealisasi dengan tingkat capaian kinerja 100%.

b) Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi

Sasaran meningkatnya ketersediaan prasaran transportasi mempunyai target 70% dan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.943.205.829,- dengan realisasi kinerja 81,50% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.498.244.337,-. Sasaran ini didukung oleh program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- a) Dari 6 (enam) kegiatan terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak terlaksana 100%.
- b) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan/ Terminal/ Bandara hanya terealisasi 43,68%. Hal ini disebabkan berkas tidak



lengkap, pemilik lahan berkeberatan dengan harga ganti tanah yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil taksiran, kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama khusus pengembangan runway dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

- c) Kegiatan Revitalisasi Pelabuhan / Terminal / Bandara tidak terealisasi. Hal ini disebabkan anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur dananya turun ke kas daerah pada bulan Oktober dimana kegiatan ini adalah fisik dan lelang, sehingga dengan waktu hanya 2 bulan tidak mungkin bisa dilaksanakan kegiatan fisiknya.

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perhubungan

Dari 2 (dua) kegiatan semua terealisasi dengan tingkat capaian kinerja 100%.

3. Program Operasional Prasarana Perhubungan

Dari 6 (enam) kegiatan semua terealisasi dengan tingkat capaian kinerja 100%.

c) Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas

Sasaran meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas mempunyai target 70% dan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.303.596.770,- dengan realisasi kinerja 75% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.914.084.729,-. Sasaran ini didukung oleh program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Dari 4 (empat) kegiatan semua terealisasi dengan tingkat capaian kinerja 100%.

2. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi

Dari 2 (dua) kegiatan semua terealisasi dengan tingkat capaian kinerja 100%.

3. Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi

- a) Dari 5 (lima) kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terealisasi 100%.



- b) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) hanya terealisasi 83,33%. Hal ini disebabkan tidak cukup waktu untuk proses pelaksanaan fisik karena dari sisa waktu yang ada sekitar 77 hari kalender sedangkan untuk proses pengadaan dan pemasangan PJU 93 hari kalender.

MISI 2

TUJUAN 1.

SASARAN 3

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman/Perumahan Secara Memadai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 90% dan dapat mengalami kemajuan sebanyak 18,72%, dengan dukungan melalui kegiatan Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) dan kegiatan Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.

2. Persentase Jumlah Rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih

Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 84%, dengan hasil realisasi sebesar 81,28%, dengan dukungan kegiatan : 1) Instalasi Air Minum/bersih. Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan anggaran yang disediakan sangat terbatas.

3. Persentase rumah layak huni

Capaian tahun terakhir indikator Persentase rumah layak huni ditargetkan sebesar 23 unit, dengan hasil realisasi sebesar 23%, dengan dukungan kegiatan : Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni.

4. Lingkungan pemukiman kumuh



Capaian tahun terakhir indikator Lingkungan pemukiman kumuh ditargetkan tersisa sebesar 5% dan terealisasi 3%, dengan dukungan kegiatan : Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan dan Kegiatan Pelaksanaan Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 8,95%.

5. Persentase tersedianya luasan RTH publik

Pada tahun 2018 Luasan RTH Publik (Kawasan Perkotaan) mencapai 25% dari target sebesar 31,93% atau telah mencapai luasan 392,18 Ha. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 365,03 Ha. Hal tersebut disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumenep khususnya di Kawasan Perkotaan, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2018 tergolong sangat berhasil.



Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Peran Serta Semua Pihak di Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Terwujudnya Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tercapai 100% melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan :



- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan diperuntukan operasional pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Torbang dengan anggaran sebesar Rp 543.517.000 terealisasi sebesar Rp 539.986.000 atau sebesar 99,35 %.
 - b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan diperuntukan dalam operasional dan pemeliharaan armada persampahan dan alat berat yang melayani 3 lokasi (Kecamatan Kota Sumenep, Kalianget dan Batuan) dengan anggaran sebesar Rp 1.065.643.750 terealisasi sebesar Rp 1.045.929.100 atau sebesar 98,15 %.
 - c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan diperuntukan dalam penyelenggaraan sosialisasi retribusi pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumenep dengan jumlah peserta sebanyak 250 peserta yang terdiri dari Desa/Kelurahan, Perusahaan/Badan Usaha dengan pelaksanaan selama 2 hari. Alokasi anggaran sebesar Rp 75.450.000 terealisasi belanja sebesar Rp 74.981.000 atau sebesar 99,38 %.
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan terlaksananya kegiatan lomba kebersihan dan pengelolaan sampah pada Kelurahan dan Desa Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kalianget dalam rangka menunjang penilaian Adipura dengan Anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 149.699.100 atau sebesar 99,80 %.
- 2) Terwujudnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tercapai 100% melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pencapaian kegiatan dengan terlaksananya koordinasi tim penilaian Adipura dalam rangka meningkatkan score penilaian Adipura. Tahun



2018 ini Kabupaten Sumenep menerima Anugerah Adipura ke-10 untuk Kategori Kota Kecil.

- b. Pemantauan Kualitas Lingkungan diperuntukan dalam pengujian kualitas lingkungan terdiri dari sampel air sebanyak 18 titik, sampel udara sebanyak 9 titik dan sampel tanah sebanyak 30 titik. Alokasi anggaran sebesar Rp 230.000.000 terealisasi sebesar Rp 191.257.500 atau sebesar 83,16 %.
- c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup diperuntukan dalam pengawasan kegiatan industri/usaha di Kabupaten Sumenep yang telah memiliki dokumen lingkungan, tahun 2018 jumlah industri yang diawasi sebanyak 30 usaha/kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000 terealisasi belanja sebesar Rp 74.417.200 atau sebesar 99,22 %.
- d. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih diperuntukan dalam pengadaan bibit tanaman glodokan, trembesi, sukun dan cemara udang masing-masing sebanyak 500 unit, pengadaan papan informasi/himbauan sebanyak 30 unit dan pembersihan saluran/sungai sebanyak 5 lokasi. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 374.912.500 terealisasi belanja sebesar Rp 370.549.850 atau sebesar 98,84 %.
- e. Koordinasi Penyusunan AMDAL diperuntukan dalam proses penilaian dokumen lingkungan. Pada tahun 2018 rekomendasi SPPL sebanyak 75 buah dan rekomendasi UKL-UPL sebanyak 33 buah. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 157.000.000 terealisasi belanja sebesar Rp 150.043.500 atau sebesar 95,57 %.
- f. Koordinasi Program Adiwiyata dengan terlaksananya koordinasi tim penilai Adiwiyata dalam rangka meningkatkan score penilaian Program Adiwiyata dan pelaksanaan sarasehan dengan peserta 60 orang. Pada tahun 2018 Kabupaten Sumenep mengajukan 13 Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur dan masuk 2 sekolah (SMP Negeri 4 Sumenep dan SMA Batuan).
- g. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium dan IPAL diperuntukan dalam operasional UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi pengadaan alat



laboratorium, bahan kimia, alat gelas, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan serta mobil operasional pengambilan sampel uji kualitas lingkungan. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 351.284.500 terealisasi belanja sebesar Rp 349.575.255 atau sebesar 99,51 %.

- h. Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan dengan terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat, tahun 2018 ada 7 pengaduan yang masuk dan 2 pengaduan telah ditindaklanjuti, sisanya yang belum dikarenakan tidak memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti.
- i. Pembuatan IPAL (Instalasi IPAL UKM dan Puskesmas). Kegiatan ini batal dilaksanakan dikarenakan setelah dicroscheck secara berulang pada dokumen lingkungan milik Yayasan Asri Husada Klinik Pratama "UMMI", pengadaan IPAL Fasyankes tersebut merupakan kewajiban dari pemilik usaha/kegiatan.

3) Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sasaran ini dengan indikator % Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam tercapai 100% melalui program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi diperuntukan pemulihan kawasan konservasi kakak tua kecil jambul kuning yang endemik di P Masakambing Kec. Masalembu dengan penambahan vegetasi pohon kapuk randu sebagai habitat satwa tersebut dan pengusulan pulau tersebut menjadi Kawasan Ekosistem Essensial (KEE). Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 114.763.300 terealisasi belanja sebesar Rp 105.817.400 atau sebesar 92,20 %.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diperuntukan dalam pemantauan operasional rumah kompos di wilayah Sumenep daratan dan hasil transplantasi terumbu karang di wilayah perairan Kecamatan Arjasa. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 125.000.000 terealisasi belanja sebesar Rp 120.687.000 atau sebesar 96,55 %.
- ### 4) Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.



Sasaran ini dengan indikator % Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam tercapai 100% melalui program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk diperuntukan dalam transplantasi terumbu karang di wilayah perairan Kecamatan Talango, Giligenting dan Ra'as dengan areal seluas 1,5 Ha. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp 750.000.000 terealisasi belanja sebesar Rp 740.134.900 atau sebesar 98,68 %

5) Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tercapai 100% melalui program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kegiatan Penyusunan Sumber Daya Alam dan Neraca dan Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah. Pencapaian kegiatan dengan tersusunnya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebanyak 100 buku. Hasil dari laporan ini dikirim ke instansi terkait dan juga dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur sebagai laporan Wajib setiap Tahun. Dalam laporan ini terdapat kondisi tentang lingkungan hidup meliputi pertanian, peternakan, perindustrian, PDRB dan lain sebagai Dengan kegiatan ini terwujud data potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan perencanaan pengendalian dampak lingkungan hidup. Anggaran sebesar Rp. 56.760.800 dengan realisasi sebesar Rp. 56.256.140 atau sebesar 98,83%.

6) Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tercapai 100% melalui program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan RTH

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Pengecatan Pohon Peneduh dlm kota di 10 Ruas Jalan, Pengecatan Pot Bunga tersebar dlm kota di 3 ruas jalan, Pengecatan Tugu Batas kota kota dan Tugu



Batas Kabupaten di 14 lokasi, Pengecatan Monumen Dalam Kota & Dasuk di 2 lokasi, Pengecatan dan Penambalan Taman di 14 lokasi, Pengadaan dan Penanaman 1400 pohon. Anggaran sebesar Rp. 739.422.800 dengan realisasi sebesar Rp. 708.420.400 atau sebesar 95,81 %.

b. Penambahan Sarana Penerangan Taman

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya pemeliharaan sarana penerangan taman di 12 lokasi selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp. 164.743.100 dengan realisasi sebesar Rp. 162.097.796 atau sebesar 98,39 %.

c. Penambahan Sarana Penyiraman Taman.

Pencapaian kegiatan dengan terwujudnya Pengadaan 1 unit Motor Roda Tiga Tangki Penyiraman dan 1 unit Motor Roda Tiga Bak Penampungan Hasil Pemangkasan. Anggaran belanja sebesar Rp. 122.397.500 dengan realisasi sebesar Rp. 95.518.300 atau sebesar 78,04%.

7) Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Sasaran ini dengan indikator % Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan tercapai 100% melalui program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dengan kegiatan :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Pencapaian kegiatan dengan peralatan kebersihan lingkungan perkotaan dan pemotongan rumput liar/gulma pada bahu jalan dan sepadan saluran drainase. Anggaran belanja sebesar Rp. 58.356.000 dengan realisasi sebesar Rp. 56.256.140 atau sebesar 96,11%.

b. Peningkatan Kebersihan Lingkungan

Pencapaian kegiatan dengan honorarium dan biaya operasional petugas kebersihan (pasukan kuning), pengawas dan petugas pungut retribusi kebersihan dan penyedotan truk tinja. Anggaran belanja sebesar Rp. 2.554.165.250 dengan realisasi sebesar Rp. 2.547.885.000 atau sebesar 99,75%.

c. Pemeliharaan Alat-Alat Kebersihan



Pencapaian kegiatan dengan perbaikan 3 unit kontainer truk sampah dan 1 unit gerobak sampah. Anggaran belanja sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 48.965.000 atau sebesar 97,93%.

d. Sarana dan Prasarana Persampahan

Pencapaian kegiatan dengan pengadaan 2 unit truk pengangkut sampah, 10 unit motor pengumpul dan pengangkut sampah dan 1 unit IPAL UKM Industri Tahu. Anggaran belanja sebesar Rp. 1.316.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.310.791.200 atau sebesar 99,60%.

8) Terwujudnya Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sasaran ini dengan indikator % Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup tercapai 100% melalui program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup. Pencapaian kegiatan dengan pengadaan pot bunga 100 unit, bunga pucuk merah 100 unit, bunga puring 100 unit dan bunga asoka 100 unit serta tong sampah pemilah 18 unit yang ditujukan untuk pengembangan fasilitas wisata di Pulau Gili Labak dan Pulau Gili Iyang. Anggaran belanja sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 99.292.040 atau sebesar 99,29%.

MISI 2

TUJUAN 2.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam peningkatan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dan Bagian Energi dan Sumber Daya Alam



Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

Kegiatan Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 10.035.658.100,00

Realisasi : Rp. 8.664.750.900,00 (86,34%)

Sisa DPA : Rp. 1.370.907.200,00

✓ Output / Keluaran : Bertambahnya kelistrikan di daerah terpencil dan kepulauan

✓ Outcome / Hasil Terpenuhinya kelistrikan di daerah terpencil dan kepulauan

Kegiatan kelistrikan digunakan untuk :

- 1) Pemeliharaan PJU PLTS di Jalan Raya Bluto dan Saronggi
Rp. 194.301.000,00
- 2) Pemeliharaan PJU PLTS di Kota Rp. 37.800.000,00
- 3) Pemeliharaan PJU PLTS di Daratan Dasuk, Pasongsongan, dan Ambunten Rp. 198.018.000,00
- 4) Pemeliharaan PJU PLTS terpusat di Desa Kangayan
Rp. 198.240.000,00
- 5) Pemeliharaan PJU PLTS terpusat di Pulau Manok Desa Sonok
Rp. 98.820.000,00
- 6) Pemeliharaan Mesin PLTD Kec.Masalembu Rp. 198.300.000,00
- 7) Pengadaan Genset PLTD Pulau Giliraja 500 Kva (lanjutan)
Rp. 3.189.084.800,00
- 8) Pembangunan Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Pulau Giliraja (Lanjutan) Rp. 197.780.000,00
- 9) Pembangunan Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan GTT di Pulau Giliraja (Lanjutan) Rp. 1.433.619.000,00
- 10) Pembangunan Instalasi Jaringan Listrik di Bakeong Guluk Guluk (lanjutan) Rp. .423.000.000,00



- 11) Pembangunan Instalasi Jaringan Listrik di Pordapor (lanjutan)
Rp. .613.711.000,00
- 12) Pembangunan Instalasi Jaringan Listrik di Bilapora Barat (lanjutan)
Rp. .557.150.000,00
- 13) Pembangunan Instalasi Jaringan Listrik di Desa Patean (lanjutan)
Rp. .618.888.000,00
- 14) Pembangunan PJU PLTS di Desa Nambakor (lanjutan)
Rp. 198.930.000,00
- 15) Biaya Perencanaan Rp, 239.948.000,00
- 16) Biaya Pengawasan Rp. 157.130.000,00

Bagian Energi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. Program pembinaan dan penguatan informasi dan data base energi baru terbarukan
- g. Program pembinaan administrasi sumber daya air
- h. Program pembinaan dan pengembangan pertambangan dan lingkungan hidup
- i. Program pembinaan distribusi minyak dan gas bumi

MISI 3

TUJUAN 1.

SASARAN 1.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :



- a. Sasaran Program : Meningkatnya Koperasi Aktif dengan indikator program persentase koperasi aktif dengan target 78, 24% dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Sumenep terelisasi 78,24% dengan capaian kinerja 100% (sangat berhasil). Keberhasilan ini di dukung program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dengan Kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan pada Koperasi Berprestasi, dengan kegiatan tersebut koperasi yang ada di bina, serta di awasi kelembagaannya, serta di beri penghargaan kepada koperasi yang di nilai berprestasi.
 - Kegiatan Pemantapan Prinsip - prinsip Koperasi, dengan kegiatan tersebut para pengurus dan anggota Koperasi dapat memahami apa itu koperasi, dasar hukum pendirian Koperasi, Pelaksanaan RAT,
 - Kegiatan Monitoring, dan Evaluasi Revitalisasi Koperasi, dengan kegiatan tersebut koperasi yang kurang aktif di monitoring dan di beri pengarahan, dan apabila koperasi tersebut masih belum aktif akan di lakukan usulan penghapusan ke Kementerian Koperasi Keberhasilan kegiatan tersebut efisiensi penggunaan sumber daya dari penyerapan anggaran 99 % dengan tingkat efisiensi 1,44%
- b. Sasaran Program : Meningkatnya Modal Koperasi dengan indikator program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan target 3,00% dan terealisasi 3,00% dengan capaian kinerja 100% (sangat berhasil). Keberhasilan ini di dukung Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Bimtek Wirausaha Baru Anggota Koperasi dalam rangka peningkatan keterampilan pembuatan olahan hasil pertanian, dengan kegiatan tersebut anggota koperasi di beri pembinaan dan di beri keterampilan pengolahan hasil pertanian untuk menambah pengetahuan manajemen dan meningkatkan penghasilan.
 - Kegiatan Bimtek Wirausaha Baru Anggota Koperasi dalam rangka peningkatan keterampilan pembuatan aneka olahan rumput laut,



dengan kegiatan tersebut anggota koperasi di beri pembinaan dan di beri keterampilan aneka olahan rumput laut untuk menambah pengetahuan manajemen dan meningkatkan penghasilan.

- Kegiatan Praktek Kerja Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Simpan Pinjam, dengan kegiatan tersebut para pengurus koperasi di beri bekal kembali untuk meningkatkan pengelolaan Simpan Pinjam Koperasinya.
- Pendamping Teknis Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah, dengan kegiatan ini pengurus koperasi mendapat pendampingan dan pembinaan supaya mengerti dan memahami bagaimana teknis akuntansi usaha simpan pinjam pola syariah.

Keberhasilan kegiatan tersebut efisiensi penggunaan sumber daya dari penyerapan anggaran 96 % dengan tingkat efisiensi 4,02%

- c. Sasaran Program : Meningkatnya Wirausaha Muda dengan target 50% dan terealisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, keberhasilan ini tercapai karena di dukung program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Mencetak Wirausaha Muda, dengan kegiatan tersebut masyarakat dapat mengikuti pelatihan manajemen tentang berwirausaha dan pelatihan praktek kerja bermacam – macam jenis usaha. Tujuan utama adanya kegiatan tersebut mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Sumenep.
- Kegiatan Pembinaan Kepada Wirausaha Muda melalui bantuan sarana produksi, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung wirausaha muda yang sudah mengikuti praktek dan di nilai berhasil akan mendapatkan bantuan sarana produksi untuk mendukung pertumbuhan usahanya.
- Pelatihan singkat (short Course) melalui klinik KUMKM, kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan para wirausaha pemula yang ingin meningkatkan produk usahanya.

Keberhasilan kegiatan tersebut efisiensi penggunaan sumber daya dari penyerapan anggaran 98% dengan tingkat efisiensi 2,20%



MISI 3

TUJUAN 1.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam peningkatan kunjungan Wisata, yang didukung peningkatan jumlah sarana dan prasarana wisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, didukung dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata

Kegiatan ini merupakan cara untuk mengetahui dampak promosi dan pemasaran objek pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep terhadap perekonomian di Kabupaten Sumenep.

2. Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan ini merupakan sarana informasi yang akan memasarkan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep berupa pengadaan sarana ruangan Tourism Information Centre dan peralatan jaringan komputer .

3. Kegiatan Pembuatan Booklet Pariwisata

Kegiatan ini merupakan pengadaan media promosi berupa booklet berisi lokasi lokasi wisata yang ada di Kabupaten Sumenep.

4. Kegiatan Pembuatan Kalender Wisata

Kegiatan ini merupakan penyediaan media promosi berupa kalender yang bergambar potensi wisata, kegiatan kebudayaan serta kegiatan pemuda dan olahraga di Kabupaten Sumenep.

5. Kegiatan Pameran Majapahit Travel Fair

Kegiatan ini sebagai sarana informasi mengenai kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sumenep kepada masyarakat di luar Kabupaten Sumenep berupa pameran produk wisata unggulan se Jawa Timur



yang diikuti oleh biro-biro travel dan pelaku usaha pariwisata lainnya.

6. Kegiatan Pameran Pembangunan Sumenep

Kegiatan ini sebagai salah satu sarana informasi kepada masyarakat khususnya di daerah Sumenep, dalam memberikan informasi mengenai kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan yang difasilitasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep berupa pameran yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

7. Kegiatan Anugerah Wisata

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun yang merupakan bentuk kerjasama kepariwisataan sebagai ajang pemberian penghargaan kepariwisataan beserta unsur-unsurnya, yang diberikan pemerintah provinsi sebagai motivasi dalam menggiatkan sektor pariwisata di Jawa Timur.

8. Kegiatan Publikasi di Media Promosi

Kegiatan ini merupakan media promosi berupa publikasi melalui media cetak dan elektronik tentang kepariwisataan kebudayaan kepemudaan dan keolahragaan yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumenep serta perawatan mobil bioskop keliling.

9. Kegiatan Promosi dan Pemasaran Kabupaten Sumenep

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberdayakan sumber daya pariwisata berupa penyediaan petugas sebagai tour guide / pramuwisata bagi tamu yang berkunjung ke Kabupaten Sumenep.

10. Kegiatan Pembuatan Papan iklan / Informasi

Kegiatan ini merupakan media promosi berupa pembuatan baliho yang di sebar di beberapa titik lokasi yang mudah di lihat masyarakat luas serta perawatan / perbaikan papan iklan.

11. Kegiatan Pembuatan Brosur Pariwisata

Kegiatan ini merupakan pengadaan media promosi kepariwisataan berupa brosur yang memuat potensi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Sumenep.



12. Kegiatan Pembuatan Tas Pariwisata
Kegiatan ini merupakan penyediaan media promosi berupa pembuatan tas pariwisata dengan motif lokasi lokasi wisata di Kabupaten Sumenep.
 13. Kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
Kegiatan ini merupakan pembinaan pada kelompok kelompok yang ada didaerah lokasi wisata dimana kelompok ini merupakan salah satu dari unsur pariwisata sehingga tercapai sumber daya pariwisata yang diberdayakan.
 14. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
Kegiatan ini merupakan bentuk perwujudan wirausahawan baru bidang pariwisata berupa pembinaan dan pelatihan bagi kelompok industry yang mendukung pariwisata di kabupaten Sumenep.
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, didukung dengan kegiatan Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur, kegiatan ini merupakan acara tahunan Provinsi Jawa Timur untuk memilih Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur yang diikuti oleh duta wisata Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Raka Raki terpilih akan menjadi duta wisata Provinsi Jawa Timur untuk ikut mempromosikan potensi wisata di Jawa Timur ke luar provinsi bahkan keluar mancanegara.
 - c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Kegiatan ini merupakan bentuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana prasarana pariwisata berupa pengembangan objek pariwisata yang diunggulkan, dalam hal ini revitalisasi panggung kesenian / LKS yang menjadi tempat penampilan seni dan budaya.
 2. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Kegiatan ini merupakan bentuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana prasarana pariwisata berupa peningkatan



sarana objek wisata Kabupaten Sumenep (gazebo, pos penjagaan dan tempat duduk pantai).

3. Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Kegiatan ini merupakan bentuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana prasarana pariwisata berupa pembebasan lahan di Pulau Gililabak sebagai bentuk pengembangan daerah tujuan wisata.

4. Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan sarana wisata seni dan budaya

Kegiatan ini merupakan bentuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana seni budaya daerah berupa perawatan dan pemeliharaan sarana wisata seni dan budaya yang ada di Kabupaten Sumenep yang menjadi sarana pelaksanaan penampilan seni dan budaya.

5. Kegiatan Monitoring dan Pendataan Unsur Pariwisata

Kegiatan ini merupakan bentuk monitoring dan pendataan terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Sumenep, Pendataan jumlah kunjungan atas hotel, pendataan hotel dan restoran.

d. Program Pengembangan Kemitraan, didukung dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Pariwisata

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pendataan SDM Pariwisata yang ada Di Kabupaten Sumenep.

2. Kegiatan Bimbingan Tehnis Pelaku Usaha Wisata

Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan usaha usaha pariwisata berupa bimbingan teknis dan observasi lapangan kepariwisataan ke daerah tujuan wisata yang sudah memadai. Bimtek ini ditujukan bagi pelaku usaha wisata yang ada di Kabupaten Sumenep.

MISI 3

TUJUAN 1.

SASARAN 3.



Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam peningkatan Jumlah Investor Berskala Regional dan Nasional (PMDN/ PMA) oleh Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, jumlah anggaran Rp. 144.780.000,- Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 95.971.900,- memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
 1. Pengawasan dan pengendalian intern kepada petugas yang melaksanakan proses pendaftaran sampai penerbitan perizinan dalam mengetrapkan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan.
 2. Pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha untuk mematuhi izin yang diperolehnya sebagai dasar hukum memulai usahanya, sehingga ada efek jera yang menyeluruh kepada pelaku usaha lainnya.
 3. Pengawasan dan pengendalian kepada pelaksana PATEN untuk memberikan pelayanan perizinan sebaik mungkin.
- b. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, jumlah anggaran Rp. 35.519.500,- Sosialisasi Perizinan, jumlah anggaran Rp. 92.020.400,- ikut andil memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
 1. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Perizinan melalui sarana media luar ruang sangat efekti menyampaikan informasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha, baik melalui penempatan banner indoor/outdoor, leaflet, iklan advertorial dll.
 2. Dengan publikasi ini masyarakat paham tentang hakekat, manfaat legalitas perizinan, sehingga masyarakat terdorong untuk melegalkan kegiatan usahanya.
- c. Pengembangan Potensi Investasi Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 355.360.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :



1. Sebagai penyebar informasi potensi investasi di Kabupaten Sumenep kepada masyarakat di luar Kabupaten Sumenep.
 2. Sebagai motivasi kepada UMKM agar meningkatkan kualitas produksinya yang berorientasi ekspor melalui sarana pendirian stand pameran potensi investasi yang diikuti oleh DPM & PTSP Kabupaten Sumenep.
- d. Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep dengan anggaran Rp. 63.685.000,-, Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan anggaran Rp. 49.868.500,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
1. Memberikan informasi data profil, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga masyarakat paham dalam mengurus ijin usahanya.
 2. Adanya dukungan kerjasama yang baik dari instansi terkait dalam ikut menyebarkan informasi data profil, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Mendorong masyarakat yang mengajukan ijin usaha untuk turut aktif memberikan masukan atas pelayanan dan kinerja petugas pelayanan perizinan dengan memberikan tanggapan pada aplikasi indeks kepuasan masyarakat (IKM).
 4. Tersusunnya kode etik petugas pelayanan dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan.
 5. Terdistribusinya dan diterapkannya kode etik pelayanan kepada semua aparatur yang melayani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan
- e. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), jumlah anggaran Rp. 40.000.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
1. Dalam SPIPISE ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pengurusan izin prinsip.
 2. Kehandalan aparatur yang mengoperasikan SPIPISE.



3. Tersedianya kelengkapan hardware dan software yang memadai.
- f. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, jumlah anggaran Rp. 141.097.750,- memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
1. Dalam SIMTUP ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait perizinan, aplikasi perizinan, aplikasi layanan perizinan online, aplikasi QR-CODE, aplikasi arsip digital, aplikasi indeks kepuasan masyarakat (IKM), aplikasi informasi dan layanan perizinan berbasis android, aplikasi tanda tangan elektronik, aplikasi izin reklame, aplikasi tanda daftar usaha pariwisata, aplikasi Dashboard Perizinan Terpadu.
 2. Instansi terkait ikut aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait SIMTUP.
 3. Kehandalan aparatur yang mengoperasikan SIMTUP.
 4. Tersedianya kelengkapan hardware dan software yang memadai dan terus dikembangkan setiap tahunnya.
- g. Peningkatan pelayanan pendaftaran permohonan izin, jumlah anggaran Rp. 70.295.000, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
1. Pengetrapan SOP/SPP urusan penerbitan perizinan dilaksanakan dengan cepat, cermat, akurat dan murah.
 2. Kehandalan aparatur yang menjalankan SOP/SPP penerbitan perizinan dilihat dari aspek intelegensi, aspek pendidikan dan aspek mental sebagai pelayan masyarakat.
 3. Tersedianya aplikasi SIMTUP PATEN.
- h. Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan, jumlah anggaran Rp. 149.400.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
1. Kehandalan aparatur yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dilihat dari aspek intelegensi, aspek pendidikan dan aspek mental sebagai pelayan masyarakat.
 2. Partisipasi aktif dari instansi yang terkait dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap penerbitan izin.



3. Terhapusnya ego sektoral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- i. Ketatalaksanaan perizinan usaha perdagangan dan perikanan, jumlah anggaran Rp. 55.025.000,-, Ketatalaksanaan izin mendirikan bangunan, jumlah anggaran Rp. 72.375.000,-, Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, jumlah anggaran Rp. 84.600.000,- Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jumlah anggaran Rp. 140.140.000,- Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan, jumlah anggaran Rp. 48.445.000,- turut andil memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
 1. Melakukan sosialisasi betapa pentingnya surat izin usaha dalam mengembangkan dan memperluas jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat.
 2. Melakukan sosialisasi betapa pentingnya izin mendirikan bangunan dan izin pengusahaan tembakau dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin-izin usaha lainnya.
 3. Melakukan pemendekan jalur birokrasi pengurusan izin usaha dengan menempatkan tenaga teknis dari OPD terkait di front office Pelayanan Perizinan DPM&PTSP dalam memberikan pendampingan untuk mendapatkan rekomendasi teknis yang diperlukan.

MISI 3

TUJUAN 1.

SASARAN 4.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan, dan Pengembangan/Revitalisasi Pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan :
 1. Monitoring Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
 2. Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Industri Kreatif



- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan kegiatan :
 1. Pengembangan Teknologi Industri Berbasis OVOP
 2. Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Industri Kreatif
 3. Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Argo
- c. Program Lingkungan Sosial dengan kegiatan Bantuan Sarana Produksi IKM Berbasis Industri Kreatif
- d. Program Pembinaan Industri dengan kegiatan :
 1. Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Hasil Tembakau.
 2. Pemetaan Industri Hasil Tembakau.
- e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan dengan kegiatan :
 1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kemetrologian Legal Daerah.
 2. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
 3. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.
 4. Pembangunan Pasar Daerah.
 5. Fasilitasi Operasi Pasar.
 6. Oerasional dan Pengeloan Pasar Daerah.
- f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan kegiatan Penataan dan Pembinaan Bagi PKL
- g. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana dengan kegiatan Pengelolaan Pasar Daerah.
- h. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan kegiatan Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat.

MISI 3

TUJUAN 2.

SASARAN 1.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan) oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan,



Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Hasil Tanaman Pangan, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan:
 - a. Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian
 - b. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
 - c. Pengembangan Diversifikasi Tanaman
 - d. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan /Pertanian
 - e. Monitoring Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - f. Perencanaan dan Monitoring Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
 - b. Demonstrasi Areal Penanaman Aneka Tanaman Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan:
 - a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan,
 - b. Monitoring dan Pengawasan Pupuk/Pestisida
 - c. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK),
4. Program Pengembangan Agribisnis, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian,
 - b. Kegiatan Pameran Potensi Produk Pertanian



5. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan:
 - a. Penerapan Pembudidayaan Sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau
 - b. Penanganan Panen dan Pasca Panen
 - c. Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau
 - d. Penerapan Inovasi Teknis

Dari kelima program dan kegiatan tersebut di atas telah mendukung Peningkatan Produktivitas Padi atau komoditas pertanian lainnya per hektar yaitu :

- Padi sebesar 5,70 ton/ha dari target sebesar 6,81;
- Jagung sebesar 2,90 dari target 2,98;
- Kedelai sebesar 1,40 dari target 1,63;

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2018 tergolong Memuaskan.

6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak ini untuk mencapai indikator kinerja Peningkatan Populasi Ternak didukung dengan kegiatan antara lain Pendataan Masalah Peternakan, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Penanggulangan Penyakit Flu Burung, Vaksinasi Ternak, serta Pemeriksaan dan Pengujian Sampel. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator Populasi Ternak sebagai salah satu pendukung populasi ternak sehingga terjaga kestabilan populasi ternak sekaligus meningkatkannya. Dengan upaya tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berhasil mencapai capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.
7. Program peningkatan ekonomi kerakyatan ini untuk mencapai indikator kinerja Populasi ternak didukung dengan kegiatan antara lain Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Budidaya Ternak dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Peternakan Sapi, Kambing dan Unggas. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator populasi ternak sebagai salah



- satu pendukung indikator kinerja sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep meraih keberhasilannya.
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial ini untuk mencapai indikator kinerja Populasi ternak didukung dengan kegiatan Bantuan Sarana Produksi dan Ternak bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator populasi ternak sebagai salah satu pendukung indikator kinerja sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep meraih keberhasilannya.
 9. Program peningkatan produksi hasil peternakan ini untuk mencapai indikator kinerja peningkatan produksi hasil ternak didukung dengan kegiatan antara lain Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat, Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada masyarakat, Pengembangan Agribisnis Peternakan, Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif, Inseminasi Buatan (IB), Pengembangan Pakan Ternak, Pembinaan pengembangan usaha sapi Madura, dan Pengembangan Usaha Aneka Ternak . Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator produksi hasil ternak dan konsumsi bahan asal ternak sebagai salah satu pendukung indikator kinerja sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan meraih keberhasilan.
 10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna ini untuk mencapai indikator kinerja peningkatan produksi hasil ternak didukung dengan kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator produksi hasil ternak dan konsumsi bahan asal ternak sebagai salah satu pendukung indikator kinerja sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan meraih keberhasilan.

MISI 3

TUJUAN 2.

SASARAN 2.



Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Stimulasi Usaha Perikanan Tangkap

Maksud dan tujuan dari kegiatan Stimulasi Usaha Perikanan Tangkap yaitu untuk memberikan stimulan bantuan usaha dan motivasi kepada nelayan, sedangkan tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 577.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 575.827.000,- (99,63%).

Adapun lokasi kegiatan Stimulasi Usaha Perikanan Tangkap yaitu :

- Pengadaan Alat Tangkap Rajungan berlokasi di Kecamatan Pragaan, Bluto dan Kalianget.
- Pengadaan GPS dan Fish Finder berlokasi di Kecamatan Masalembu dan Sapeken.
- Pengadaan Jaring Gondrong berlokasi di Kecamatan Dungkek, Ra'as, Arjasa, Kangayan dan Sapeken.
- Pengadaan Jaring Milenium berlokasi di Kecamatan Arjasa, Sapeken, Pragaan, Bluto dan Kalianget.

Bentuk dari kegiatan Stimulasi Usaha Perikanan Tangkap ini berupa pemberian hibah barang kepada kelompok masyarakat yaitu Alat Tangkap Bubu, GPS, Fish Finder, Jaring Gondrong dan Jaring Millenium.

Output Kegiatan

Dari anggaran tersebut diatas, jumlah hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat perikanan sebanyak 77 unit kepada 28 kelompok.

Outcome Kegiatan

Dengan bantuan hibah barang yang diberikan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan nelayan dan



terselenggaranya alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

2. Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, sedangkan tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.791.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 202.291.500,- (98,30%).

Adapun bentuk dan lokasi penerima bantuan hibah yaitu :

- Bantuan GPS berlokasi di Kecamatan Arjasa, Kangayan dan Sapeken.
- Bantuan GPS dan Fish Finder berlokasi di Kecamatan Dungkek, Giligenting, Gayam, Arjasa, Kangayan, Masalembu dan Sapeken.

Output Kegiatan

Dari anggaran tersebut diatas, jumlah hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat perikanan sebanyak 28 unit GPS kepada 4 kelompok dan 8 paket GPS dan Fish Finder kepada 8 kelompok.

Outcome Kegiatan

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Alat Bantu Penangkapan Ikan ini, diharapkan kelompok penerima bisa melakukan penangkapan ikan secara efektif dan terarah serta mampu menghemat penggunaan bahan bakar dalam melakukan penangkapan ikan.

3. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Tongkol

Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Tongkol dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, sedangkan tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Anggaran dan Realisasi



Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 95.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.696.000,- (98,93%). Lokasi penerima bantuan hibah di Kecamatan Arjasa, Kangayan dan Sapeken .

Adapun bentuk dari kegiatan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Tongkol yaitu bantuan hibah barang berupa Paket GPS yang diberikan kepada kelompok masyarakat perikanan di Kabupaten Sumenep.

Output Kegiatan

Dari anggaran tersebut diatas, jumlah hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat perikanan sebanyak 29 paket untuk 3 kelompok penerima.

Outcome Kegiatan

Dengan adanya bantuan hibah paket Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Tongkol tersebut, diharapkan kelompok penerima bisa melakukan penangkapan ikan secara efektif dan terarah, selain itu dapat berpengaruh pada peningkatan produksi perikanan tangkap dan pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep.

4. Pengadaan Jaring Gondrong

Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengadaan Jaring Gondrong dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, terutama udang, sedangkan tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.776.000,- (99,89%).

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi penerima bantuan hibah yaitu Kecamatan Arjasa, Kangayan dan Sapeken.



Adapun bentuk dari kegiatan Pengadaan Jaring Gondrong yaitu bantuan hibah barang berupa Paket Jaring Gondrong yang diberikan kepada kelompok masyarakat perikanan di Kabupaten Sumenep.

Output Kegiatan

Dari anggaran tersebut diatas, jumlah hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat perikanan sebanyak 4 paket untuk 4 kelompok penerima.

Outcome Kegiatan

Dengan adanya bantuan hibah paket Pengadaan Jaring Gondrong tersebut, dapat berpengaruh pada peningkatan produksi perikanan serta peningkatan pendapatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Sumenep.

5. Pengadaan Paket Jaring Milenium

Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengadaan Paket Jaring Milenium dimaksudkan untuk mengembangkan perikanan tangkap melalui peningkatan prasarana kelompok nelayan.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk lebih memaksimalkan hasil tangkapan ikan target dan meningkatkan pendapatan nelayan karena sifat jaring millenium yang tidak mudah tersangkut, tahan lama, dan perawatannya mudah.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 214.698.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 214.242.500,- (99,79%).

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi penerima bantuan hibah yaitu Kecamatan Pragaan, Talango, Dungkek, Saronggi dan Kangayan.

Adapun bentuk dari kegiatan Pengadaan Paket Jaring Milenium yaitu bantuan hibah barang berupa Paket Jaring Milenium terdiri dari: Perahu, Mesin dan Jaring Milenium yang diberikan kepada kelompok masyarakat perikanan di Kabupaten Sumenep.

Output Kegiatan



Dari anggaran tersebut diatas, jumlah hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat perikanan sebanyak 5 paket untuk 5 kelompok penerima.

Outcome Kegiatan

Bantuan hibah yang diberikan yaitu berupa satu paket sarana penangkapan ikan terdiri dari Perahu, Mesin Perahu dan Jaring Melinium. Dengan adanya bantuan hibah paket penangkapan ikan tersebut, dapat berpengaruh pada peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sumenep, selain hal tersebut bantuan perahu dapat meningkatkan efisiensi dalam hal penghematan BBM atau biaya operasional penangkapan ikan, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Sumenep.

b. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau

Maksud dan Tujuan

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan contoh dan motivasi dalam rangka mengembangkan produksi budidaya air payau. Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar masyarakat dapat mengembangkan budidaya perikanan air payau sehingga dapat meningkatkan nilai produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran dan Realisasi

Anggaran yang disediakan pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air payau sebesar Rp. 209.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 208.790.000,- atau sebesar 99,90%.

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi dari kegiatan tersebut antara lain :

- Kelompok Sumber Harapan, Desa Pekamban Laok Kecamatan Pragaan;
- Kelompok Mandiri Desa Jaddung Kecamatan Pragaan;
- Kelompok Taman Indah desa Sarokah Kecamatan Saronggi;
- Kelompok Bandung Raya Desa Kertasada Kecamatan Kalianget;



- Kelompok Putra Jaya Desa Kertasada Kecamatan Kalianget;
- Kelompok Usaha Bersama II Desa Gresik Putih Kecamatan Gapura.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian/hibah kepada kelompok masyarakat berupa sarana dan prasarana budidaya bandeng.

Output Kegiatan

Adapun output kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan sarana dan prasarana budidaya bandeng sebanyak 6 paket dengan untuk diberikan kepada 6 (enam) kelompok.

Outcome Kegiatan

Dengan adanya bantuan pengadaan sarana dan prasarana diharapkan dapat meningkat produksi perikanan air payau sehingga muaranya dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengadaan Peralatan Laboratorium Kualitas Air

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas laboratorium untuk mendeteksi kualitas air di media budidaya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas air yang mendukung terhadap produksi perikanan. Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengukur kualitas air di media budidaya ikan.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan pengadaan peralatan laboratorium kualitas air dianggarkan sebesar Rp. 47.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.479.601,- atau mencapai 98,05%.

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Lokasi kegiatan pengadaan peralatan laboratorium kualitas air dilaksanakan pad Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

Output Kegiatan



Output kegiatan pengadaan peralatan laboratorium kualitas air adalah pengadaan sarana dan peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air di media budidaya ikan sebanyak 1 paket

Outcome Kegiatan

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengujian kualitas air pada media budidaya ikan secara intensif diharapkan akan meningkatkan kualitas media budidaya, pencegahan penyakit pada budidaya ikan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produksi budidaya perikanan serta dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar

Maksud dan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perikanan secara perlahan mulai membidik pengembangan sektor budidaya sebagai salah satu program prioritas untuk menambah pendapatan masyarakat.

Salah satu upaya pengembangan budidaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga adalah pengembangan usaha budidaya air tawar (lele) menggunakan kolam terpal karena penggunaan kolam terpal sebagai media Usaha budidaya lele lebih disukai karena lebih ekonomis dari segi biaya, kontrol pakan lebih mudah dan proses panen ikan lebih praktis. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan mampu memenuhi Visi dan misi Bapak Bupati Sumenep untuk meningkatkan hasil produksi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di kabupaten Sumenep.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar ini dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 206.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 206.049.000,- (99,9%).

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yaitu :

- 1) Desa Masaran Kecamatan Bluto;
- 2) Desa Batal Timur Kecamatan Ganding;



3) Desa Juluk Kecamatan Saronggi;

Adapun bentuk dari kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yaitu bantuan hibah barang berupa paket sarana dan prasarana budidaya ikan lele terdiri dari Kolam Terpal Rangka Besi Cor, Bibit Lele, dan pakan yang diberikan kepada kelompok masyarakat perikanan di Kabupaten Sumenep.

Output Kegiatan

Dari anggaran tersebut diatas, jumlah hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat perikanan sebanyak 3 Paket yang diberikan kepada 3 kelompok. Adapun kelompok penerima kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yaitu :

- 1) Kelompok Resto Ibu Desa Masaran, Kecamatan Bluto;
- 2) Kelompok Al-Fatah Desa Bataal Timur, Kecamatan Ganding; dan
- 3) Kelompok Putra Sementani Desa Juluk, Kecamatan Saronggi.

Outcome Kegiatan

Bantuan Fasilitas Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Lele) dapat meningkatkan produksi ikan air tawar di Kabupaten Sumenep. Hal ini karena pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Sumenep terkendala kelengkapan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang sesuai teknis pembudidayaan ikan yang baik. Peningkatan produksi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kabupaten Sumenep.

4. Fasilitasi Operasional Balai Benih Ikan

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan fasilitasi operasionalisasi balai benih ikan adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana benih ikan dengan tujuan untuk memproduksi benih ikan.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan fasilitasi operasional balai benih ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,0 dan terealisasi sebesar Rp. 196.623.350,- atau mencapai 98,31%.

Lokasi dan Bentuk Kegiatan



Lokasi kegiatan tersebut ditempatkan di lingkungan kantor Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep. Adapun bentuk dari kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana beserta operasional untuk UPTD Balai Benih Ikan.

Output Kegiatan

Dari anggaran tersebut didapatkan output berupa 1 (satu) paket sarana dan prasarana beserta operasional Balai Benih Ikan.

Outcome Kegiatan

Dengan dilaksanakannya kegiatan fasilitasi operasional balai benih ikan diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat akan pemenuhan bibit ikan yang diproduksi oleh UPTD Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Udang Vanamei Sistem Intensif

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan memberikan rangsangan motivasi kepada masyarakat pembudidaya udang melalui peningkatan sarana dan prasarana budidaya udang vanamei sistem intensif sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi maupun kualitas yang dihasilkan. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana budidaya udang vanamei sistem intensif dengan pagu anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 209.670.000,- atau mencapai 99,8%

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan diantaranya :

- a. Kelompok Kelapa Muda Kecamatan Dungkek;
- b. Kelompok Bunga Teratai Kecamatan Dungkek;
- c. Kelompok Rembulan Kecamatan Dungkek;
- d. Kelompok Al-Hidayah Kecamatan Dungkek.



Bentuk kegiatan Pengadaan Sarana Tambak Ikan/Udang yaitu bantuan hibah barang berupa Paket Sarana Tambak Ikan/Udang Sistem Semi Intensif.

Output Kegiatan

Dari anggaran tersebut diatas, jumlah hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat perikanan sebanyak 4 paket untuk 4 kelompok penerima

Outcome Kegiatan

Dengan terlaksananya kegiatan Pengadaan Sarana Tambak Ikan/Udang maka :

- Sarana dan prasarana bagi pembudidaya udang vannamei semi intensif dan sistem busmetik bisa tersedia;
- Meningkatnya produksi udang vannamei 7.000 kg/siklus atau 2.800.000 kg/tahun.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya Kecil

1. Fasilitasi Pengolahan Hasil Perikanan

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan perencanaan konstruksi ICS sehingga nantinya pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan pasca konstruksi sesuai dengan yang di tergetkan

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan fasilitasi pengelolaan hasil perikanan dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar RP. 171.650.000,- .

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan fasilitasi pengolahan hasil perikanan bertempat di Desa Longos Kecamatan Gapura.

Output Kegiatan

Terselenggaranya dokumen acuan tentang dana konstruksi ICS sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ICS.

Outcome Kegiatan



Terbangunnya ICS diharapkan memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus dapat meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan fasilitasi daya saing produk perikanan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan tata cara tentang pengelolaan ICS.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.616.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.616.000,- atau terserap sebesar 100%.

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Lokasi kegiatan tersebut adalah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dengan bentuk kegiatan studi banding tentang tata cara pengelolaan ICS.

Output Kegiatan

Terlaksananya fasilitasi bidang pengolahan hasil perikanan dan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan ICS

Outcome Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan bahwa ICS dapat dikelola dengan baik dan dapat mendukung kegiatan pengolahan perikanan masyarakat.

3. Fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan fasilitasi sertifikat hak atas tanah nelayan adalah memberikan fasilitasi pemenuhan hak nelayan berkaitan dengan sertifikat tanah.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.000.000 atau terserap sebesar 100%.

Lokasi dan Bentuk Kegiatan



Adapun lokasi kegiatan adaah sebagai berikut :

- Desa Gadur Kecamatan Batuputih sebanyak 25 bidang;
- Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan sebanyak 25 bidang;
- Desa Dungkek dan Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek sebanyak 25 bidang;
- Desa Gadugan Kecamatan Giligenting sebanyak 25 bidang.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah fasilitasi pemenuhan sertifikat tanah nelayan sebanyak 100 (seratu) bidang tanah pada 4 (empat) Kecamatan.

Outcame Kegiatan

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut masyarakat nelayan terlingdungan atas hak-hak tanah nelayan.

4. Fasilitasi Asuransi Nelayan dan Pembudidaya

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Fasilitasi Asuransi Nelayan yaitu untuk Peningkatan perlindungan dan keselamatan mengingat tingkat resiko dan kerawanan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik maupun kematian sangat tinggi.

Tujuan dari kegiatan ini disamping untuk memfasilitasi pembuatan Kartu Nelayan dan Asuransi Nelayan serta proses klaim kecelakaan kerja/kematian Asuransi Nelayan sebagai upaya pemeringkatan untuk melakukan perlindungan nelayan dan keluarganya melalui pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan Fasilitasi Asuransi Nelayan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.023.200,- (99,02%).

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun Lokasi Kegiatan yaitu Kecamatan Dungkek, Bluto, Pragaan, Kalianget, Ambunten, Saronggi, Gapura, Dasuk, Gayam, Sapeken dan Kangayan.



Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, verifikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap dampak dan manfaat adanya nelayan dan asuransi bagi masyarakat nelayan.

Output Kegiatan

Tersalurkannya 6.167 polis asuransi nelayan.

Outcome Kegiatan

Terealisasinya pembuatan Kartu Nelayan, Asuransi maupun proses klaim kematian bagi para nelayan di Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut memberikan proteksi sosial kepada masyarakat nelayan, sehingga apabila ada musibah yang menimpa masyarakat nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan akan mendapatkan asuransi bagi yang bersangkutan. Asuransi tersebut sangat meringankan beban bagi nelayan yang terkena musibah, bahkan apabila meninggal dunia keluarga yang ditinggalkan tidak menanggung biaya apapun serta mendapatkan tambahan modal untuk usaha mempertahankan kehidupannya.

Jumlah Pertumbuhan Produksi Sumberdaya Laut lainnya/
Rumput Laut

Meskipun hasil produksi rumput laut melebihi target kinerja yang ada akan tetap kewenangan Pemerintah Kabupaten tidak dapat mengintervensi secara langsung dengan program dan kegiatan dari dana APBD.

d. Program Pengembangan Informasi dan Promosi Perikanan

1. Sosialisasi FORIKAN dan GEMARI

Maksud dan Tujuan

Forum Komunikasi Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan gerakan memasyarakatkan makan Ikan (Gemari) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat kabupaten Sumenep sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumberdaya manusia karena secara medis konsumsi ikan dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan serta meningkatkan nilai ekonomis produksi perikanan yang diharapkan berpengaruh pada



pertumbuhan ekonomi serta mendukung tercapainya pangan dan mempersiapkan generasi Emas Indonesia tahun 2050. Kegiatan ini sebagai ajang informasi dan promosi berbagai macam produk olahan yang berbahan dasar ikan melalui lomba cipta menu, hal ini menjadi penting untuk di publikasikan guna meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi makan ikan sehingga konsumsi makan ikan di Kabupaten Sumenep diharapkan semakin meningkat.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan Sosialisasi FORIKAN dan GEMARI yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep dengan Anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.999.900,- (99,99%).

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosilaisai FORIKAN dan GEMARI dilaksanakan di lokasi antara lain :

- Sosialisasi Forikan Tingkat Kecamatan diadakan di Kecamatan Manding;
- Desa Longos Kecamatan Gapura yang bertempat di lingkungan Bangunan ICS;
- Forikan Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep;
- Forikan Tingkat Nasional yang di adakan di Jakarta Convention Centre Jakarta.

Output Kegiatan

Termotivasinya masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan.

Outcome Kegiatan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta nilai ekonomis produksi perikanan yang diharapkan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan diadakannya Kegiatan Sosialisasi FORIKAN dan GEMARI dapat memberikan informasi dan promo berbagai macam prodak olahan yang berbahan dasar ikan. Hal ini menjadi penting untuk di publis



guna meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi makan ikan.

2. Festival Nelayan

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan festival nelayan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kearifan loka serta melestarikan budaya masyarakat nelayan sekaligus meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Sumenep.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 75.000.000,- (100%).

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan festival nelayan diadakan di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Output Kegiatan

Terselenggaranya Festival nelayan yang berdampak pada pelestarian budaya masyarakat nelayan.

Outcome Kegiatan

Adapun dampak dari kegiatan tersebut adalah disamping untuk pelestarian budaya masyarakat nelayan diharapkan pula adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui promosi wisata budaya masyarakat nelayan.

e. Program Perlindungan dan Pengendalian Usaha Perikanan

1. Sosialisasi Kelengkapan Dokumen Usaha Perikanan

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan sosialisasi kelengkapan dokumen usaha perikanan adalah untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha bidang perikanan dalam hal kelengkapan dokumen usaha sehingga nantinya memberikan perlindungan dan pengendalian operasional usaha perikanan yang dijalankan.

Anggaran dan Realisasi



Pelaksanaan kegiatan tersebut mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 11.126.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.126.000,- atau terserap sebesar 100%.

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan adalah Kecamatan Batang-batang, Saronggi, Talango, Gapura, Kalianget, Pragaan, Saronggi dan Bluto.

Output Kegiatan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali di 8 (delapan) Kecamatan.

Outcome Kegiatan

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan perlindungan kepada pengusaha bidang perikanan sehingga nantinya mampu meningkatkan produksi baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

f. Program Pengembangan Kelembagaan Perikanan

1. Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS)

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Pengawas Perikanan (POKMASWAS) adalah mengembangkan kelembagaan POKMASWAS perikanan sehingga dapat meningkatkan peranan lembaga tersebut di masyarakat.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.771.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.621.000,- atau terserap sebesar 99,69%.

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Dungkek, Kalianget, Gayam dan Kanganayan.

Adapun bentuk kegiatan adalah pemberdayaan dan pembentukan Kelompok Masyarakat pengawas Perikanan (POKMASWAS).



Output Kegiatan

Aoutput dari kegiatan tersebut adalah melakukan pembinaan kepada 3 kelompok POKMASWAS dan pembentukan kelompok POKMASWAS baru.

Outcame Kegiatan

Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak penting terhadap hasil produksi perikanan masyarakat.

2. Inventarisasi dan Pembinaan Kelompok Perikanan

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan inventarisasi dan pembinaan kelompok perikanan adalah pemberdayaan kelompok perikanan melalui pembinaan dan pengembangan kelompok perikanan sehingga kelompok perikanan mendapatkan perlindungan usaha perikanan melalui badan hukum.

Anggaran dan Realisasi

kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.937.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.171.800,- atau terserap sebesar 49,27%

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Lokasi kegiatan dilakukan pada kelompok perikanan di seluruh Kabupaten Sumenep. Sedangkan bentuk kegiatan adalah pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok perikanan untuk berbadan hukum.

Output Kegiatan

Adapun output kegiatan adalah melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap 227 kelompok perikanan.

Outcame Kegiatan

Kegiatan tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan perlindungan terhadap kelompok perikanan itu sendiri.

g. Program Pengembangan Wirausaha Muda

Sarana Penangkapan Ikan untuk Wirausaha Muda Bidang Perikanan

Maksud dan Tujuan



Maksud dan tujuan kegiatan Sarana Penangkapan Ikan untuk Wirausaha Muda Bidang Perikanan adalah untuk mencetak wirausahawan muda baru yang handal, terlatih baik dari segi teknis maupun manajemen usaha di bidang perikanan guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan Sarana Penangkapan Ikan untuk Wirausaha Muda Bidang Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 349.714.000,- (99,92%).

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Belanja Festival Sarana Penangkapan Ikan untuk Wirausaha Muda yaitu :

- 1) Kategori I : Kec. Arjasa (Klp. Ikan Terbang, Ds. Arjasa);
- 2) Kategori II : Kec. Kangayan (Klp Hasil Laut, Ds. Kangayan);
- 3) Kategori III : Kec. Kangayan (Klp. Sahabat Laut, Ds. Kangayan);
- 4) Kategori Harapan I : Kec. Arjasa (Klp Pamajangan, Ds. Kalisangka);
- 5) Kategori Harapan II : Kec. Arjasa (Klp Ikan Segar, Ds. Pajennangger);
- 6) Kategori Harapan III: Kec. Arjasa (Klp Petik Ikan, Ds. Arjasa).

Bentuk kegiatan Sarana Penangkapan Ikan untuk Wirausaha Muda Bidang Perikanan yaitu Juara I, II dan III berupa Perahu, Mesin dan Jaring Millenium, sedangkan Juara Harapan I, II dan III berupa Perahu, Mesin dan Jaring Gondrong yang diserahkan kepada wirausahawan baru yang telah mendapatkan pelatihan di Kabupaten Sumenep.

Output Kegiatan

Dari anggaran tersebut diatas, jumlah hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat perikanan sebanyak 6 paket untuk 6 kelompok penerima.

Outcome Kegiatan



Dari kegiatan ini dapat terbentuk wirausahawan baru yang mengembangkan usaha bidang perikanan tangkap sehingga produksi perikanan tangkap dapat meningkat dan sekaligus memberikan lapangan pekerjaan bagi wirausahawan muda.

- h. Program pengembangan kelembagaan perikanan dengan kegiatan fasilitasi teknis dan kelembagaan kelompok usaha masyarakat perikanan.

Kegiatan Fasilitasi Teknis dan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat Perikanan

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan memberikan fasilitas untuk menunjang kegiatan PUGAR dari Kemenerian Kelautan dan Perikanan sehingga diharapkan produksi garam rakyat dapat meningkat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petambak garam. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melancarkan kegiatan kelompok PUGAR dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggaran dan Realisasi

Kegiatan Fasilitasi Teknis dan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat Perikanan yang bersumber dari APBN dengan Anggaran sebesar Rp. 184.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 179.266.750,- atau sebesar (97,42%).

Lokasi dan Bentuk Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan Fasilitasi Teknis dan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat Perikanan yaitu kelompok Garam Manjur Desa Jungkat Kecamatan Ra'as

Bentuk dari kegiatan Fasilitasi Teknis dan Kelembagaan Kelompok usaha Masyarakat Perikanan yaitu pembinaan dan pendampingan teknis usaha lembaga kelompok dan sistem pengadministrasian dalam kelompok.

Output Kegiatan

Terselenggaranya pembinaan administrasi dan teknis kepada lembaga usaha masyarakat binaan Dinas Perikanan kabupaten Sumenep.

Outcome Kegiatan



Terbantunya kelompok menjadi kelompok yang mandiri dan dinamis serta terbentuknya koperasi yang asal mulanya dari kelompok-kelompok kecil dan tidak berbadan hukum.

MISI 3

TUJUAN 2.

SASARAN 3.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan untuk mencapai indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Peningkatan Kualitas Gizi Pangan Daerah dan Penurunan Daerah Rawan Gizi didukung dengan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, Optimalisasi Ketahanan Pangan, Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Peningkatan Gizi dan Konsumsi Pangan Masyarakat. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator kualitas gizi pangan daerah dan daerah rawan gizi sebagai salah satu pendukung indikator kinerja sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan meraih keberhasilan.
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan untuk mencapai indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Peningkatan Kualitas Gizi Pangan Daerah dan Penurunan Daerah Rawan Gizi didukung dengan kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator kualitas gizi pangan daerah dan daerah rawan gizi sebagai salah satu pendukung indikator kinerja sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan meraih keberhasilan.



MISI 4

TUJUAN 1.

SASARAN 1.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan pelaksanaan Musrenbang RKPD dan penyusunan Rancangan RKPD.

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat akomodasi dokumen perencanaan terhadap usulan yang bersifat bottom up (berasal dari masyarakat)

Pada Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2018 usulan dari tingkat desa (bottom up) yang diajukan adalah sebanyak 9650 usulan, dari jumlah usulan tersebut yang dapat diakomodir dalam RKPD adalah sebanyak 2.957 usulan atau sebesar 30%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 26%.

MISI 4

TUJUAN 1.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan yang mendukung : Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan pelaksanaan Musrenbang RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan PPAS.



Keselarasan antar dokumen dinilai dari seberapa besar jumlah kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD, dianggarkan pada dokumen PPAS untuk kegiatan yang sama.

Pada Dokumen RKPD tahun 2018 terdapat 3.716 kegiatan yang ditetapkan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut terdapat 2.898 kegiatan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam dokumen PPAS. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran terkait konsistensi kegiatan sebesar 30%.



Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut:

➤ Belanja Tak Langsung

Belanja Tak Langsung dianggarkan sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk menghasilkan OUTPUT yang direncanakan yang di gunakan untuk Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan khusus PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sbb :

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)

Anggaran	= Rp. 2.725.026.253,00
Realisasi	= Rp. 2.638.126.033,00 (96,81%)
Sisa	= Rp. 86.900.220,00

➤ Belanja Langsung

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam APBD Th 2018 direncanakan sebesar Rp. 463.137.400,00



terrealisasi sebesar Rp. 416.243.551,00 atau 89,97% terdiri dari kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 4.140.000,00

Realisasi : Rp. 4.139.325,00 (99.98%)

Sisa : Rp. 675,00

✓ Output / Keluaran : Surat Menyurat

✓ Outcome / Hasil :

1. Lancarnya surat menyurat.

2. Tertibnya pengadministrasian dan Pengarsipan.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 124.500.000,00

Realisasi : Rp. 110.285.341,00 (88,58 %)

Sisa : Rp. 14.214.659,00

Digunakan membayar rekening listrik, rekening telpon/komunikasi dan rekening air besaran tagihan tergantung volume pemakaian, dengan rincian:

1. Tagihan rekening listrik per bulan sebesar Rp.8.339.000,00

2. Tagihan rekening telpon/komunikasi per bulan Rp.2.411.000,00

✓ Output / Keluaran :

1. Rekening Listrik/Penerangan.

2. Rekening Telpon/Komunikasi.

✓ Outcome / Hasil :

1. Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

2. Terwujudnya sistem pelaporan secara online dan cepat.

3. Terciptanya Keindahan Kantor.

4. Terciptanya Penerangan dan Keamanan Kantor

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 10.214.000,00



Realisasi : Rp. 10.088.400,00 (98,77%)

Sisa : Rp. 125.600,00

Digunakan untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang menyesuaikan dengan STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang selama Tahun 2018 untuk Mobil Roda 4 sebanyak 4 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 40 buah..

✓ Output / Keluaran :

1. STNK Roda Dua
2. STNK Roda Empat

✓ Outcome / Hasil :

1. Tercapainya jasa pemeliharaan dan perijinan/ perpanjangan STNK Kendaraan Dinas tiap tahun.
2. Terciptanya kesadaran dalam kewajiban membayar pajak dalam upaya peningkatan pendapatan sektor pajak daerah.

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 6.450.000,00

Realisasi : Rp. 5.161.875,00 (80,03%)

Sisa : Rp. 1.288.125,00

✓ Output / Keluaran :

Kelancaran Pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan

✓ Outcome / Hasil :

1. terselesainya administrasi keuangan secara tepat waktu.
2. Peningkatan penyajian data yang akuntabel

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 47.900.000,00

Realisasi : Rp. 46.823.700,00 (97,75%)

Sisa : Rp. 1.076.300,00

✓ Output / Keluaran :

Kebersihan dan keindahan lingkungan kantor

✓ Outcome / Hasil :



1. Terciptanya keindahan dan kebersihan peralatan, lingkungan dan gedung kantor.
 2. Peningkatan kenyamanan aparatur dalam bekerja dalam upaya peningkatan kinerja aparatur.
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi
Anggaran : Rp. 33.504.400,00
Realisasi : Rp. 28.941.100,00 (86,38%)
Sisa : Rp. 4.563.300,00
 - ✓ Output / Keluaran :
Alat Tulis Kantor
 - ✓ Outcome / Hasil :
 1. Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam rangka kelancaran administrasi pelaksanaan tugas
 2. Tersusunnya tata kearsipan secara baik.
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi
Anggaran : Rp. 12.150.000,00
Realisasi : Rp. 3.455.000,00 (28,44%)
Sisa : Rp. 8.695.000,00
 - ✓ Output / Keluaran :
Barang Cetak dan Penggandaan/Foto Copy
 - ✓ Outcome / Hasil :
 1. Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.
 2. Tersedianya format sesuai dengan tata naskah.
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi
Anggaran : Rp. 5.175.000,00
Realisasi : Rp. 1.614.000,00 (31,19%)
Sisa : Rp. 3.561.000,00



- ✓ Output / Keluaran :
Terpenuhinya Penerangan dilingkungan kantor.
 - ✓ Outcome / Hasil :
 1. Terpenuhinya Penerangan dilingkungan kantor.
 2. Terciptanya Keindahan dan Keamanan dilingkungan kantor.
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi
Anggaran : Rp. 28.800.000,00
Realisasi : Rp. 25.385.000,00 (88,14%)
Sisa : Rp. 3.415.000,00
 - ✓ Output / Keluaran :
Surat Kabar/Media Cetak.
 - ✓ Outcome / Hasil :
 1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur.
 2. Merangsang/menumbuhkan minat baca aparatur disaat jam istirahat maupun disaat tidak ada kegiatan.
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi
Anggaran : Rp. 46.200.000,00
Realisasi : Rp. 36.398.010,00 (78,78%)
Sisa : Rp. 9.801.990,00
 - ✓ Output / Keluaran :
Makanan dan Minuman Rapat.
 - ✓ Outcome / Hasil :
 1. Tercapainya peningkatan kinerja aparatur.
 2. Tersedianya konsumsi pada saat pelaksanaan rapat.
- 11) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi
Anggaran : Rp. 121.109.000,00
Realisasi : Rp. 121.001.800,00 (99,91%)
Sisa : Rp. 107.200,00
 - ✓ Output / Keluaran :



Pertemuan (Rapat, Konsultasi & Koordinasi) ke luar daerah

✓ Outcome / Hasil :

1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program.
2. Terciptanya penyamaan persepsi dan tercapainya keselarasan program lintas sektor.
3. Peningkatan pelaksanaan kegiatan.

12) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 22.995.000,00

Realisasi : Rp. 22.950.000,00 (99,80%)

Sisa : Rp. 45.000,00

✓ Output / Keluaran :

Perjalanan Dinas lingkup Kabupaten Sumenep

✓ Outcome / Hasil :

1. Tercapainya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program.
2. Terciptanya penyamaan persepsi dan tercapainya keselarasan program dengan Kecamatan dan Desa.
3. Untuk mengetahui permasalahan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan.

13) Pameran Pembangunan

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 46.821.300,-

Realisasi : Rp. 24.521.800,- (52,37%)

Sisa : Rp. 22.299.500,-

Untuk pameran pembangunan hari jadi alihkan ke pawai mobil hias bunga.

✓ Output / Keluaran : Pawai mobil hias bunga

✓ Outcome / Hasil :

1. Memasyarakatkan agar masyarakat cinta kepada bunga hidup (menanam)
2. Kabupaten Sumenep sebagai kota cinta kepada bunga..

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada TA 2018 direncanakan sebesar Rp. 147.823.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 126.067.182,00 atau 85,28% yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 34.371.000,00

Realisasi : Rp. 33.830.750,00 (98,43%)

Sisa : Rp. 540.250,00

Sisa Anggaran tersebut merupakan sisa dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor

✓ Output / Keluaran :

1. Bahan Bangunan

2. Jasa Tukang

✓ Outcome / Hasil :

1. Terwujudnya keindahan kantor

2. Peningkatan keamanan kantor

3. Menumbuhkan kenyamanan aparatur dalam pelaksanaan tugas kantor

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 96.952.000,00

Realisasi : Rp. 80.928.932,00 (83,47%)

Sisa : Rp. 16.023.068,00

Digunakan untuk penggantian suku cadang dan pembelian bahan bakar minyak.

✓ Output / Keluaran :

1. Bahan Bakar Minyak

2. Suku Cadang

✓ Outcome / Hasil :

1. Terpeliharanya kendaraan dinas.

2. Peningkatan Kinerja Aparatur dalam pelaksanaan tugas

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor



✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 16.500.000,00

Realisasi : Rp. 11.307.500,00 (68,53%)

Sisa : Rp. 5.192.500,00

✓ Output / Keluaran :

1. Pemeliharaan AC

2. Pemeliharaan Komputer dan Printer

✓ Outcome / Hasil :

1. Terciptanya pemeliharaan rutin Peralatan Kantor.

2. Terciptanya kelestarian dalam upaya pemeliharaan aset-aset barang milik pemerintah daerah

3. Peningkatan Kerja Aparatur dan lancarnya dalam pelaksanaan tugas

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program tersebut pada TA 2018 direncanakan sebesar Rp. 19.550.000,00 terrealisasi sebesar 19.408.875,00 atau 99,28% yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 4.350.000,00

Realisasi : Rp. 4.344.775,00 (99,88%)

Sisa : Rp. 5.225,00

✓ Output / Keluaran :

1. Pelaporan Triwulanan

2. Pelaporan Prognosis

✓ Outcome / Hasil :

1. Terelesaikannya Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan.

2. Terlaksananya perkiraan Prognosis enam bulan berikutnya dari aspek realisasi anggaran.

3. Peningkatan kinerja pegawai didalam penyusunan administrasi pelaporan.



2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 2.300.000,00

Realisasi : Rp. 2.295.000,00 (99,78%)

Sisa : Rp. 5.000,00

✓ Output / Keluaran :

Pelaporan Akhir Tahun

✓ Outcome / Hasil :

1. terselesaikannya Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun secara tepat dan akurat.

2. Peningkatan kinerja pegawai didalam penyusunan administrasi pelaporan.

3. Penyusunan Penetapan Kinerja

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 3.300.000,00

Realisasi : Rp. 3.300.000,00 (100,00%)

Sisa : Rp. Nihil

✓ Output / Keluaran :

Penyusunan Lakip

✓ Outcome / Hasil :

1. terselesaikannya Penyusunan Lakip secara tepat dan akurat.

2. Peningkatan kinerja pegawai didalam penyusunan administrasi pelaporan kinerja pemerintahan.

4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran : Rp. 2.300.000,00

Realisasi : Rp. 2.289.550,00 (99,55%)

Sisa : Rp. 10.450,00,-

✓ Output / Keluaran :

1. Penyusunan LPPD

2. Penyusunan LKPJ

✓ Outcome / Hasil :



1. terselesaikannya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) secara tepat dan akurat.
 2. Peningkatan kinerja pegawai didalam penyusunan administrasi pelaporan.
5. Penyusunan RKA dan DPA
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi
 - Anggaran : Rp. 7.300.000,00
 - Realisasi : Rp. 7.179.550,00 (98,35%)
 - Sisa : Rp. 120.450,00
 - ✓ Output / Keluaran :
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
 - ✓ Outcome / Hasil :
 1. terselesaikannya Rencana Kerja Anggaran tahun berikutnya secara tepat waktu.
 2. Peningkatan kinerja pegawai didalam penyusunan administrasi perencanaan anggaran dan kinerja.
- d. Program Peningkatan Informasi Pembangunan
- Direncanakan pada TA 2018 sebesar Rp 44.305.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 19.800.000,00 atau 44,69 yang digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi
 - Anggaran : Rp. 44.305.000,00
 - Realisasi : Rp. 19.800.000,00 (44,69%)
 - Sisa : Rp 24.505.000,-
 - Untuk pameran pembangunan daerah diletakkan di Kecamatan Kandangan .
 - ✓ Output / Keluaran : Perkenalan Produk Unggulan melalui BUMDesa
 - ✓ Outcome / Hasil : Pertumbuhan Ekonomi Desa melalui BUMDesa
- e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada TA 2018 direncanakan sebesar Rp. 12.371.184.550,00 terrealisasi sebesar Rp. 10.465.920.077,00 atau 84,60% yang digunakan untuk :

1) Gelar Teknologi Tepat Guna

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 70.000.000,00

Realisasi : Rp. 17.572.650,00 (25,10%)

Sisa DPA : Rp. 52.427.350,00

Gelar Teknologi Tepat Guna direncanakan akan dilaksanakan Bali agenda Nasional, karena anggaran tidak cukup sesuai pengarahannya DPMD Jatim, maka kegiatan tersebut diadakan di Daerah Gedung Nasional Indonesia Kabupaten Sumenep

✓ Output / Keluaran :

Pemasaran Produk Unggulan melalui BUMDesa

✓ Outcome / Hasil : Peningkatan Pendapatan bagi UKM melalui BUMDesa

2) Jalin Matra

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 91.793.950,00

Realisasi : Rp. 63.725.600,00 (69,42%)

Sisa DPA : Rp. 28.068.350,00

✓ Output / Keluaran :

Kesuksesan Penyaluran Dana Penanggulangan Kemiskinan untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

✓ Outcome / Hasil :

✓ Transparansi Penyaluran Dana untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
Anggaran Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur) adalah Biaya Administrasi untuk kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dan Bantuan Keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin



(RTSM) dengan adalah Program Provinsi Jawa Timur untuk penanggulangan feminisasi kemiskinan dan Rumah Tangga Sangat Kemiskinan (RTSM) :

- a. Bantuan untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) sebanyak 815 KRTP @ Rp. 2.500.000,- sejumlah Rp.2.037.500.000,- yang digunakan untuk menjalankan usaha dlm rangka peningkatan ekonomi keluarga bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan Produktif (KRTP).
- b. Bantuan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 207 Orang RTSM @ Rp. 2.500.000,- sejumlah Rp. 517.500.000,- yang digunakan untuk usaha produktif dalam rangka peningkatan aset usaha/pendapatan keluarga.

Rincian detail Program JALIN MATRA sebagaimana terlampir

3) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 10.000.000,00

Realisasi : Rp. 7.517.000,00 (75,17%)

Sisa DPA : Rp. 2.483.000,00

✓ Output / Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

✓ Outcome / Hasil : Peningkatan Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas:

4) Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 35.800.000,00

Realisasi : Rp. 31.383.077,00 (87,66%)

Sisa DPA : Rp. 4.416.923,00

✓ Output / Keluaran : Tersedianya alat TTG sederhana dan inovatif

✓ Outcome / Hasil : Proses produksi dan beban kerja POKMAS lebih efektif.



Program Inovasi Teknologi Tepat Guna dilaksanakan dengan kerjasama dengan SMK Negeri 1 Kalianget untuk pembuatan alat pengiris kripik singkong dan alat pengiris kripik pisang sebanyak 2 (dua) unit dengan MOu Dinas PMD dan SMK Negeri I Kalianget Nomor 414.3./210/435.118.4/2018 dengan Nomor 422/569/101.6.31.14/2018

5) Fasilitasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Desa

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 405.740.500,00

Realisasi : Rp. 369.134.100,00 (90,98%)

Sisa DPA : Rp. 36.606.400,00

✓ Output / Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa dengan aplikasi SISKUDES

✓ Outcome / Hasil : Terwujudnya tertib dan transparan pengelolaan keuangan Desa

Kegiatan Fasiltasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa diikuti oleh 330 operator dari 330 Desa dan tenaga Pendamping Desa dengan Nara Sumber : BPKP Prov Jatim, Dinas PMD Kab.Sumenep dan Inspektorat, pelaksanaan dibagi 10 Angkatan di mulai dari 02 Juli 2018 s/d 10 Agustus 2018 bertempat di Gedung Aula Dinas PMD Kab.Sumenep

6) Pilot Proyek Desa Membangun

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 50.000.000,00

Realisasi : Rp. 20.532.000,00 (41,06%)

Sisa DPA : Rp. 29.468.000,00

✓ Output / Keluaran : Terlaksananya tata kelola administrasi pemerintahan Desa yang optimal

✓ Outcome / Hasil : Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa yang tertib bagi perangkat Desa.



Pelaksanaan Pilot Proyek Desa Membangu di Desa Muangan, Desa Paberasan, Desa Patean, Desa Karanganyar dan Desa Marengan Laok dengan menghadirkan : Perangkat Desa dan BPD dan Nara sumber dari Dinas PMD Kabupaten Sumenep

7) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 1.167.992.000,00

Realisasi : Rp. 936.150.150,00 (80,15%)

Sisa DPA : Rp. 231.841.850,00

✓ Output / Keluaran : Membangun dan Pengembangan Kegiatan TP PKK Kabupaten

✓ Outcome / Hasil : Terlaksananya Administrasi 10 Program Pokok TP PKK Kabupaten

Anggaran TP PKK Kabupaten yang ditempatkan pada Dinas PMD digunakan untuk kelancaran pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kabupaten yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV yang difokuskan pada Pembinaan Administrasi Desa sesuai tugas Kelompok Kerja masing masing

8) Sosialisasi Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 100.000.000,00

Realisasi : Rp. 82.647.000,00 (82,65%)

Sisa DPA : Rp. 17.353.000,00

✓ Output / Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan UP2K PKK Kabupaten Sumenep

✓ Outcome / Hasil : Terbentuknya UP2K PKK Kabupaten Sumenep

Memperkuat kelompok kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga



9) Pemetaan dan Inventarisasi Potensi SD, Peralatan TTG dan Produk Potensi Unggulan Desa Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 104.200.000,00

Realisasi : Rp. 470.500,00 (0,45%)

Sisa DPA : Rp. 103.729.500,00

Kegiatan ini tidak terlaksana karena terkait dengan waktu survey ke lapangan tidak cukup memadai

✓ Output / Keluaran :

✓ Outcome / Hasil :

10) Pemberian Penghargaan Bagi tokoh berprestasi (Sumenep Award)

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 300.000.000,00

Realisasi : Rp. 272.037.100,00 (90,68%)

Sisa DPA : Rp. 27.962.900,00

✓ Output / Keluaran : Penghargaan kepada tokoh yang berprestasi

✓ Outcome / Hasil : Menjadi Inspirasi kepada Masyarakat

Tokoh tokoh yang mendapat penghargaan

1. H. Anshari Desa Longos Kecamatan Gapura Tokoh Pelestari Pencak Silat Tradisional
2. RP. Taufikurrahman (Alm) Jl. Jupiter Perum. Satelit Permai Pabian Sumenep Pencipta Tari Muang Sangkal Katagori Khusus.
3. Fatlillah Jl. Pelabuhan Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Tokoh Aktivistis Pariwisata
4. Ibnu Hajar Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Tokoh Penyair
5. A. Zaini Desa Juluk Kecamatan Saronggi Tokoh Petani Inspiratif



6. Edhi Setiawan Jl. Jenderal Sudirman No 34 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Tokoh Kebudayaan
 7. Untung Dusun Jambangan Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Tokoh Penyandang Disabilitas.
 8. Rosyithah Dusun Tengah Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Tokoh Aktivistis Sosial
 9. H. Qamar Jl. Meranggi Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep Tokoh Pelestari Bahasa Madura.
 10. Ust.Umar Hosnol Dusun Gambu-gambu Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan Tokoh Peduli Pendidikan Kepulauan.
 11. Farida Desa Batang Batang Laok Kecamatan Batang-Batang Toko Pelaku Ekonomi Kerakyatan
 12. Lilik Rosida Irmawati Perum Pesona Satelit Nomor 9 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Tokoh Literasi
 13. Siti Amaniyah Hasyim Dusun Jepun Timur Desa Lenteng Kecamatan Lenteng Tokoh Wanita Inspiratif
 14. Abu Sairi Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Tokoh Aktivistis Kesehatan
 15. Moh. Saleh Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Tokoh Pasukan Kuning
 16. KH. Nasikh Fauzi Ponpes Al-Ihsan Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Tokoh Agama.
 17. K.A. Mutalib Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Tokoh Guru Ngaji
 18. Sannah Desa Rosong Kecamatan Nonggunong Tokoh Pelestari Kerapan Sapi
- f. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan pada TA 2018 direncanakan sebesar Rp. 413.282.750,00 terrealisasi sebesar Rp. 296.986.175,00 atau 71,86% yang digunakan untuk :
- 1) Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)



✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 267.282.750,00

Realisasi : Rp. 206.075.400,00 (77,10%)

Sisa DPA : Rp. 61.207.350,00

✓ Output / Keluaran : Meningkatnya Pengetahuan bagi pengelola BUMDesa

✓ Outcome / Hasil : Meningkatnya pemahaman pelaku BUMDesa

Kegiatan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dengan mengikutkan peserta pengelola BUMDesa sebelum berkunjung ke lapangan diadakan pembekalan di hotel utamai dan diteruskan kunjungan lapangan ke BUMDesa yang berhasil yaitu BUMDesa Mahanani di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah bergerak dalam bidang wisata dan kerajinan pembuatan gitar yang telah dikirim ke luar negeri termasuk tata kelola administrasi yang baik nantinya yang perlu di kaji dan dicontoh oleh peserta BUMDesa dari Kabupaten Sumenep khusus kepulauan antara lain

Kecamatan Ra'as : Desa Tonduk dan Guwa Guwa

Kecamatan Arjasa : Desa Kalikatak dan Desa Duko

Kecamatan Giligenting : Desa Bringsang dan Desa Lombang

Kecamatan Sapeken : Desa Sakala dan Desa Paliat

Kecamatan Gayam : Desa Gayam dan Desa Kalowang

Kecamatan Nonggunong : Desa Sumber dan Desa Sonok

Kecamatan Kangayan : Desa Kangayan dan Daandung

2) Mediasi MOU BUMDes dengan BUMN

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 71.000.000,00

Realisasi : Rp. 47.214.400,00 (66,50%)

Sisa DPA : Rp. 23.785.600,00



✓ Output / Keluaran : Terlaksananya Kerjasama BUMDesa dg BUMN

✓ Outcome / Hasil : Meningkatnya kegiatan Usaha melalui kerjasama antara BUMDesa dan BUMN

Kerjasama yang terlaksana MoU sebanyak 49 BUMDesa dengan PT Bank Rakyat Indonesia cabang Sumenep antara lain :

- a) BUMDesa Permata alamat Desa Marengan Laok
- b) BUMDesa Adinda alamat Dusun Gersik Puti Gapura
- c) BUMDesa Batu Permata alamat Jl. Raya Batuan
- d) BUMDesa Kuda Mas alamat Pertokoan Pasar Ajeng Rara Pasar Paberasan
- e) BUMDesa alamat Junjung Drajad Desa Tambaagung Timur Ambunten
- f) BUMDesa Serdadu alamat Dusun mandala Desa Keles Ambunten
- g) BUMDesa Banyu Urip alamat Dusun Jurang Ara Banuaju Barat
- h) BUMDesa Anugerah alamat Dusun Panjurangan Rt 002/001
- i) BUMDesa Yanfa'u Linnas alamat Jl. raya batang batang Desa Gapura
- j) BUMDesa Sumber Rejeki alamat Jl. Raya Gapura Desa Baban
- k) BUMDesa Kartika Jaya alamat Desa Banuaju Timur Batang-batang
- l) BUMDesa Garuda alamat Jl. Pocok Kramat Desa Billapora Rebba
- m) BUMDesa Mandiri alamat Jl. Raya Pasar Desa Moncek Tengah
- n) BUMDesa Serunai Jingga alamat Dusun Bringsang RT. 001/001 Gili Genting.



- o) BUMDesa Kurma Ajwa alamat Jl. Adirasa Desa Kolor Sumenep
- p) BUMDesa Karya Lestari alamat Dusun Dunggadung Karduluk
- q) BUMDesa Barokah alamat Dusun Perreng Tale Pakamban Daya
- r) BUMDesa Permata alamat Dusun Nong Bunter Sentol Daya
- s) BUMDesa Barokah alamat Dusun Galis Desa Pakamban Laok
- t) BUMDesa Taresnah alamat Dusun Aeng Soka Pragaan Laok
- u) BUMDesa Gema Bangsa alamat Jl. Raya Sumenep Pamekasan Kaduara Timur
- v) BUMDesa Harapan alamat Dusun Sorren RT. 05/02 Desa Masaran
- w) BUMDesa Ratu alamat Desa Kebundadap Barat Saronggi
- x) BUMDesa Sumber Surya alamat Dusun Temor Leke RT. 07/02 Desa Errabu
- y) BUMDesa Mutiara Tanjung alamat Desa Tanjung Saronggi
- z) BUMDesa Permata alamat Jl. Kermata Saronggi
- aa) BUMDesa Pelangi Nusantara Dusun Tarogan RT. 04/01 Lobuk
- bb) BUMDesa Mapan alamat Desa Karanganyar Kalianget
- cc) BUMDesa Tiga Saudara alamat Dusun Sonok Pesisir Nonggunong
- dd) BUMDesa Karaeng alamat Guwa Guwa Ra'as
- ee) BUMDesa Sumber Rejeki alamat Dusun Sumber Nonggunong
- ff) BUMDesa Cindai alamat Desa Tonduk Ra'as
- gg) BUMDesa Seruni alamat Desa Gayam
- hh) BUMDesa Tunas Kelapa Dusun Poran Lanjang



- ii) BUMDesa Pantura Jaya alamat Dusun Bantilan Desa Daandung Kangayan
 - jj) BUMDesa Kangayan Ceria alamat Desa Kangayan
 - kk) BUMDesa Jaya Samudra alamat Dusun Sempong Barat Pasongsongan
 - ll) BUMDesa Benteng Jaya alamat Dusun Benteng Desa Panaongan
 - mm) BUMDesa Purnama alamat Dusun Daja Lorong Rombiya Timur
 - nn) BUMDesa Berkah alamat Dusun Mandala Barat RT. 13/05 Gadu Barat
 - oo) BUMDesa Putri Kencana alamat Dusun Temor Leke Pananggungan
 - pp) BUMDesa Wangi Ganding alamat Dusun Tanah Bentar Barat
 - qq) BUMDesa Harapan alamat Dusun Laok Songai Billapora Barat
 - rr) BUMDesa Al-Muslimin alamat Dusun Manggar RT. 18/08 Gadu Timur
 - ss) BUMDesa Setia Jaya alamat Desa Ketawang Parebaan Ganding
 - tt) BUMDesa Maju Jaya alamat Dusun Bung Kandang Ketawang Laok
 - uu) BUMDesa Harapan Jaya alamat Dusun Kolor Ketawang Larangan
 - vv) BUMDesa Kencana alamat Dusun Kebunan Rombiya Timur
 - ww) BUMDesa Pangesto alamat Desa Bicabbi Dungkek
- 3) Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES)
- ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan
 - Anggaran : Rp. 75.000.000,00
 - Realisasi : Rp. 43.696.375,00 (58,26%)



Sisa DPA : Rp. 31.303.625,00

✓ Output / Keluaran : Terlaksananya Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Perdesaan

✓ Outcome / Hasil : Terjualnya Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES)

Kegiatan ini merupakan Program Kementerian Desa di Jakarta mengundang para Pengusaha yang digunakan untuk mitra dengan Pemerintah Kabupaten melalui BUMDesa untuk bisa membeli produk unggulan yang ada di Daerah diantaranya Pertanian, Peternakan, Perikanan dan kerajinan untuk Kab.Sumenep sudah terjadi Mou antara PT. HQ dengan BUMDESA Moncek Tengah terkait dengan Hasil Panin Jagung yang akan dibeli oleh PT. HQ

g. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa pada TA. 2018 direncanakan sebesar Rp. 151.799.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 113.457.005,00 atau 74,74% yang digunakan untuk :

1) Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 151.799.000,00

Realisasi : Rp. 113.457.005,00 (74,74%)

Sisa DPA : Rp. 38.341.995,00

Output / Keluaran :

Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera

Outcome / Hasil :



Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumenep dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep.

h. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada TA. 2018 direncanakan sebesar Rp. 787.481.000,00 terealisasi sebesar Rp. 589.918.850,00 atau 51,74% yang digunakan untuk :

1) Singkronisasi Dokumen APBDes

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 94.000.000,00

Realisasi : Rp. 48.638.500,00 (51,74%)

Sisa DPA : Rp. 45.361.500,00

✓ Output / Keluaran : Kecocokan Program dan Kegiatan dengan Dokumen Anggaran (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)

✓ Outcome / Hasil : Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)

Kegiatan ini dilakukan oleh TIM dengan cara turun ke Desa melalui Kecamatan dengan cara mencocokkan Dokumen Anggaran dan sambil mengadakan pembinaan.

2) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 388.481.000,00

Realisasi : Rp. 285.598.750,00 (73,52%)

Sisa DPA : Rp. 102.882.250,00

✓ Output / Keluaran : Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan Desa, Pelantikan dan Pembekalan Kepala Desa (PAW)



- ✓ Outcome / Hasil Terwujudnya pelaksanaan pemerintah Desa yang baik, Pelantikan Kepala Desa (PAW) yang memiliki Dasar Hukum dalam melaksanakan pemerintahan di Desa dan mengetahui pengetahuan tentang pemerintahan Desa
 - Pelantikan Kepala Desa Pada Tahun 2018 tidak direncanakan pelaksanaan pelantikan dan pilkades dikarenakan tidak ada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, namun dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) orang Kepala Desa yang diberhentikan tindak pidana korupsi yaitu Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk dan Desa Poteran Kecamatan Talango, Kepala Desa Bantelan Meninggal Dunia sehingga dilaksanakan Pelantikan.
 - Pembekalan Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa berdasarkan hasil pelantikan Kades PAW dengan peserta 15 aparatur Desa.
 - Pembinaan kepada 317 Kepala Desa dan 317 Ketua BPD jumlah peserta 634 orang yang tidak dilaksanakan Kecamatan Ra'as dan Kecamatan Masalermbu
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan APBDDesa
 - ✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan
 - Anggaran : Rp. 105.000.000,00
 - Realisasi : Rp. 83.317.950,00 (79,35%)
 - Sisa DPA : Rp. 21.682.050,00
 - ✓ Output / Keluaran :

Terlaksananya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
 - ✓ Outcome / Hasil :

Meningkatnya kemampuan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.



Metode dan Evaluasi Pengelolaan APBDesa adalah dibentuk TIM terdiri dari 4 Kelompok dan langsung ke Kecamatan di Pendopo 25 Kecamatan mengundang semua kepala Desa dan perangkatnya untuk diberi pembinaan setelah itu dilakukan peninjauan administrasi di Balai Desa. (yang belum dilaksanakan Kec.Masalembu dan Kec.Ra'as) tapi pada waktu Safari Kepulauan diberi pembinaan/

4) Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

✓ Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 200.000.000,00

Realisasi : Rp. 172.363.650,00 (86,18%)

Sisa DPA : Rp. 27.636.350,00

✓ Output / Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pilkades Serentak

✓ Outcome / Hasil : Terwujudnya pemahaman tentang peraturan pelaksanaan PILKADES serentak Thn 2019

Kegiatan sosialisasi PILKADES untuk persiapan pelaksanaan PILKADES Tahun 2019 sebanyak 226 Desa dengan peserta sejumlah 676 peserta terdiri Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat.

Dari program dan kegiatan tersebut diatas telah mendukung terhadap terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan), Pemenuhan / pembangunan sarana dan prasarana, Pengembangan potensi ekonomi lokal serta Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian Pernyataan Kinerja dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan, agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemandirian yang di harapkan.



- b. Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui 4 (empat) akses, yakni :
 - Akses terhadap sumber daya;
 - Akses terhadap teknologi, yakni suatu metode dan teknik pelaksanaan kegiatan dengan cara lebih baik dan lebih efisien, termasuk akses mendayagunakan prasarana dan sarana produksi, dan peningkatan keterampilan berusaha;
 - Akses terhadap informasi pasar dan kemudahan pemasaran hasil usaha; Akses terhadap sumber pembiayaan melalui bantuan dan skim kredit untuk modal usaha ekonomi produktif.
- d. Mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif masyarakat melalui :
 - Keberpihakan dan mendasarkan diri pada kebutuhan dasar masyarakat;
 - Mengembangkan inspirasi, aspirasi, dan partisipasi masyarakat;
 - Menggerakkan dan menghidupkan aktivitas ekonomi rakyat;
 - Pengorganisasian dan penguatan kelembagaan masyarakat yang dikelola dan menjadi penanggung jawab masyarakat sendiri;
 - Bantuan, bimbingan dan pembinaan pemerintah merupakan tanggung jawab dari semua instansi melalui koordinasi dan keterpaduan;
 - Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan di perdesaan dan perkotaan;
 - Pengembangan teknologi tepat guna dengan mengutamakan jenis teknologi padat karya.



MISI 4

TUJUAN 2.

SASARAN 1.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan sistem komunikasi, informasi dan media masa oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa dengan sasaran meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 96.00% didukung oleh kegiatan (output) berupa :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyajian informasi dengan melaksanakan pembuatan kliping informasi pembangunan kabupaten Sumenep sebanyak 12 bendel, 12 album photo dan 4 keping dvd terealisasi dengan baik sebesar 100%
 - b. Peningkatan Komunikasi dan koordinasi dengan media massa sebanyak 30 kegiatan berupa koordinasi dengan seluruh mas media yang ada dikabupaten Sumenep semuanya terealisasi dengan baik atau sebesar 100%.
 - c. Pengembangan Telecenter baik yang berada dikepulauan maupun didaratan yang berjumlah 2 unit dengan kegiatan pelatihan dan bintek komputer sebanyak 3 kali semuanya terealisasi dengan baik sebanyak 3kali kegiatan atau sebesar 100%
 - d. Peningkatan kinerja PDE (Pengelolaan Data Elektronik) adalah kegiatan yang mengelolah data informasi pembangunan sebelum diinformasikan kemasyarakat melalui webside kabupaten Sumenep melalui masing – masing OPD yang sudah terhubung ke web Kabupaten Sumenep dengan 66 OPD semuanya terealisasikan 100%.
 - e. Penyediaan Jasa Komunikasi Internet adalah kegiatan yang menyediakan jasa internet (web) melalui Website Kabupaten Sumenep



di www.sumenepkab.go.id, www.ppid.sumenepkab.go.id dan www.diskominfosumenepkab.go.id yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam menginformasikan semua kegiatan informasi pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep melalui 1 line semuanya bisa terealisasi dengan baik atau sebesar 100%.

- f. Pengembangan Jaringan G-Online dalam hal ini Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sebagai ujung tombak Kabupaten Sumenep dalam menginformasikan informasi pembangunan daerah secara cepat, tepat dan akuntabel harus didukung dengan pengembangan jaringan dan inovasi yang lebih luas dengan terhubungnya semua OPD ke satu server maka pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa cepat teratasi dengan realisasi sebesar 100%.
2. Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi
Mengembangkan sistem informasi keamanan Daerah kabupaten Sumenep dengan adanya perubahan SO yang baru sekarang dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dengan indikator kegiatan persentase persandian daerah yang sudah diamankan dengan target 500 surat masuk dan terealisasi sebesar 100%.
3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Melaksanakan kerjasama informasi dengan media massa tidak bisa lepas dari Dinas Komunikasi dan Informatika karena terkait dengan Informasi Pembangunan Daerah dengan mas media dengan Indikator Persentase media informasi yang dimanfaatkan baik oleh mas media maupun masyarakat yang membutuhkan dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penerbitan Tabloid kominfo. kegiatan ini adalah mencetak tabloid Kominfo berupa berita pembangunan daerah kemudian didistribusikan ke Badan/Dinas/Kantor dan pondok pesantren yang ada di kabupaten Sumenep dari target sebesar 72000exemplar terealisasi sebesar 72000 exemplar atau 100%.



- b. Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan Pertura kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep menampilkan produk-produk unggulan masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan diikuti oleh semua OPD se Kabupaten Sumenep serta pameran pekan keraton adat ASEAN FKMA dengan target 2 kali kegiatan terealisasi sebesar 100%.
- c. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui siaran radio RGS dengan target sebesar 360 hari terealisasi sebesar 360 hari atau sebesar 100%.
- d. Penyebarluasan Informasi Daerah melalui peningkatan Kinerja News Room kegiatan ini adalah peliputan informasi pembangunan Daerah melalui News Room dengan berita – berita yang ter Up Date dengan didukung oleh petugas reporter yang handal sehingga berita atau informasi yang diorbitkan enak dibaca dan difahami oleh masyarakat dengan target 2500 exemplar semuanya dapat terealisasi sebesar 100%.
- e. Penyebarluasan Informasi Daerah melalui penyelenggaraan penerangan mobile dikegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas penerangan informasi melalui siaran mobile keliling dari target yang ditentukan sebanyak 60 kali dapat terealisasi sebanyak 60 kali atau 100%.
- f. Penyebarluasan Informasi Daerah melalui Pentas hiburan dan Informasi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pentas hiburan yang didalamnya diselingi informasi-informasi pembangunan daerah melalui pentas seni atau ludruk kegiatan ini ditargetkan sebanyak 5 kali kegiatan dengan realisasi sebanyak 5 kali atau 100%.
- g. Koordinasi pengumpulan Data dan Penggandaan Statistik daerah dikegiatan ini karena baru dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika setelah adanya perubahan SO kegiatan ini dilaksanakan dengan target sebesar 150 buku Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka yang bisa terealisasi sebesar 150 buku yang disebar



ke Dinas/Kantor dan Kecamatan dalam Kabupaten Sumenep dengan realisasi sebesar 100%.

MISI 4

TUJUAN 2.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Kualitas Layanan Kependudukan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

Untuk mencapai indikator Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP didukung oleh kegiatan antara lain memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el, tugas pencetakan KTP-el didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri menangani pengadaan blanko KTP-el, memantau dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melibatkan unsur dari Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Program ini ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2020, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik.

b. Kegiatan Penyelesaian Dokumen KK dan KTP

Untuk mencapai indikator Persentase Penerbitan Kartu Keluarga didukung oleh kegiatan antara lain penggantian penerbitan KK dari model lama ke model baru serta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus dilakukan untuk mengingatkan kepada



masyarakat tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang akurat dan valid selain untuk pemanfaatan pribadi juga untuk validitas data kependudukan daerah dan nasional.

c. Kegiatan Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran

Buku register akta kelahiran disusun secara periodik untuk mengetahui dan untuk digunakan bagi masyarakat yang dokumen Akta Pencatatan Sipil yang hilang agar dapat diterbitkan kembali karena akta kelahiran berlaku seumur hidup

MISI 4

TUJUAN 3.

SASARAN 1.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam mewujudkan Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusiabadan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Bagian Pemerintahan Umum Setda dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumenep didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Penyediaan Data Informasi Kepegawaian dengan Output : 183 Buku
- Validasi Data Kepegawaian Kepegawaian dengan Output : 9.269 ASN
- Penyusunan Tata Naskah Kepegawaian Elektronik Kepegawaian dengan Output : 2.300 Berkas
- Pembangunan Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Bersertifikasi ISO 9001 : 2008 dengan Output : 1 Paket
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAGA) dengan Output : 59 OPD
- Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN) dengan Output : 161 OPD



2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah dengan Output : 248 Orang
 - Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II bagi Pejabat Eselon II PNS Daerah dengan Output : 6 Orang
 - Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS Daerah dengan Output : 30 Orang
 - Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah dengan Output : 40 Orang
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah dengan Output : 50 Orang
 - Diklat Pengelolaan Pariwisata Daerah dengan Output : 40 Orang
 - Capacity Building dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM Organisasi dengan Output : 75 Orang
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Evaluasi dan Pelaporan BAPERJAKAT dengan Output : 6
 - Pelaksanaan Pengangkatan Sumpah/Janji PNS dengan Output : 250 Orang
 - Proses Administrasi Pensiun PNS dengan Output : 442
 - Proses Pengangkatan CPNS Menjadi PNS dengan Output : 250 Orang
 - Proses Peninjauan Masa Kerja PNS dengan Output : 20 Orang
 - Penyerahan SK Pensiun PNS secara Simbolis dengan Output : 250 Orang
 - Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Output : 40 Orang
 - Pelantikan Pejabat Struktural Dan Fungsional dengan Output : 600 Orang
 - Seleksi Penerimaan Calon PNS dengan Output : 372 Formasi



- Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dengan Output : 30 Kasus
- Proses Pelaporan LHKPN dengan Output : 39 Orang
- Proses Pengisian dan Penyampaian LP2P dengan Output : 6.000 Orang
- Proses Penyelesaian Karis/Karsu, Karpeg dan Satya Lancana dengan Output : 500 Berkas
- Proses Usul dan Penetapan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dengan Output : 100 Orang
- Biayan Administrasi Penyerahan Tambahan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dengan Output : 9.630 PNS
- Penataan Administrasi dan Monitoring Pegawai Tidak Tetap dengan Output : 35 Orang
- Pemberian Insentif Bagi Tenaga Honorer (Eks. K2) dengan Output : 345 Orang
- Peningkatan Kinerja Aparatur dengan Output : 161OPD
- Optimalisasi Sistem E-Kinerja ASN Tahun 2019 dengan Output : 3 Lokasi
- Proses Administrasi Kenaikan Pangkat dengan Output : 2.600 SK Pangkat

MISI 4

TUJUAN 3.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Pelayanan Fungsi Legeslatif oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator Program : Prosentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan target Indikator Program sebesar 90%.



Program ini didukung oleh kegiatan :

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp. 3.633.443.129,- atau 82,06% dari anggaran sebesar Rp. 4.427.527.900,- dengan capaian indikator yaitu Jumlah perdin DPRD dalam rangka konsultasi dan koordinasi pembahasan raperda yang disediakan & terealisasi yaitu sebanyak 11 kali. DPRD memiliki beban tugas dan fungsi bersama-sama dengan eksekutif membentuk produk kebijakan daerah yang merupakan fungsi legislasi dimana pada tahun 2018 Perda yang dibahas sebanyak 11 perda dari 16 Perda yang diusulkan.

b. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan terealisasi sebesar Rp. 140.029.914,- atau 65,36% dari anggaran sebesar Rp. 214.252.900,- dengan capaian indikator Jumlah Rapat-rapat AKD yang disiapkan terealisasi sebanyak 139 kali. Sebagaimana kegiatan pembahasan Raperda di atas, pada kegiatan ini direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRD meliputi penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus, Komisi-komisi, Gabungan Komisi, Badan Kehormatan DPRD dan rapat alat-alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam tata tertib DPRD dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan daerah dengan target dan capaian target keluaran adalah jumlah kegiatan rapat alat kelengkapan DPRD.

c. Rapat – Rapat Paripurna

Rapat – Rapat Paripurna terealisasi sebesar Rp. 265.674.473,- atau 59,28% dari anggaran sebesar Rp. 448.172.900,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang disiapkan sebanyak 46 kali.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat paripurna yang dilakukan dalam rangka pembahasan Raperda baik APBD maupun Non APBD serta Pembahasan Non



Raperda dimana pada pembahasan Raperda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan II.

d. Penyusunan Risalah Hasil Paripurna DPRD

Penyusunan Risalah Hasil Paripurna DPRD terealisasi sebesar Rp. 77.998.750,- atau 61,93% dari anggaran Rp. 125.944.000,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah Risalah Rapat yang disusun sebanyak 1 paket.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD nomor 11 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan DPRD nomor 01 tahun 2010 dan terakhir dengan Peraturan DPRD No. 02 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD dimana pada pasal 85 disebutkan bahwa (1) untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat; (2) risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat dan pasal 86 (1) Sekretaris DPRD menyusun risalah rapat paripurna untuk dibagikan kepada anggota pada setiap akhir masa sidang; (2) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat alat kelengkapan DPRD untuk dibagikan kepada anggota setelah rapat selesai selambat-lambatnya tiga kali 24 jam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut harus disusun risalah rapat untuk kemudian diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Risalah hasil rapat paripurna ini dikategorikan sebagai produk hukum DPRD mengingat didalam risalah tersebut memuat jalannya tahapan pembicaraan serta menyangkut kronologis keputusan-keputusan yang telah diambil oleh alat kelengkapan DPRD dalam rangka menentukan kebijakan daerah atau dengan kata lain risalah ini merupakan data hukum sebagai dasar apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum. Target dan capaian target keluaran kegiatan ini adalah risalah rapat pembahasan peraturan daerah dan risalah rapat di luar pembahasan peraturan daerah.

e. Pemrosesan Produk Hukum DPRD

Pemrosesan Produk Hukum DPRD terealisasi sebesar Rp. 482.760.598,- atau 73,07% dari anggaran Rp. 660.663.900,-



dengan capaian Indikator Jumlah produk hukum yang diproses sebanyak 16 buah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan pembahasan, rapat-rapat kerja maupun kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD yaitu melalui proses tahapan kajian secara hukum yang kemudian disusun menjadi dokumen produk hukum DPRD dan diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan

f. Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD

Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD terealisasi sebesar Rp. 2.748.365.273,- atau 82,13% dari anggaran sebesar Rp. 3.346.263.000,- dengan capaian Indikator Jumlah naskah Akademik dan Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD sebanyak 14 buah.

Kegiatan ini merupakan tolak ukur adanya peningkatan peran DPRD dimana kegiatan tersebut meliputi penyusunan Raperda hasil buah pemikiran dan komitmen komisi-komisi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPRD yang meliputi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat internal serta kunjungan kerja komisi-komisi dalam rangka penyusunan raperda usul prakarsa DPRD. Kegiatan ini secara integral merupakan langkah awal yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kabupaten menyusun sebuah kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pembangunan daerah.

g. Penyajian Data Hukum DPRD

Penyajian Data Hukum DPRD terealisasi sebesar Rp. 191.652.190,- atau 55,82% dari anggaran sebesar Rp. 433.790.000,- dengan capaian Indikator jumlah Buku Perundang-undangan dan Peraturan DPRD yang dicetak sebanyak 100 buah.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memantau, mengikuti serta meng-update perkembangan hukum yang terjadi meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah serta menyusun data-data hukum yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



h. Penyelarasan Hasil Pembahasan Akhir Raperda

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi hasil penyelarasan raperda yang sudah dibahas ditingkat Pansus, kemudian untuk penyempurnaanya ditindaklanjuti oleh BP2D. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 39.095.000,- dengan realisasi indikator Jumlah Draft Raperda Penyelarasan yang disediakan sebanyak 4 buah

i. Perumusan Kajian Perubahan Raperda

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyiapkan usulan perubahan terhadap Perda yang sudah ditetapkan sebelumnya. Usulan perubahan tersebut diajukan dari pihak BP2D untuk kemudian ditindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat Pansus. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 298.692.650,- atau 73,49% dari anggaran sebesar Rp. 406.425.500,- dengan capaian indikator yaitu jumlah konsep perubahan perda yang didisediakan sebanyak 1 paket

j. Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD

Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD terealisasi sebesar Rp. 383.678.335,- atau 48,53% dari anggaran sebesar Rp. 790.649.000,- dengan capaian Indikator Jumlah Jasa Kajian Akademik Raperda Usul Eksekutif yang disediakan sebanyak 2 paket

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi penyusunan naskah akademik perancangan peraturan daerah dengan bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi melalui kerjasama swakelola.

k. Penyusunan Propemperda

Penyusunan Propemperda terealisasi sebesar Rp. 237.494.900,- atau 61,73% dari anggaran sebesar Rp. 384.735.000,- dengan capaian Indikator Jumlah PROPEMPERDA yang disediakan sebanyak 16 buah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan memfasilitasi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)



yang disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Sumenep.

Disamping usul tambahan sebagaimana dijelaskan di atas, juga ada sasaran strategis yang sudah terakomodir dalam Perbup. nomor 17 tahun 2016 yang telah diukur dan dipenuhi oleh kami yaitu meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan dengan IKU prosentase jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda.

MISI 4

TUJUAN 3.

SASARAN 3.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Optimalnya Kapasitas dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran :

Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,04%.

b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur :

Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,72%

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

Indikator kegiatan terpenuhi 81% dengan realisasi anggaran sebesar 99,84%. Indikator kegiatan tidak memenuhi target dari rencana jumlah aparatur yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek sebanyak 31 orang, namun yang terealisasi sebanyak 23 orang. Hal tersebut disebabkan karena anggaran yang ada hanya cukup untuk mengikutkan 23 orang dalam bimtek.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja:



Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 94,10%

e. Program Peningkatan Informasi Pembangunan :

Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,69%

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan :

Semua indikator kegiatan terpenuhi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 95,41%

g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian :

Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya melebihi dari target/indikator kegiatan diantaranya yaitu :

- Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala terpenuhi 106,25% atau 85 LHP dari target 80 LHP dengan Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar 99,82%. Hal ini disebabkan ada beberapa pengawasan yang dilakukan di luar yang direncanakan karena adanya peraturan baru, kebijakan pimpinan maupun hal lainnya.
- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah terpenuhi 190% atau 38 LHP dari target 20 LHP dengan Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar 99,82%. Hal ini disebabkan laporan kasus pengaduan yang masuk ke Inspektorat lebih besar dari yang direncanakan, sehingga kasus yang masuk harus ditangani.



Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejewantaan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :



a. Sasaran program meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) dengan indikator program Persentase penurunan penyakit masyarakat, keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan Peningkatan forum komunikasi eksekutif/legeslatif dalam format otonomi daerah

Kegiatan ini membahas tentang Permasalahan Daerah, dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun di Ruang Rapat Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, undangan yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya :

- Kapolres Sumenep;
- Kodim 0827 Sumenep;
- Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumenep;
- Ketua DPRD Sumenep;
- Bapak Sekretaris Daerah Kab. Sumenep;
- Bapak Asisten I,II,III Kab/ Sumenep;
- Instansi Terkait Pemerintah Daerah Kab. Sumenep;

2. Program penyakit masyarakat (PEKAT)

➤ Kajian Strategis Poleksosbud Dalam Komenda

Kegiatan Kajian Strategis POLEKSOSBUD Dalam KOMENDA adalah Komite Intelegent Daerah mengadakan Rapat atau Forum yang membahas tentang Stabilitas Keamanan Daerah, dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun di Ruang Rapat Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Suimenep, undangan yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya :

- Wakapolres Sumenep;
- Kasat Intelkam Polres Sumenep;
- Unsur Intelkam Polres Sumenep;
- Pasi Intel Kodim 0827 Sumenep;
- Unsur Intel Kodim 0827 Sumenep;



- Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat ini melaksanakan sosialisasi 4 X di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Gapura pada tanggal 26 April 2018;
- Kecamatan Dasuk pada tanggal 12 Juli 2018;
- Kecamatan Talango pada tanggal 22 November 2018;
- Kecamatan Batu Putih pada tanggal 18 Desember 2018;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

- b. Sasaran program Meningkatkan idiologi wawasan kebangsaan dan HAM dengan indikator program Persentase Fasilitasi pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :

- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama
Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ini melaksanakan sosialisasi 7 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Ambunten pada tanggal 17 April 2018;
- Kecamatan Manding pada tanggal 08 Mei 2018;
- Kecamatan Pragaan pada tanggal 13 Juli 2018;
- Kecamatan Dasuk pada tanggal 07 Agustus 2018;
- Kecamatan Batuan pada tanggal 23 Oktober 2018;
- Kecamatan Kalianget pada tanggal 14 Nopember 2018;
- Kecamatan Pasongsongan pada tanggal 14 Nopember 2018;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

- Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa



Kegiatan Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa ini melaksanakan sosialisasi 6 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Bluto pada tanggal 19 April 2018;
- Kecamatan Dungkek pada tanggal 15 Mei 2018;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

c. Sasaran program terlaksananya dukungan kelancaran politik bermasyarakat dengan indikator program Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

1. Program pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan :

- Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Di dalam Kegiatan ini melakukan Pemberian Bantuan Keuangan kepada 11 (sebelas) Partai Politik, diantaranya :

- Partai Demokrat;
- Partai Gerindra;
- Partai Golkar;
- Partai PPP;
- Partai PKB;
- Partai PBB;
- Partai PDIP;
- Partai Nasdem;
- Partai PKS;
- Partai PAN;
- Partai Hanura;

- Dukungan Kelancaran Pemilu

Di dalam Kegiatan ini mengadakan Posko Deks Pemilu Gubernur pada Tahun 2018



MISI 5

TUJUAN 1.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Peningkatan Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep didukung Program dan kegiatan sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep

a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Pengembangan Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Keputusan Bupati dengan Output : 107 kasus

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) dengan Output : 75 kasus
- Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP (Patroli Insidentil) dengan Output : 514 kasus

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, serta Program Peningkatan Informasi Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 773.065.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 653.257.732,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 84,50% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 10,23% dengan kegiatan :



1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan yang mencakup pengadministrasian surat menyurat.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan penyediaan jasa listrik, air, telepon, serta internet untuk kelancaran kegiatan yang dilaksanakan.
3. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan / perawatan, service, kir, serta STNK untuk kendaraan dinas.
4. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan pengadministrasian di bidang keuangan.
5. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan penyediaan alat dan bahan kebersihan.
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan penyediaan kebutuhan alat tulis kantor.
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan penyediaan barang cetak dan fotokopi.
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan penyediaan kebutuhan alat listrik dan elektronik.
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan penyediaan surat kabar, umbul-umbul, spanduk, serta iklan di media cetak maupun elektronik.
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan



- penyediaan kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu, serta rapat.
11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan dalam rangka rapat dan koordinasi ke luar daerah.
 12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan dalam rangka rapat dan koordinasi ke dalam daerah.
 13. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan kegiatan penyediaan jasa dalam hal administrasi perkantoran.
 14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor termasuk dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan kegiatan dalam memelihara dan merawat gedung kantor.
 15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional termasuk dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan kegiatan dalam memelihara dan merawat kendaraan dinas.
 16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor termasuk dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan kegiatan dalam memelihara dan merawat perlengkapan gedung kantor.
 17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer termasuk dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan kegiatan dalam memelihara dan merawat komputer PC, serta laptop.
 18. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal termasuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan kegiatan diklat atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.



19. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD termasuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan kegiatan penyusunan laporan-laporan yang berkaitan dengan capaian dan realisasi kinerja OPD.
 20. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan termasuk dalam Program Peningkatan Informasi Pembangunan merupakan kegiatan pameran pembangunan.
- b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam, serta Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 793.269.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 778.211.250,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 98,10% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 1,90% dengan kegiatan :
1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR) termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan pelatihan bagi anggota tim Search And Rescue (SAR) untuk meningkatkan kemampuan mereka.
 2. Kegiatan Pelatihan Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan pelatihan menggunakan alat pemadam api ringan.
 3. Kegiatan Pembinaan Desa Tangguh Bencana termasuk dalam Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang sudah dibentuk. Desa Tangguh Bencana dibentuk dengan harapan agar bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sumenep dapat berkurang dan kerugian yang ditimbulkan, baik berupa korban jiwa maupun kerugian materi, mampu diminimalisir. Hingga tahun 2018, BPBD Kabupaten Sumenep telah membentuk 5 (lima) Desa Tangguh Bencana, yakni di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan, Desa Langsar Kecamatan Saronggi, Desa



- Pajudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk, dan Desa Sindir Kecamatan Lenteng.
4. Kegiatan Operasional Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Kebakaran termasuk dalam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran meliputi kegiatan simulasi pemadaman api serta penyelamatan korban saat terjadi kebakaran yang dilakukan oleh tenaga pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Sumenep.
 5. Kegiatan Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional termasuk dalam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran meliputi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional.
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 145.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 143.450.000,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 98,65% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 1,35% dengan kegiatan :
1. Kegiatan Pengadaan Pendistribusian Logistik / Sembako Bagi Korban Bencana termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meliputi penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana di antaranya tenda pengungsi, dapur umum, peralatan komunikasi, pelampung. Sedangkan barang logistik yang disediakan bagi korban bencana seperti makanan siap saji, selimut, sembako, dan lain-lain.
 2. Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Tenaga PUSDALOPS-PB di BPBD Kabupaten Sumenep berjumlah 16 (enam belas) orang yang siap memberi dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat, serta menyediakan data dan informasi terkait bencana.
- d. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 12.090.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.652.234.080,-.



Anggaran tersebut terserap sebesar 88,10% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 11,9%.

1. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial termasuk dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan kegiatan pengkoordinasian penanggulangan dan penyelesaian bencana.
2. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana termasuk dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi rekonstruksi dan peningkatan kondisi sarana dan prasarana umum dalam rangka penanggulangan bencana, serta rehabilitasi atau perbaikan bangunan yang rusak akibat bencana. Pada tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di beberapa lokasi, di antaranya rekonstruksi tangkis laut di Kecamatan Talango, Nonggunong, serta pembangunan jembatan dan penguatan tebing jalan di Kecamatan Pragaan.

MISI 6

TUJUAN 1.

SASARAN 1.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam Penguatan/pemeliharaan seni dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, didukung dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Kegiatan ini merupakan bentuk dari indikator kesenian lokal yang dibina berupa acara tahunan Provinsi Jawa Timur yaitu Specta Night Carnival berupa perlombaan seni budaya kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur. Acara ini merupakan kalende even Visit Sumenep Year 2018.



2. Kegiatan Siaran Langsung Klenengan

Kegiatan ini merupakan bentuk dari indikator kesenian lokal yang dibina berupa penyajian musik tradisional Klenengan yang ditempatkan di keraton Sumenep menyambut tamu wisatawan yang datang ke Kabupaten Sumenep. Acara ini dilaksanakan setiap minggu selama satu tahun.
 3. Kegiatan Kerapan Sapi tingkat Kabupaten

Kegiatan ini merupakan bentuk dari indikator kesenian lokal yang dibina berupa perlombaan ketangkasan kerapan sapi tanpa kekerasan yang diikuti oleh pemilik sapi kerapan se Kabupaten Sumenep. Acara ini merupakan kelanjutan dari kerapan sapi tingkat kecamatan dan pemenang kerapan sapi tingkat Kabupaten ini akan dikirim ke perlombaan kerapan sapi se Madura.
 4. Kegiatan Festival Sapi Sonok

Kegiatan ini berupa ajang penampilan sapi sonok se Kabupaten Sumenep yang mendukung kesenian lokal yang dibina dimana sepasang sapi dihias sedemikian rupa dan diperlombakan penampilannya.
 5. Kegiatan Pengiriman Duta Seni Budaya

Kegiatan ini merupakan bentuk dari indikator penampilan seni dan tradisi berupa pengiriman Duta Seni Budaya Kabupaten Sumenep untuk mengikuti lomba, festival dan undangan penampilan di luar daerah.
 6. Kegiatan Fasilitasi Budaya Daerah

Kegiatan ini merupakan indikator kesenian lokal yang dibina berupa pameran keris sebagai even dalam menyambut Visit Sumenep 2018 dan bentuk penghargaan terhadap pakaian adat Sumenep.
- b. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Festival Keraton Nusantara

Suatu kegiatan untuk mendukung Visit Sumenep 2018 dan merupakan Kalender even 2018 yang mendukung pembinaan seni



budaya lokal. Kegiatan ini diikuti oleh keraton se Nusantara dan Asia Tenggara. Dimana masing masing utusan keraton menampilkan seni budaya pada acara kirab dan pawai budaya.

2. Kegiatan Lomba Musik Tong Tong se Madura

Suatu kegiatan untuk mendukung indikator jumlah kesenian lokal yang dibina berupa perlombaan kesenian musik tong tong yang diikuti pelaku kesenian musik tong tong se Madura.

3. Kegiatan Upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep

Suatu kegiatan yang mendukung indikator jumlah agenda sejarah yang dilestarikan berupa pelaksanaan upacara hari jadi Kabupaten Sumenep diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenakan pakaian adat keraton Sumenep.

4. Kegiatan Pawai Seni Budaya Kabupaten Sumenep

Suatu kegiatan yang mendukung indikator jumlah kelompok seni dan tradisi berupa jumlah kelompok seni yang ikut terlibat dalam kegiatan Pawai Seni Budaya Kabupaten Sumenep.

MISI 6

TUJUAN 1.

SASARAN 2.

Adapun Pencapaian pernyataan kinerja dalam peningkatan kualitas peranan pemuda dan prestasi olah raga di Kabupaten Sumenep oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan Pendataan Potensi Pemuda, kegiatan ini merupakan wujud dari indikator jumlah organisasi pemuda yang ada di kabupaten Sumenep sebanyak 11 buah organisasi pemuda yang didata keberadaan dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan



Kegiatan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda, kegiatan ini merupakan upaya pembinaan pemuda kreatif berupa ajang kreasi dalam bentuk lomba fotografi dengan objek seni budaya Kabupaten Sumenep yang diikuti kelompok pemuda / organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumenep.

- c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Kegiatan ini adalah bentuk dari indikator jumlah pemuda kreatif yang dibina berupa pelatihan kewirausahaan souvenir sehingga bisa menjadi lapangan pekerjaan.

2. Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

Kegiatan ini adalah bentuk dari indikator jumlah pemuda kreatif yang dibina berupa pelatihan keterampilan batik souvenir sehingga bisa menjadi lapangan pekerjaan.

- d. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda, didukung dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan ini merupakan bentuk dari indikator jumlah organisai pemuda yang aktif, berupa pernyataan bersama Anti Narkoba. Diikuti oleh organisai pemuda se Kabupaten Sumenep.

2. Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor

Kegiatan ini adalah bentuk dari indikator jumlah pemuda berprestasi yang dibina, berupa persiapan / pembinaan duta / wakil Kabupaten Sumenep mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor Tingkat Jawa Timur. Secara umum pemuda pelopor adalah suatu karya nyata yang diinisiasi dan diprakarsai oleh pemuda dalam setiap gagasan pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku kepeloporannya terkait dengan makna kebidangan yang dilaksanakan. Adapun secara operasional bidang kepeloporan dideskripsikan pada Bidang (1) Pendidikan; (2) Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara; (3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan



Lingkungan; (4) Pangan; (5) Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi.

- e. Program Pengembangan Kebijakan dan Pemasyarakatan Olahraga, didukung dengan Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan, kegiatan ini untuk mendata keberadaan organisasi olahraga dan keolahragaan berupa pendataan bidang keolahragaan baik organisasi olahraga, data atlet, data kejuaraan maupun data sarana prasarana olahraga.
- f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan bagi klub olahraga berupa pelaksanaan kompetisi olahraga yang diikuti oleh klub klub olahraga baik dari Kabupaten Sumenep maupun dari luar Kabupaten Sumenep. Olahraga yang dipertandingkan / diperlombakan adalah olahraga yang berkembang di masyarakat yaitu olahraga bulutangkis untuk 6 katagori.
 2. Kegiatan Pemassalan olahraga bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat
Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan olahraga yang di fasilitasi berupa Pertandingan Pencak Silat antar perguruan.
 3. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan kepada atlet olahraga yang berprestasi berupa pemberian penghargaan kepada atlet yang telah menyumbangkan prestasinya dalam bidang olahraga. Tahun 2017 ini telah di berikan bantuan uang pembinaan kepada 17 (tujuh belas) orang atlet yang berprestasi menjuarai beberapa pertandingan/perlombaan yang diadakan di luar Kabupaten Sumenep.
 4. Kegiatan Pengembnagan Olahraga Rekreasi



Kegiatan ini berupa kegiatan Olahraga Bulutangkis sebagai salah satu even Kalender Wisata menyambut Visit Sumenep 2018.

5. Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani

Kegiatan ini berupa kegiatan rutin senam kesegaran jasmani yang melibatkan klub klub senam sebagai pelatih. Dilaksanakan dua kali seminggu, yaitu pada setiap hari jumat di lapangan Pemda diikuti seluruh ASN dan setiap hari minggu di taman kota untuk masyarakat umum.

6. Kegiatan Lomba Catur

Kegiatan ini merupakan salah satu even yang diselenggarakan untuk menyambut Visit Sumenep 2018 yang diikuti klub-klub olahraga catur nasional.

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat di gunakan masyarakat umum berupa pengadaan sarana dan prasarana olahraga.

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan ini memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga berupa penyediaan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga beserta penyediaan sarana olahraga yang dapat digunakan masyarakat umum.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagai berikut:

Tabel : 3.8
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 s/d Tahun 2018

Uraian	2017		2018		Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Dalam Juta Rupiah)			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Rp.	Target %	Realisasi Rp.	Realisasi %
Pendapatan asli daerah	196.786,70	190.750,07	226.304,70	185.911,59	29.518	15%	-4.838	-16%
Dana perimbangan	1.510.220,41	1.505.652,31	1.571.419,69	1.601.302,42	61.199	4%	95.650	156%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	421.772,75	464.587,16	433.464,51	456.872,16	11.691	3%	-7.715	-66%
Jumlah pendapatan daerah	2.128.779,86	2.160.989,53	2.231.188,90	2.244.281,25	102.409	5%	83.097	81%

2. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH

Realisasi belanja daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Apabila dicermati dari komposisi anggaran dalam upaya mewujudkan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021, yang masuk dalam kategori Urusan



Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Administrasi dan Fungsi Pemerintah Daerah oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membelanjakan anggaran belanja daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.9
Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Tahun 2018

No.	URAIAN URUSAN DAN ORGANISASI	PAGU	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
1	URUSAN WAJIB				
101	PENDIDIKAN				
	10101 DINAS PENDIDIKAN	678.280.236.784,00	613.252.593.436,00	(65.027.643.348,00)	90,41
102	KESEHATAN				
	10201 DINAS KESEHATAN	278.961.038.430,00	218.429.828.460,66	(60.531.209.969,34)	78,30
	10202 RSD. MOH ANWAR	128.942.584.114,00	80.549.897.104,79	(48.392.687.009,21)	62,47
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	10301 DINAS PU BINA MARGA	116.349.277.474,00	100.635.244.360,78	(15.714.033.113,22)	86,49
	10302 DINAS PU SUMBER DAYA AIR	33.745.648.361,00	32.903.122.122,50	(842.526.238,50)	97,50
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	100.271.748.274,00	82.852.345.188,77	(17.419.403.085,23)	82,63
105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	10501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.066.331.392,00	6.505.959.527,00	(560.371.865,00)	92,07
106	SOSIAL				
	10601 DINAS SOSIAL	7.581.235.384,00	7.024.315.925,08	(556.919.458,92)	92,65
107	TENAGA KERJA				
	10701 DINAS TENAGA KERJA	6.647.591.954,00	6.282.812.561,00	(364.779.393,00)	94,51
108	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	16.492.749.925,00	14.360.002.854,00	(2.132.747.071,00)	87,07
109	PANGAN				
	10901 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	13.076.347.616,00	5.777.135.949,00	(7.299.211.667,00)	44,18
110	PERTANAHAN				
111	LINGKUNGAN HIDUP				
	11101 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.696.976.179,00	16.992.062.007,00	(704.914.172,00)	96,02
112	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.827.029.077,00	10.445.467.818,00	(1.381.561.259,00)	88,32
113	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.123.588.953,00	14.613.411.748,00	(2.510.177.205,00)	85,34
114	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				



No.	URAIAN URUSAN DAN ORGANISASI	PAGU	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
115	PERHUBUNGAN				
	11501 DINAS PERHUBUNGAN	140.081.625.734,00	91.068.350.063,00	(49.013.275.671,00)	65,01
116	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	11601 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.777.436.585,00	14.232.172.532,00	(545.264.053,00)	96,31
117	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	11701 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	14.459.338.243,00	12.542.396.346,00	(1.916.941.897,00)	86,74
118	PENANAMAN MODAL				
	11801 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.875.003.386,00	4.686.829.636,00	(188.173.750,00)	96,14
119	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
120	STATISTIK				
121	PERSANDIAN				
122	KEBUDAYAAN				
	12201 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	26.734.180.429,00	23.221.606.167,16	(3.512.574.261,84)	86,86
123	PERPUSTAKAAN				
	12301 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.834.701.478,00	3.693.242.439,00	(141.459.039,00)	96,31
124	KEARSIPAN				
2	URUSAN PILIHAN				
201	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	20101 DINAS PERIKANAN	8.583.367.601,00	8.268.569.182,00	(314.798.419,00)	96,33
202	PARIWISATA				
203	PERTANIAN				
	20301 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	20.866.112.071,00	19.689.711.994,00	(1.176.400.077,00)	94,36
204	KEHUTANAN				
206	PERDAGANGAN				
	20601 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40.170.108.773,00	35.232.247.544,48	(4.937.861.228,52)	87,71
207	PERINDUSTRIAN				
208	TRANSMIGRASI				
3	URUSAN ADMINSTRASI DAN FUNGSI				
301	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				
	30101 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	774.544.581,00	766.125.154,00	(8.419.427,00)	98,91
302	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	30201 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	26.137.556.207,00	21.441.925.896,00	(4.695.630.311,00)	82,03
303	SEKRETARIAT DAERAH				
	30301 BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	1.185.777.800,00	1.162.745.119,00	(23.032.681,00)	98,06
	30302 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	2.518.073.550,00	2.130.463.675,00	(387.609.875,00)	84,61
	30303 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT	4.042.809.825,00	3.481.042.800,00	(561.767.025,00)	86,10



No.	URAIAN URUSAN DAN ORGANISASI	PAGU	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
	DAERAH				
30304	BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	2.916.125.691,00	2.744.017.688,00	(172.108.003,00)	94,10
30305	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	5.833.393.715,00	5.374.381.031,00	(459.012.684,00)	92,13
30306	BAGIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	1.235.254.839,00	1.104.988.448,00	(130.266.391,00)	89,45
30307	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	28.182.684.677,00	26.145.497.175,00	(2.037.187.502,00)	92,77
30308	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	2.400.699.404,00	2.303.301.921,00	(97.397.483,00)	95,94
30309	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH	2.430.111.837,00	2.410.938.250,00	(19.173.587,00)	99,21
30310	KECAMATAN KOTA SUMENEP	1.828.211.043,00	1.705.864.501,00	(122.346.542,00)	93,31
30311	KECAMATAN KALIANGET	1.828.115.306,00	1.786.109.400,00	(42.005.906,00)	97,70
30312	KECAMATAN TALANGO	1.722.906.592,00	1.659.223.945,00	(63.682.647,00)	96,30
30313	KECAMATAN MANDING	1.895.671.542,00	1.846.024.692,00	(49.646.850,00)	97,38
30314	KECAMATAN BLUTO	2.242.997.948,00	2.123.536.166,00	(119.461.782,00)	94,67
30315	KECAMATAN SARONGGI	1.798.977.547,00	1.669.776.098,00	(129.201.449,00)	92,82
30316	KECAMATAN LENTENG	1.979.256.943,00	1.880.925.405,00	(98.331.538,00)	95,03
30317	KECAMATAN GILIGENTENG	1.434.799.303,00	1.369.018.944,00	(65.780.359,00)	95,42
30318	KECAMATAN GULUK_GULUK	1.626.911.696,00	1.561.151.775,00	(65.759.921,00)	95,96
30319	KECAMATAN GANDING	1.863.102.813,00	1.818.296.273,00	(44.806.540,00)	97,60
30320	KECAMATAN PRAGAAN	2.039.522.830,00	1.927.591.188,00	(111.931.642,00)	94,51
30321	KECAMATAN RUBARU	1.711.247.001,00	1.644.055.796,00	(67.191.205,00)	96,07
30322	KECAMATAN AMBUNTEN	1.973.816.218,00	1.851.601.929,00	(122.214.289,00)	93,81
30323	KECAMATAN PASONGSONGAN	1.517.984.668,00	1.444.305.299,00	(73.679.369,00)	95,15
30324	KECAMATAN DASUK	1.883.573.565,00	1.810.878.745,00	(72.694.820,00)	96,14
30325	KECAMATAN BATANG_BATANG	2.014.556.362,00	1.980.111.664,00	(34.444.698,00)	98,29
30326	KECAMATAN BATUPUTIH	1.762.233.697,00	1.675.623.747,00	(86.609.950,00)	95,09
30327	KECAMATAN GAPURA	1.886.407.175,00	1.813.639.654,00	(72.767.521,00)	96,14
30328	KECAMATAN DUNGKEK	1.486.939.338,00	1.432.466.460,00	(54.472.878,00)	96,34
30329	KECAMATAN GAYAM	1.722.804.814,00	1.667.294.119,00	(55.510.695,00)	96,78
30330	KECAMATAN NONGGUNONG	1.747.661.593,00	1.670.769.309,00	(76.892.284,00)	95,60
30331	KECAMATAN RAAS	1.582.661.984,00	1.496.974.567,00	(85.687.417,00)	94,59
30332	KECAMATAN MASALEMBU	1.385.081.114,00	1.325.397.374,00	(59.683.740,00)	95,69
30333	KECAMATAN ARJASA	2.111.472.425,00	2.028.944.960,00	(82.527.465,00)	96,09
30334	KECAMATAN SAPEKEN	2.023.042.521,00	1.925.357.083,00	(97.685.438,00)	95,17
30335	KECAMATAN BATUAN	1.899.591.865,00	1.828.818.212,00	(70.773.653,00)	96,27
30336	KECAMATAN KANGAYAN	1.706.571.385,00	1.637.543.204,00	(69.028.181,00)	95,96
30337	KECAMATAN KOTA - KELURAHAN BANGSELOK	641.110.421,00	608.739.094,00	(32.371.327,00)	94,95
30338	KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KARANGDUAK	684.975.057,00	639.900.055,00	(45.075.002,00)	93,42
30339	KECAMATAN KOTA - KELURAHAN KEPANJIN	740.246.740,00	716.592.826,00	(23.653.914,00)	96,80
30340	KECAMATAN KOTA - KELURAHAN PAJAGALAN	538.157.047,00	491.971.458,00	(46.185.589,00)	91,42
304	SEKRETARIAT DPRD				



No.	URAIAN URUSAN DAN ORGANISASI	PAGU	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
	30401 SEKRETARIAT DPRD	39.342.555.565,00	31.019.710.723,00	(8.322.844.842,00)	78,85
305	PENGAWASAN				
	30501 INSPEKTORAT	7.534.286.325,00	7.244.439.693,00	(289.846.632,00)	96,15
306	PERENCANAAN				
	30601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.761.549.666,00	9.013.908.329,00	(747.641.337,00)	92,34
307	KEUANGAN				
	30701 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	547.721.474.438,00	529.664.105.188,00	(18.057.369.250,00)	96,70
308	KEPEGAWAIAN				
	30801 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.935.932.893,00	13.808.137.589,00	(11.127.795.304,00)	55,37
309	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
310	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
311	WAWASAN BANGSA				
	31101 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.082.030.164,00	3.745.354.718,00	(336.675.446,00)	91,75
312	PENANGGULANGAN BENCANA				
	31201 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.101.655.677,00	14.472.356.794,00	(1.629.298.883,00)	89,88
JUMLAH TOTAL		2.486.861.383.624,00	2.150.331.269.099,22	(336.530.114.524,78)	86,47